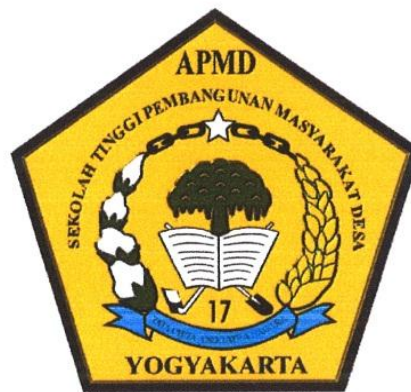


**PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

(Studi di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

MARIA ANDRIANA PERIA DONI NIMUNUHO

21520111

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025



**PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

(Studi di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

MARIA ANDRIANA PERIA DONI NIMUNUHO

21520111

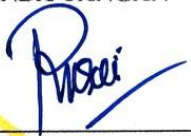


**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 05 Juni 2025
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. <u>Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP., M.P.A</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A</u> Penguji Samping I	
3. <u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> Penguji Samping II	

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Andriana Peria Doni Nimunuho

NIM : 21520111

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul)”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Juni 2025

Yang Membuat
Pernyataan



Maria Andriana Peria Doni Nimunuho

21520111

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Maria Andriana Peria Doni Nimunuho
NIM : 21520111
Telp : 082237839403
Email : rhyma900@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(Studi Di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul) ”**

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif**
(*Non-exclusive Royalti-Free Right*)

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 05 Juni 2025
Yang membuat pernyataan

Maria A

21520111 Nimunuho

MOTTO

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa”

(Roma 12:12)

“Karena masa depan sungguh ada dan harapan-mu tidak akan hilang” (Amsal 23:18)

“keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”

(B.J Habibie)

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju” (Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, semangat dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dengan segala kerendahan hati, ucapan syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia-nya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Terima kasih roh kudus atas segala berkat dan kasih setia- mu. Tuhan Yesus baik dan luar biasa.
2. Terima kasih untuk kedua orang tua tercinta saya Bapak Markus Mamun Doni dan Ibu Agnes Jelu Gega, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya dan keberhasilan dalam penulisan skripsi ini, ucapan terima kasih saya tak akan pernah cukup untuk membalas segala kebaikan kalian.
3. Terima kasih untuk kakak laki-laki saya Frengki Payon Peran beserta isterinya Monika Paskalina Buka Kopong dan kakak perempuan saya Eufrasia Rima Titin Sina, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, keceriaan serta doa yang kalian panjatkan untuk keberhasilan ini, cinta dan kasih sayang kalian telah memberikan saya semangat yang menggebu, terima kasih dan sayangku untuk kalian.
4. Terima kasih untuk dosen pembimbing saya Ibu Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP., MPA, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya serta memberikan bimbingan dan pelajaran agar saya tetap semangat. Terima kasih selalu tulus membantu dalam penulisan skripsi saya dan semoga menjadi ilmu yang sangat bermanfaat.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul)” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik itu dalam pengalaman dan ilmu pengetahuan serta wawasan dalam berfikir dan menulis. Maka dari itu, apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dimohon untuk kritik dan sarannya. Penulis juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP., MPA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dra., Safitri Endah Winarti, M.Si selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku penguji I yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini
5. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si selaku penguji II yang telah memberikan evaluasi, arahan dan masukan guna penyusunan skripsi yang lebih baik.

6. Bapak/Ibu dosen, serta segenap karyawan Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
7. Pemerintahan Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, dan seluruh masyarakat Kalurahan Guwosari yang telah memberikan izin, ruang, tempat, waktu, dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya di masa perkuliahan dari awal semester hingga sekarang yaitu Rifa Husniya, terima kasih sudah menjadi teman, sahabat, dan saudara yang selalu membawa keceriaan. Mengambil banyak peran penting dibalik proses saya dan selalu ada di saat susah maupun senang. Semoga impian dan harapan kita dapat terwujud.
9. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang tidak bisa saya tuliskan satu per satu, yang selalu ada untuk saya disaat suka maupun duka yang sudah kita lalui bersama-sama. Semangat dari kalian sangat berharga bagi saya.
10. Terima kasih untuk Bapak Petrus Kia Paji yang selalu membantu ketika saya dalam kesulitan saat mengerjakan skripsi serta adik laki-laki saya Ferdinandus Beda Kia dan Ardianus Maluhama Daton, yang selalu memberikan semangat serta hiburan di saat saya berproses. Salam sayang untuk kalian.
11. Teruntuk seseorang yang selalu ada dan siap membantu penulis kapanpun yaitu Viktorius Mangu Umakela, terima kasih sudah banyak berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kamu diberikan kelancaran juga dalam setiap prosesmu.

Sebagai penutup, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan UMKM. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik di kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum, dalam memahami

pentingnya pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-nya kepada kita semua.

Yogyakarta, 05 Juni 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. D. N.', with a stylized flourish at the end.

Maria Andriana Peria Doni Nimunuho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
INTISARI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Fokus Penelitian.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Literatur Review	12
G. Kerangka Konseptual	25
1. <i>Governing</i>	25
2. Pemerintah	36
3. Pemerintah Kalurahan	40
4. Pemerintah dalam Pengembangan UMKM	44
H. Metode Penelitian.....	48
1. Jenis Penelitian	49
2. Unit Analisis.....	49
a. Subjek Penelitian	49
b. Objek Penelitian.....	50
c. Lokasi Penelitian.....	51
3. Teknik Pengumpulan Data	51
a. Observasi (<i>Observation</i>).....	51

b. Wawancara (<i>Interview</i>)	52
c. Dokumentasi	53
4. Teknik Analisis Data.....	54
a. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data).....	55
b. <i>Data Display</i> (Penyajian Data).....	55
c. <i>Conclusion Drawing/Verification</i> (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)	55
BAB II PENGEMBANGAN UMKM DI KALURAHAN GUWOSARI	57
A. Pengembangan UMKM	57
B. Kondisi Geografis	65
C. Kondisi Demografis	66
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	67
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	67
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	68
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	69
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	70
D. Kondisi Ekonomi	71
E. Sarana Dan Prasarana.....	76
F. Kondisi Sosial dan Budaya	78
G. Struktur Pemerintah Kalurahan.....	79
BAB III PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KALURAHAN GUWOSARI	87
A. Strategi Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Guwosari.....	88
B. Program Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Guwosari	106
C. Anggaran Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Guwosari	118
BAB IV PENUTUP.....	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	134
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan	50
Tabel 2.1 Jumlah Padukuhan dan RT di Kalurahan Guwosari.....	65
Tabel 2.2 Batas-Batas Wilayah Kalurahan Guwosari	66
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	67
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	67
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	68
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	69
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	70
Tabel 3.1 Rincian Anggaran UMKM.....	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Produk-Produk <i>Craft</i> dan <i>Fashion</i> di Kalurahan Guwosari	63
Gambar 2.2 Produk-Produk Kuliner UMKM di Kalurahan Guwosari.....	64
Gambar 2.3 Peta Kalurahan Guwosari	66
Gambar 2.4 Lahan Pertanian Cabe di Kalurahan Guwosari	72
Gambar 2.5 Kantor Balai Kalurahan Guwosari	73
Gambar 2.6 Kerajinan Wayang di Kalurahan Guwosari	74
Gambar 2.7 Warung Kuliner Ingkung Ayam di Kalurahan Guwosari.....	75
Gambar 2.8 Kandang Sapi di Kalurahan Guwosari	76
Gambar 3.1 Pelatihan Desa Preneur Tahap Pengembangan	105
Gambar 3.2 Pengadaan Bazar Oleh Pelaku UMKM	105
Gambar 3.3 Program Studi Tiru untuk Pelaku UMKM	116
Gambar 3.4 Program Pelatihan UMKM.....	117
Gambar 3.5 Program Pameran UMKM.....	118

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Pemerintah Kalurahan Guwosari.....	80
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Tugas

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 Interview Guide (Panduan Wawancara)

Lampiran 6 Foto-Foto di Lokasi Penelitian

INTISARI

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian lokal, termasuk di Kalurahan Guwosari. Namun, pengembangan UMKM di wilayah ini masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap teknologi *digital* dan keterbatasan akses informasi yang berdampak pada kualitas serta daya saing produk. Selain itu, masih kurangnya kemampuan dan minat pelaku UMKM untuk memasarkan produk ke luar wilayah menjadi hambatan utama dalam perluasan pasar. Pemerintah Kalurahan Guwosari telah menginisiasi sejumlah program pelatihan dan promosi, baik secara daring maupun luring, namun efektivitas program tersebut masih belum optimal dan membutuhkan strategi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan secara mendalam terkait Pemerintah Kalurahan Guwosari dalam mendukung pengembangan UMKM. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak pemerintah kalurahan, pelaku UMKM, serta observasi lapangan dan dokumentasi program. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika kebijakan serta respon masyarakat terhadap berbagai strategi, program dan anggaran pengembangan UMKM yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kalurahan Guwosari telah efektif menjalankan tiga strategi utama, yaitu strategi distributif melalui pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi promosi produk; strategi regulatif melalui penyusunan aturan pendukung serta bantuan legalitas usaha; dan strategi konstituen dengan melibatkan pelaku UMKM secara partisipatif dalam proses perencanaan dan evaluasi program. Pemerintah juga aktif menjalin kerja sama dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan untuk memperkuat kapasitas UMKM melalui program pengembangan UMKM. Selain itu, alokasi anggaran dari APBKal, khususnya Dana Desa (DDS), digunakan untuk mendukung kegiatan pelatihan, studi tiru, penyediaan alat produksi, serta kebutuhan operasional program. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kalurahan Guwosari dalam membangun ekosistem UMKM yang berdaya saing, meskipun masih perlu pemerataan dalam menjalankan strategi, program dan pengalokasian anggaran serta peningkatan kapasitas *digital* dan perubahan pola pikir pelaku usaha untuk mencapai keberlanjutan.

Kata kunci : Pemerintah Kalurahan, Pengembangan, UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemajuan sebuah negara atau wilayah. Dalam konteks pembangunan ekonomi, desa memiliki peranan strategis sebagai basis penggerak perekonomian yang harus dikelola secara mandiri agar dapat menghasilkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pemerintah desa diberi kepercayaan penuh untuk mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa. Hal ini menjadi langkah awal dalam menciptakan kemandirian desa yang pada akhirnya dapat memajukan dan membangun desa secara berkelanjutan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi desa tidak hanya dapat mendorong peningkatan *output* per kapita, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat setempat yang merupakan cerminan dari kesejahteraan masyarakat (Ernaningsih, 2021).

Dalam konteks ini, pemerintah desa memegang peranan penting dalam mengelola potensi lokal melalui berbagai strategi, salah satunya adalah pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa. UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan masyarakat. UMKM adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan secara mandiri dalam skala kecil oleh kelompok masyarakat, keluarga, maupun perorangan. Meskipun skala usahanya kecil,

UMKM mampu menjadi tulang punggung perekonomian suatu negara karena jumlahnya yang sangat banyak dan keberadaannya yang tersebar luas hingga ke pelosok desa. UMKM mampu menyerap tenaga kerja lokal serta memberdayakan masyarakat sehingga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Di tingkat pemerintahan desa atau kalurahan, UMKM menjadi bagian dari kewenangan pemerintah yang berhubungan langsung dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kalurahan Guwosari Tahun 2023 Pasal 1 ayat 16 yang menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bidang utama dalam tata kelola pemerintahan kalurahan (Putra & Santoso, 2022).

Kalurahan Guwosari merupakan salah satu wilayah di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menunjukkan kemajuan dalam pengembangan berbagai potensi lokal melalui pemberdayaan UMKM. Kalurahan ini memiliki beberapa predikat dan status penting, seperti Desa Mandiri Budaya, Desa Preneur, Desa Anti Korupsi, Desa Pangan Aman, serta penerapan inovasi desa dan pengelolaan sampah *zero waste* yang merupakan bagian dari upaya menuju Desa Prima di bawah Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 2020. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pengelolaan potensi alam yang dimiliki, seperti sektor pertanian, perkebunan, buah-buahan, dan kayu-kayuan yang kemudian dikembangkan melalui produk UMKM berupa olahan makanan tradisional dan kerajinan tangan. Keberadaan potensi alam dan sumber daya lokal tersebut merupakan modal utama yang harus terus dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat kalurahan.

Namun, meskipun UMKM di Kalurahan Guwosari memiliki potensi yang besar, pengembangannya masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah keterbatasan pemahaman dan pemanfaatan teknologi digital oleh para pelaku UMKM. Dalam era digitalisasi saat ini, teknologi menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas akses pemasaran dan meningkatkan kualitas produk. Namun, sebagian pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengakses dan menggunakan teknologi digital, yang berdampak pada terbatasnya aksesibilitas produk ke pasar yang lebih luas. Selain itu, terdapat juga kendala dalam hal pemasaran produk di luar wilayah Kalurahan Guwosari. Beberapa pelaku UMKM masih enggan memasarkan produknya ke luar kalurahan karena berbagai alasan, seperti kekhawatiran persaingan pasar dan kurangnya dukungan promosi. Kondisi ini mengakibatkan pertumbuhan UMKM di kalurahan belum maksimal dan masih bersifat lokal.

Pemerintah Kalurahan Guwosari sebenarnya telah berupaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dengan melaksanakan program pelatihan dan kegiatan pemasaran baik secara *online* maupun *offline*. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku UMKM dalam mengelola usaha serta memahami teknologi *digital* yang kini menjadi kebutuhan utama dalam berbisnis. Selain itu, pemerintah kalurahan juga menginisiasi kegiatan pemasaran yang melibatkan berbagai *platform digital* dan event lokal guna memperluas pasar produk UMKM. Meskipun demikian, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang optimal dalam hal pengembangan UMKM yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan kuat

dari pemerintah kalurahan untuk menjawab tantangan yang ada, serta mengakselerasi pertumbuhan UMKM yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan UMKM tidak hanya penting dari sisi ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial yang tinggi. UMKM mampu memberdayakan masyarakat lokal dengan menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan, dan memperkuat jejaring sosial ekonomi di tingkat desa. Pemerintah kalurahan, dengan berbagai program dan kebijakan yang dijalankan, berperan sebagai fasilitator dan pelaksana pembangunan yang harus memastikan bahwa UMKM berkembang secara inklusif dan berkelanjutan. Kemandirian UMKM akan membantu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan pada sumber ekonomi eksternal. Oleh karena itu, strategi pengembangan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan harus bersifat holistik, mencakup aspek pelatihan, akses modal, pemasaran, teknologi, dan regulasi yang mendukung keberlangsungan usaha mikro dan kecil (Rachma & Abdullah, 2024).

Pengembangan UMKM oleh pemerintah kalurahan tidak dapat dilepaskan dari peran aktif dalam tata kelola pemerintahan lokal yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Sebagai unit pemerintahan terkecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah kalurahan memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka memaksimalkan potensi desa. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM sangat dipengaruhi oleh tingkat kapasitas pemerintah desa dalam mengelola sumber daya yang ada serta dalam menyusun strategi pemberdayaan yang adaptif terhadap

kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam kasus Kalurahan Guwosari, potensi sumber daya alam dan budaya yang dimiliki sangatlah besar, namun pemanfaatannya belum optimal akibat berbagai kendala struktural dan kultural. Salah satu hambatan terbesar adalah rendahnya kemampuan pemanfaatan teknologi *digital* di kalangan pelaku UMKM. Padahal, dalam era revolusi industri 4.0, teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci penting dalam mengembangkan usaha, terutama dalam hal pemasaran *digital*, manajemen produksi, dan inovasi produk. Keterbatasan ini menyebabkan UMKM di Guwosari belum dapat bersaing secara luas dan terbatas pada pasar lokal saja (Putra & Santoso, 2022).

Pemerintah kalurahan juga menghadapi tantangan dalam hal pemasaran produk UMKM. Banyak pelaku UMKM yang masih enggan memasarkan produk mereka ke luar wilayah Kalurahan Guwosari karena berbagai alasan, antara lain ketidakpastian pasar, keterbatasan jaringan distribusi, dan rendahnya kemampuan promosi. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi pemasaran yang inovatif dan terpadu agar produk UMKM tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga dapat menembus pasar regional bahkan nasional. Pemerintah kalurahan bisa memfasilitasi pelaku UMKM dengan mengadakan *event* bazar, memperkuat jejaring bisnis dengan pemerintah kabupaten dan provinsi, serta memanfaatkan *platform e-commerce* sebagai media pemasaran yang efektif dan efisien (Santoso, 2023).

Dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM, faktor sumber daya manusia juga menjadi kunci keberhasilan. Pelaku UMKM yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai cenderung mampu mengelola usaha dengan lebih baik serta beradaptasi dengan perubahan pasar. Oleh

karena itu, peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, dan inovasi produk sangat penting dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah kalurahan perlu bekerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan, universitas, serta lembaga swadaya masyarakat untuk menyediakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM di Guwosari. Di sisi lain, ketersediaan akses modal juga menjadi kendala yang sering dihadapi UMKM. Banyak pelaku UMKM yang sulit mendapatkan modal usaha dengan bunga rendah dan persyaratan yang mudah dipenuhi. Pemerintah kalurahan dapat memfasilitasi akses ke lembaga keuangan mikro atau koperasi desa yang menyediakan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah.

Pemerintah kalurahan juga perlu membangun sinergi dengan berbagai *stakeholder*, termasuk pemerintah kabupaten, dinas terkait, lembaga keuangan, akademisi, dan pelaku usaha. Sinergi ini penting agar program pengembangan UMKM dapat berjalan secara terpadu dan menyentuh berbagai aspek yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Sebagaimana dikemukakan oleh Sutoro Eko, tata kelola pemerintahan (*governing*) yang efektif memerlukan kolaborasi multi-pihak yang mampu menghasilkan solusi terbaik untuk masalah yang ada di tingkat lokal. Kolaborasi ini akan memperkuat posisi UMKM dalam menghadapi persaingan pasar serta meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian desa (Eko, 2020).

Pengembangan UMKM yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. UMKM dapat menjadi media pelestarian budaya lokal melalui produk kerajinan tangan dan kuliner tradisional yang dikembangkan di Kalurahan

Guwosari. Dengan demikian, pengembangan UMKM juga merupakan upaya pelestarian nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun, sekaligus menjadi sumber pendapatan yang menguatkan ekonomi masyarakat. Hal ini selaras dengan visi Kalurahan Guwosari sebagai Desa Mandiri Budaya dan Desa Preneur yang menggabungkan nilai budaya dan semangat kewirausahaan (Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 2020).

Mengacu pada berbagai permasalahan dan potensi yang ada, penelitian mengenai peran pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana strategi, program, serta tata kelola yang diterapkan oleh pemerintah kalurahan dalam mendukung UMKM. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat peran pemerintah kalurahan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi di tingkat desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi kalurahan lain yang memiliki kondisi serupa dalam mengembangkan UMKM demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Selain upaya pengembangan yang dilakukan secara internal oleh pemerintah kalurahan, dukungan dari regulasi yang lebih tinggi juga menjadi faktor penting yang mendorong pertumbuhan UMKM di desa. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program strategis untuk memperkuat sektor UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), program inkubasi bisnis, serta pelatihan berbasis kompetensi. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah kalurahan mampu menerjemahkan dan mengimplementasikan

kebijakan tersebut dalam skala lokal. Dalam hal ini, kapasitas institusional pemerintah kalurahan menjadi hal yang sangat penting, mencakup kemampuan dalam perencanaan, manajemen, koordinasi, dan evaluasi program pengembangan UMKM. Tanpa kapasitas yang memadai, maka kebijakan yang baik sekalipun akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan (Wibowo, 2020).

Pemerintah Kalurahan Guwosari yang telah memperoleh sejumlah penghargaan dan status sebagai Desa Mandiri Budaya serta Desa Anti Korupsi menunjukkan bahwa secara kelembagaan, kalurahan ini memiliki fondasi tata kelola yang baik. Namun, capaian tersebut harus terus diperkuat dengan praktik pemerintahan yang responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendekatan governing yang tidak lagi hanya menekankan pada fungsi administratif semata, tetapi juga pada bagaimana pemerintah desa menjadi aktor perubahan yang mampu merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara aktif dan partisipatif. (Sari, 2022) Pemerintah Kalurahan Guwosari harus mampu menempatkan diri tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai fasilitator, katalisator, dan inisiator dalam proses pengembangan ekonomi berbasis komunitas, terutama melalui UMKM.

Tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi, dan kompetisi pasar bebas, UMKM dituntut untuk lebih adaptif dan inovatif. Ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah kalurahan agar tidak hanya mengandalkan pendekatan konvensional, tetapi mulai merancang strategi yang berbasis inovasi dan kolaborasi. Kalurahan Guwosari yang memiliki latar budaya kuat bisa mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif berbasis lokal,

misalnya dengan mengembangkan pusat produksi bersama, *marketplace* lokal, serta memperkuat identitas produk melalui sertifikasi halal, PIRT, hingga sertifikat merek. Semua ini membutuhkan dukungan regulasi, pendampingan, serta monitoring yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan secara berkala dan terstruktur. Selain itu, pembentukan forum UMKM atau koperasi berbasis komunitas juga dapat menjadi sarana penguatan kapasitas kolektif pelaku usaha dalam menghadapi dinamika pasar. Penting juga untuk dicermati bahwa pengembangan UMKM tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat.

Dalam pendekatan *governing* yang bersifat partisipatif, peran masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang berperan aktif dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan desa. Dalam konteks ini, pemerintah Kalurahan Guwosari harus membuka ruang dialog yang lebih luas dengan pelaku UMKM, kelompok perempuan, pemuda, serta kelompok marginal lainnya untuk merancang kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Proses perencanaan partisipatif seperti Musyawarah Kalurahan (Muskal) dan Musrenbangkal perlu dimanfaatkan sebagai ajang identifikasi kebutuhan riil pelaku UMKM agar kebijakan yang dilahirkan benar-benar menjawab persoalan di lapangan. Pemerintah Kalurahan Guwosari juga harus mulai mempertimbangkan pentingnya data dan sistem informasi yang mendukung pengembangan UMKM. Pendataan pelaku UMKM, jenis usaha, omzet, dan potensi pasarnya harus tersedia secara sistematis agar dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan intervensi yang tepat sasaran. Sistem informasi desa

yang terintegrasi dengan data UMKM akan membantu pemerintah kalurahan dalam melakukan pemantauan, evaluasi, serta penyesuaian kebijakan yang diperlukan dari waktu ke waktu. Penggunaan data ini juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola UMKM di kalurahan (Arumsari & Rahayu, 2022).

Dengan memperhatikan berbagai dimensi tersebut, maka pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak dan menyasar seluruh aspek pendukung. Pemerintah kalurahan sebagai ujung tombak pemerintahan desa dituntut untuk dapat merancang strategi yang konkret, partisipatif, dan berkelanjutan agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan mampu menggali lebih dalam bagaimana bentuk nyata *governing* dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Guwosari dalam pengembangan UMKM, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan program, hingga tantangan yang dihadapi di lapangan. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penguatan strategi dan kebijakan yang relevan, tidak hanya untuk Kalurahan Guwosari, tetapi juga bagi desa-desa lain yang memiliki potensi dan permasalahan serupa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rangkaian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah bagaimana Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul ?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini melihat pemerintah dalam pengembangan UMKM dari :

1. Strategi Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu strategi distributif, strategi regulatif dan strategi konstituen.
2. Program Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Anggaran Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai Pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan UMKM di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan mengkaji ketiga aspek penting: strategi, program, dan anggaran. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah kalurahan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan UMKM, seperti identifikasi sektor potensial dan pemetaan sumber daya yang ada. Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat dalam mengevaluasi sejauh mana program-program yang telah diimplementasikan mampu memberikan dampak positif bagi

UMKM, serta memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Tidak kalah penting, penelitian ini akan menganalisis pengalokasian anggaran dalam pengembangan UMKM, untuk memastikan bahwa dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, tepat sasaran, dan mendukung keberlanjutan usaha mikro dan kecil di wilayah tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah kalurahan untuk menyusun kebijakan yang lebih komprehensif, serta menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

F. Literatur Review

1. Penelitian berjudul “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten” dilakukan oleh Idayu & Suhandi (2021) membahas kisah luar biasa tentang perjuangan masyarakat desa dalam mengangkat perekonomian lokal melalui pengembangan UMKM. Dalam upaya mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan merumuskan strategi pengembangan UMKM yang tepat, penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yang melibatkan proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan UMKM di desa tersebut. Penelitian ini menyarankan penerapan strategi SO (*Growth*) dengan memanfaatkan kekuatan lokal, seperti potensi pertanian dan keberlanjutan lingkungan, untuk mengatasi permasalahan yang ada, seperti keterbatasan permodalan dan pemasaran. Program pemberdayaan ini dapat membantu meningkatkan

kompetitivitas UMKM secara berkelanjutan.. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa setiap pelaku UMKM di Desa Nembol menghadapi beragam tantangan, mulai dari masalah permodalan, produksi, hingga pemasaran. Selain itu, aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi, dan kondisi sosial ekonomi turut menjadi hambatan dalam pengembangan UMKM yang optimal di kawasan tersebut. Meski begitu, penelitian ini menawarkan strategi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Salah satu strategi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah Strategi SO (*Growth*). Dengan memanfaatkan kekuatan internal yang ada, Desa Nembol berpotensi untuk meningkatkan kompetitivitas UMKM di tingkat lokal maupun regional. Sinergi antara potensi pertanian, keberlanjutan lingkungan, dan kolaborasi antara berbagai pihak diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan bagi UMKM di Desa Nembol.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ermawati & Pujiyanto (2021) yang berjudul “Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis PKK di Desa Wisata Sekapuk Kabupaten Gresik” mengungkapkan bagaimana pemerintah desa berperan aktif dalam pemberdayaan UMKM melalui program PKK yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Program ini berhasil menciptakan sinergi yang kuat dan menghasilkan peningkatan signifikan bagi UMKM di desa wisata Sekapuk. Sistem bagi hasil yang diterapkan sebagai bagian dari program pemberdayaan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan UMKM. tergambar dengan jelas bahwa pemberdayaan UMKM di kawasan tersebut bersumber dari kemandirian pengelolaan PKK. Sinergi luar biasa antara PKK dan

pemerintah desa menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pemberdayaan yang mantap. Hal ini tidak hanya membuat desa wisata Sekapuk dikenal sebagai “desa milyarder” namun juga menunjukkan bahwa kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi yang solid antara instansi terkait. Dalam upaya menciptakan pola/model pemberdayaan UMKM yang tepat, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui metode ini, peneliti berhasil menggali informasi mendalam yang diperlukan untuk menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menegaskan bahwa peran pemerintah desa tidak sekadar sebagai pemangku kebijakan, namun juga sebagai fasilitator yang memberikan stimulasi bagi keberlangsungan UMKM di bawah naungan PKK. Salah satu sorotan menarik dalam penelitian ini adalah penerapan sistem bagi hasil sebagai strategi efektif untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan memadukan konsep ini dengan pengelolaan kawasan wisata, desa wisata Sekapuk berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM lokal. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen tinggi yang ditanamkan oleh pemerintah desa serta dukungan aktif dari masyarakat setempat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yulietta & Sianturi (2023) yang berjudul “Strategi Pengembangan UMKM *Home Industry* melalui Pendekatan Analisis SWOT di Kelurahan Nginden Jangkungan” membahas strategi pengembangan UMKM di sektor industri rumahan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Penelitian ini menawarkan berbagai strategi yang dapat diterapkan oleh pelaku UMKM, seperti inovasi kemasan produk, pemasaran digital, dan kerjasama dengan mitra. Strategi-strategi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan kekuatan internal dan

memanfaatkan peluang yang ada di pasar, serta mengatasi kelemahan yang dimiliki oleh UMKM. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi strategi yang tepat guna memajukan UMKM *Home Industry* di Kelurahan Nginden Jangkungan. Metode kualitatif menjadi landasan dalam pengumpulan data primer melalui wawancara dan survei. Data-data tersebut kemudian dianalisis untuk membentuk matriks SWOT yang menjadi dasar strategis, dengan dukungan data sekunder dari literatur jurnal terkait. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa UMKM *Home Industry* di wilayah tersebut terletak di Kuadran 1 dalam matriks IFAS dan EFAS. Fakta ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki kekuatan dan peluang yang dapat dioptimalkan. Matriks SWOT memberikan gambaran yang jelas, dengan strategi SO seperti inovasi dalam kemasan produk menjadi langkah strategis yang diusulkan. Tidak hanya itu, strategi ST juga disorot dalam studi ini, di antaranya adalah meningkatkan pemahaman tentang pemasaran digital. Sementara strategi WO mencakup pembukaan *platform* media *online* untuk pemasaran produk dan pelatihan terkait branding. Tidak ketinggalan, strategi WT yang mengusulkan perluasan produk dan kerjasama dengan mitra adalah langkah yang dianggap efektif untuk meningkatkan penjualan. Pengembangan UMKM *Home Industry* bukan semata tentang produksi atau penjualan, namun juga melibatkan strategi yang matang. Analisis SWOT menjadi alat yang *powerful* dalam merumuskan langkah- langkah yang dapat meningkatkan daya saing dan keberlangsungan bisnis UMKM. Dengan adanya penekanan pada inovasi, pemasaran digital, dan kerjasama, para pelaku UMKM dapat memperluas pasar dan tetap relevan dalam era bisnis yang kompetitif.

4. Penelitian oleh Hartanti (2021) dengan judul “Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pengembangan UMKM” penelitian yang dilakukan di Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta menyoroti bagaimana pemerintah kelurahan melakukan pemberdayaan, penguatan, dan perlindungan terhadap UMKM lokal. Pemerintah memberikan pelatihan, akses modal, serta perlindungan dalam menghadapi persaingan usaha yang tidak sehat. Program-program ini menunjukkan bahwa dengan adanya strategi yang holistik dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, UMKM dapat berkembang dengan lebih baik. bertujuan untuk mengeksplorasi peran pemerintah kelurahan dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sambil mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor ini. Melalui pendekatan studi kasus dan penelitian kualitatif deskriptif, peneliti memeriksa secara komprehensif praktik pemerintah kelurahan dalam ranah ini serta interaksi dengan pengusaha lokal. Ditemukan dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa peran utama pemerintah kelurahan dalam membantu perkembangan UMKM terbagi menjadi tiga aspek pokok, yaitu pemberdayaan (*enabling*), penguatan (*empowering*), dan perlindungan (*protecting*). Strategi pemberdayaan dilakukan melalui inisiatif seperti penyaluran dana dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), program Mangku Lawren, bantuan infrastruktur, serta upaya promosi dan kemitraan usaha digital. Namun, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan dukungan kelembagaan sebagai langkah penting dalam mendukung kesuksesan UMKM di wilayah tersebut. Selanjutnya, aspek penguatan fokus pada pengembangan potensi usaha dengan memberikan pelatihan dan pembinaan terkait produksi,

pemasaran, SDM, hingga aspek teknologi dan desain. Sementara itu, aspek perlindungan melibatkan tindakan proaktif dalam mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Faktor keberhasilan dalam pengembangan UMKM diantaranya semangat kewirausahaan yang tinggi di komunitas, bantuan modal dan peralatan, serta kebijakan pemerintah yang suportif. Terdapat pula faktor penghambat yang perlu diatasi, seperti masalah modal yang terbatas dan tantangan dalam hal pemasaran produk UMKM. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat secara keseluruhan amat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM di Kelurahan Mangkubumen.

5. Penelitian yang berjudul “Strategi Pengembangan UMKM Makanan dan Minuman di Kelurahan Tamansari Kota Bandung,” oleh Kholik & Rahmi (2023) Penelitian ini mengungkapkan beberapa strategi pengembangan UMKM, seperti inovasi produk dan peningkatan pemahaman pemasaran *digital*, yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing di pasar lokal dan global. Strategi ini sangat relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM yang menghadapi tantangan di pasar yang semakin kompetitif. mengambil fokus pada perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada sektor makanan dan minuman di kelurahan tersebut. UMKM menjadi komponen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, namun dihadapkan pada tantangan seperti permodalan, pemasaran, legalitas usaha, dan sumber daya manusia yang belum optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis SWOT untuk mengevaluasi strategi pengembangan UMKM di sektor makanan dan minuman di wilayah tersebut. Temuan penelitian

menunjukkan empat alternatif strategi yang bisa diterapkan, yaitu strategi SO (*strengths and opportunities*), strategi ST (*strengths and threats*), strategi WO (*Weakness and opportunity*), dan strategi WT (*Weakness and threats*), sebagai kerangka strategi untuk memperkuat daya saing UMKM. Dengan melibatkan 91 responden dari UMKM dan 52 konsumen, penelitian ini memberikan landasan strategis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi pelaku ekonomi lokal. Implementasi strategi yang ditemukan diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM sektor makanan dan minuman, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah, serta memperkuat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. Dengan demikian, pengembangan UMKM di Kelurahan Tamansari Kota Bandung dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menghadapi dinamika ekonomi lokal dan global.

6. Penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan UMKM Lontong Lepet: Studi di Desa Ngumpul Kabupaten Jombang” dilakukan oleh Arifin & Winanda (2024) menyoroti bagaimana pemerintah desa, melalui kebijakan strategis dan dukungan program, membantu mengembangkan UMKM khususnya pada sektor makanan lokal. Pemerintah desa memberikan bantuan seperti pelatihan, peralatan produksi, dan akses permodalan yang membantu para pelaku UMKM untuk berkembang. Kebijakan pemberdayaan UMKM yang diterapkan di Desa Ngumpul berfokus pada peningkatan keterampilan dan akses pasar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model

interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mendalami peran pemerintah desa dalam upaya pengembangan UMKM lontong lepet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ngumpul memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan UMKM lontong lepet. Dengan menyusun regulasi terkait pengembangan UMKM di tingkat desa, memberikan fasilitas seperti pelatihan, bantuan peralatan produksi, akses pembiayaan, serta dukungan dalam promosi dan pemasaran, pemerintah desa menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para pelaku UMKM lontong lepet. Penelitian ini tidak hanya menjadi refleksi tentang peran pemerintah desa dalam pengembangan UMKM, tetapi juga menjadi titik awal bagi peningkatan kinerja UMKM lontong lepet dan serta pendorong perubahan yang positif dalam ekonomi lokal di Desa Ngumpul dan sekitarnya.

7. Penelitian Prastiwi & Wiyaka (2023) yang berjudul “Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Program Lapak Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2022” menyoroti bagaimana pemerintah desa, melalui kebijakan strategis dan dukungan program, membantu mengembangkan UMKM khususnya pada sektor makanan lokal. Pemerintah desa memberikan bantuan seperti pelatihan, peralatan produksi, dan akses permodalan yang membantu para pelaku UMKM untuk berkembang. Kebijakan pemberdayaan UMKM yang diterapkan di Desa Ngumpul berfokus pada peningkatan keterampilan dan akses pasar. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini melibatkan informan seperti Lurah Kejuron selaku perwakilan pemerintah Kota Madiun, pengelola lapak, dan para pedagang lapak. Data

dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta diuji keabsahannya melalui triangulasi dari berbagai sumber untuk memastikan kesahihan data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengembangan usaha oleh pemerintah Kota Madiun telah mencapai kesuksesan yang signifikan, terbukti dari peningkatan omset dan prospek positif hasil penjualan yang diraih oleh para pedagang lapak. Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa kendala yang perlu menjadi fokus ke depan untuk memperoleh keberhasilan yang lebih optimal dalam pengembangan UMKM, terutama dalam program lapak di Kelurahan Kejuron dan seluruh Kota Madiun. Keberhasilan pengembangan UMKM dalam program lapak ini menjadi cermin dari komitmen pemerintah Kota Madiun dalam memberdayakan sektor UMKM sebagai lokomotif perekonomian daerah. Dengan kerja sama yang sinergis antara pemerintah, pengelola lapak, dan para pedagang, UMKM di Kelurahan Kejuron dan seluruh Kota Madiun dapat terus berkembang, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan berkontribusi dalam memajukan perekonomian lokal.

8. Penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi COVID-19 di Cipageran, Cimahi” dilakukan oleh Tumija (2022). mengkaji peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam mendukung keberlanjutan UMKM selama pandemi. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengikuti program yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Cimahi menunjukkan betapa pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi

krisis ekonomi. Pemerintah melalui berbagai program dukungan seperti pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana UMKM terbukti dapat membantu sektor UMKM bertahan dan berkembang. Kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat dapat menjadi fondasi kokoh dalam membangkitkan semangat UMKM. Dengan menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR), kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kajian ini mendalami peran pemerintah Kota Cimahi dan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mendukung usaha UMKM. Hasil penelitian menyatakan bahwa peran pemerintah dalam memfasilitasi UMKM telah terlihat melalui berbagai upaya, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana seperti Gedung *Technopark* sebagai tempat pelatihan, pelatihan *digital marketing*, hingga pengembangan produk dan SDM. Tak hanya itu, partisipasi masyarakat, terutama para pelaku UMKM, juga sangat aktif dalam mengikuti rapat dan kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas terkait, serta memanfaatkan hasil-hasil program yang telah dijalankan. Hal ini menjadi cerminan dari kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Cimahi telah menjalankan tiga peran utama sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam menyokong UMKM.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Hadjerah (2022) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Watang Soreang, Kota Parepare” membahas tentang program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan UMKM. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian

akses terhadap sumber permodalan, pelatihan, dan sarana pendukung lainnya dari pemerintah setempat sangat membantu dalam mengembangkan potensi UMKM. Meskipun ada beberapa kendala seperti keterbatasan modal dan SDM, program pelatihan dan pendampingan yang terus dilakukan menjadi faktor pendukung utama yang mengoptimalkan pengembangan UMKM. Sejak berdiri dua dekade lalu, UMKM di kelurahan ini telah menjadi semangat utama dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat, baik yang sudah berdiri maupun yang baru memulai langkah bisnisnya sejak 2018. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini menggali data dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Melalui teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian menghasilkan temuan yang berharga untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di kelurahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini tidak hanya sebatas mengamati perkembangan UMKM di Kelurahan Watang Soreang, tetapi juga untuk menyoroti pemberdayaan yang dilakukan terhadap para pelaku UMKM. Selain itu, identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengembangan UMKM di Kelurahan Watang Soreang dilakukan melalui pemberian akses terhadap sumber permodalan, pembinaan, pelatihan, serta penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah setempat. Selain itu, pemberdayaan yang dilakukan terhadap para pengusaha UMKM melibatkan *stakeholders* dalam menentukan keberhasilan pemberdayaan

tersebut, yang terdiri dari UMKM, kelompok/koperasi, *Business Development Service* (BDS), dan Asosiasi Usaha. Faktor-faktor penghambat dalam pengembangan UMKM mencakup faktor internal seperti keterbatasan permodalan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan lemahnya jaringan usaha, serta faktor eksternal seperti iklim usaha dan terbatasnya sarana. Namun, terdapat faktor pendukung yang mampu mengoptimalkan pengembangan UMKM, mulai dari pemanfaatan teknologi, kemudahan pinjaman modal usaha, pendampingan UMKM, hingga pelatihan yang terus diberikan.

10. Studi penelitian oleh Nawawi et al. (2023) yang berjudul “Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Tlogomas Kota Malang” menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyoroti pentingnya strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola UMKM. Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengembangan UMKM adalah ketidaksesuaian waktu pelatihan dan ketatnya persaingan usaha. Oleh karena itu, strategi penguatan SDM menjadi kunci utama, melalui kolaborasi antara dinas koperasi dan UMKM serta pemberian dana dan insentif yang mendukung pengusaha UMKM dalam mengembangkan kualitas manajerial dan operasional mereka. Berbagai faktor penghambat ditemukan dalam penelitian, mulai dari ketidaksesuaian waktu pelatihan SDM hingga persaingan UMKM yang semakin ketat. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung yang signifikan, seperti komunikasi yang efektif antara dinas koperasi dan UMKM Kota Malang dengan para pelaku UMKM di

Kelurahan Tlogomas, serta bantuan dana dan insentif dari pemerintah daerah yang memberikan dorongan positif bagi para pelaku UMKM. Model terkini dalam strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola UMKM menekankan peran strategis pemerintah daerah dan sumber daya manusia sebagai penggerak utama dalam mengelola manajemen operasional UMKM. Dengan demikian, kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM menjadi kunci utama dalam memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini benar-benar terwujud. Penelitian ini menjadi landasan penting dalam membangun ekosistem UMKM yang berdaya saing tinggi, inklusif, dan berkelanjutan di Kelurahan Tlogomas Kota Malang.

Dari beberapa kajian *literatur review* yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mendasar yang dapat disimpulkan. Secara umum pemerintah dalam pengembangan UMKM banyak dikaji melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada strategi dan program pemberdayaan. Meskipun sebagian besar penelitian membahas strategi dan program secara cukup mendalam, hanya sedikit yang secara eksplisit menyoroti aspek pengelolaan anggaran. Perbedaan yang mendasar yaitu dalam konteks wilayah penelitian. Penelitian ini berfokus pada pengembangan UMKM secara keseluruhan di wilayah Kelurahan Guwosari, sedangkan penelitian sebelumnya objek penelitiannya lebih spesifik. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan tiga strategi yaitu strategi distributif, regulatif dan konstituen.

G. Kerangka Konseptual

1. *Governing* :

Konsep *governing*, yaitu tindakan pemerintah dalam mengatur dan mengurus rakyatnya. *Governing* melibatkan proses politik, hukum, dan administrasi untuk mencapai fungsi ekstraksi, distribusi, proteksi, dan koersi. Dalam konteks ini, pemerintahan kalurahan, yang merupakan milik rakyat dalam ranah politik dan demokrasi, harus bertujuan untuk memuliakan masyarakat melalui proteksi, distribusi nilai-nilai ekonomis, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Konsep *governing* dijelaskan sebagai sebuah konsep besar yang berkaitan dengan mengatur dan mengurus pemerintahan, serta adanya otoritas yang mengatur dan menjalankan kebijakan. Konsep ini berbeda dengan *ruling* yang hanya berkaitan dengan kekuasaan tanpa fungsi pemerintahan yang sebenarnya. Melalui konsep *ordering*, pemerintah bertugas menata dan menciptakan, sedangkan dengan konsep *steering*, pemerintah mengarahkan dan mengemudi kebijakan yang dijalankan (Yunanto, 2020).

Governing atau tindakan mengatur dan mengurus sesuai dengan konsep *ruling* (menguasai) membawa dampak yang signifikan terhadap kemajuan masyarakat. Prosesnya meliputi langkah-langkah penyadaran masyarakat yang bersifat partisipatif, berkelanjutan, dan transformatif untuk meningkatkan kemampuan (*capacity building*). Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik. Fungsi *governing* mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah

atau pihak berwenang dalam melaksanakan peran aktif. Hal ini termasuk dalam membina, memberikan fasilitas, serta meningkatkan *soft skill* dan *hard skill* masyarakat agar dapat keluar dari lingkaran masalah yang mereka hadapi. Keberhasilan *governing* dapat diukur berdasarkan evaluasi proses dan fungsi yang dilakukan, yang menjadi indikator utama kesuksesan implementasi konsep tersebut. Sesuai dengan prinsip Undang-Undang Desa, pemerintahan desa memiliki kewenangan yang penting dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri, yang sejalan dengan peran dan tugas pemerintah kalurahan. *Governing* atau perbuatan pemerintah terdiri dari :

a. Strategi

Menurut Sholikhah (2021), strategi merupakan sebuah rencana yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi, berhubungan dengan keuntungan strategis dari lingkungan, dan didesain untuk memastikan pencapaian tujuan dasar perusahaan melalui pelaksanaan yang tepat.

1. Tingkat-tingkat strategi

Tingkat strategi dalam bisnis dapat menjadi pusaka berharga dalam mengarungi lautan ketidakpastian perubahan zaman. Menurut pandangan Schendel dan Charles (2021), ada empat tingkatan strategi yang membentuk landasan kokoh bagi perjalanan setiap entitas bisnis. Tingkatan strategi ini dijuluki sebagai *Master Strategy*, yang terdiri dari: *enterprise strategy*, *corporate strategy*, *business strategy*, dan *functional strategy*.

a) *Enterprise strategy*

Strategi ini menggambarkan hubungan yang terjalin antara

sebuah organisasi dengan masyarakat luas. Setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh organisasi akan memberikan dampak pada masyarakat di sekitarnya. Keterlibatan dengan pemerintah, kelompok penekan, kelompok politik, serta segala lapisan masyarakat lainnya menjadi bagian integral dari strategi *enterprise*. Sebuah organisasi diperlihatkan oleh strategi yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

b) *Corporate strategy*

Strategi ini dikenal sebagai *grand strategy*, strategi korporat membahas misi inti dari suatu organisasi dengan meliputi semua bidang yang ditekuni. Pertanyaan mendasar seperti “Apakah yang menjadi bisnis utama?” atau “Bagaimana mengelola bisnis?” perlu dijawab dengan tepat. Kesalahan dalam merumuskan misi maka dapat berakibat fatal. Misi sebuah universitas, yayasan, pemerintahan, atau organisasi nirlaba lainnya harus diarahkan pada kebaikan bersama dan keberlanjutan yang berkelanjutan.

c) *Business strategy*

Di tingkat ini, strategi bisnis digariskan untuk merebut pasar dan hati para pemangku kepentingan. Bagaimana organisasi dilihat dan diakui oleh publik menjadi fokus utama. Segala langkah yang diambil bertujuan untuk memperoleh keuntungan strategis serta mendukung perkembangan

organisasi ke tingkat yang lebih tinggi.

d) *functional strategy*

Strategi ini merupakan strategi penunjang yang memastikan kesuksesan strategi lainnya. Terbagi menjadi tiga jenis: strategi fungsional ekonomi, strategi fungsional manajemen, dan strategi isu strategis. Setiap jenis strategi fungsional memiliki peran khusus dalam memastikan kelangsungan hidup dan kesuksesan organisasi.

Tingkat-tingkat strategi tersebut dapat menjadi seni kompleks dalam mengelola dan memajukan sebuah organisasi. Sudut pandang ekonomi, manajerial, dan kontrol lingkungan menjadi fokus penting dalam menjalankan setiap strategi. Keseimbangan antara keempat tingkatan strategi menjadi kunci keberhasilan setiap pengambil keputusan tertinggi dalam mengarahkan langkah organisasi ke arah yang lebih baik.

2. Jenis-jenis strategi

Menurut Dye (2022) dalam penelitian yang dilakukan Amnesti et al. (2024), dalam pengembangan UMKM ada beberapa jenis-jenis strategi pemerintah yang efektif untuk diimplementasikan yaitu sebagai berikut :

1. Strategi Distributif

Pemerintah memberikan pelatihan atau pendampingan.

2. Strategi Regulatif

Pemerintah kalurahan membuat peraturan yang memudahkan

UMKM dalam beroperasi, seperti perizinan atau penataan tata ruang yang mendukung pengembangan UMKM.

3. Strategi Konstituen

Pemerintah kalurahan melibatkan UMKM dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pengembangan UMKM.

Semua jenis-jenis strategi sesuai untuk pengembangan UMKM karena ketiga strategi tersebut berkaitan dengan strategi yang dijalankan oleh pemerintah kalurahan untuk memfasilitasi UMKM. Untuk pengembangan usaha mereka tentunya tidak terlepas dari peraturan yang mengatur dan pemerintah kalurahan selalu melibatkan UMKM dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pengembangan UMKM.

b. Program

Program merupakan sebuah konsep yang mengacu pada serangkaian kegiatan atau langkah yang direncanakan secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Sari & Putra, 2021). Dalam arti luas, program dapat diartikan sebagai mekanisme atau alat yang digunakan oleh organisasi untuk mewujudkan visi dan misinya melalui implementasi berbagai aktivitas yang berkesinambungan dan berorientasi hasil. Program tidak hanya sekadar rencana kegiatan, melainkan juga sebuah proses pengorganisasian sumber daya dan intervensi yang dirancang untuk memberikan solusi atas masalah tertentu yang dihadapi masyarakat

atau organisasi. Oleh karena itu, keberadaan program sangat krusial dalam konteks pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia, karena melalui program, perencanaan strategis dapat diwujudkan dalam bentuk aksi nyata yang dapat diukur keberhasilannya (Rahmawati, 2020).

1. Komponen Utama dalam Program

Setiap program memiliki komponen-komponen dasar yang harus ada agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat sesuai dengan yang diharapkan. Pertama, tujuan program harus diformulasikan secara spesifik dan jelas agar menjadi pedoman dalam merancang seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, sasaran program perlu ditentukan secara tepat, baik dari segi jumlah, karakteristik, maupun kebutuhan penerima manfaat, sehingga program dapat menjawab permasalahan yang ada secara efektif. Kegiatan dalam program juga harus direncanakan secara detail dengan memperhatikan urutan, waktu, dan metode pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Sumber daya yang mencakup dana, tenaga kerja, serta fasilitas pendukung menjadi faktor penting yang harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi pemborosan dan hambatan selama pelaksanaan program berlangsung. Evaluasi sebagai komponen terakhir berfungsi untuk menentukan langkah perbaikan bila diperlukan, sehingga program dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan yang dinamis (Putri et al., 2022).

2. Perencanaan dan Pelaksanaan Program

Perencanaan program merupakan tahap yang sangat fundamental dalam siklus pengelolaan program karena menentukan arah, strategi, dan cara pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan (Fadhil & Rahman, 2020). Dalam proses perencanaan, analisis kebutuhan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program yang akan dijalankan benar-benar relevan dan sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat atau organisasi. Keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholders dalam tahap perencanaan juga menjadi aspek penting yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan program karena mereka dapat memberikan perspektif dan sumber daya tambahan yang dibutuhkan. Selama pelaksanaan, manajemen program harus mengedepankan koordinasi antar tim, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan sumber daya, serta fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian ketika menghadapi kendala yang tak terduga di lapangan. Tanpa perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terorganisir, program berpotensi gagal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan karena adanya ketidaksesuaian antara rancangan dan realisasi di lapangan (Prasetyo, 2021).

3. Evaluasi dan Pengukuran Keberhasilan Program

Evaluasi program adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari pelaksanaan program terhadap tujuan yang telah ditentukan sejak awal.

Evaluasi ini tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses pelaksanaan dan penggunaan sumber daya yang terjadi selama program berjalan. Dalam konteks evaluasi, terdapat dua jenis utama yakni evaluasi formatif yang dilakukan selama pelaksanaan program untuk memberikan umpan balik perbaikan, dan evaluasi sumatif yang dilakukan setelah program selesai guna menilai keberhasilan secara keseluruhan (Wijaya & Susilo, 2021). Pengukuran keberhasilan program juga harus didasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga hasil evaluasi dapat memberikan gambaran objektif tentang pencapaian tujuan. Melalui evaluasi, pengelola program dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi, yang nantinya menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi dan strategi perbaikan untuk program-program berikutnya.

c. Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana keuangan yang disusun secara terperinci dan sistematis untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran dalam periode waktu tertentu dengan tujuan agar organisasi atau institusi dapat menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien. Konsep anggaran tidak hanya sebatas dokumen administrasi biasa, melainkan menjadi alat strategis yang sangat penting dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi keuangan organisasi, baik itu di sektor publik maupun swasta. Anggaran berfungsi sebagai pedoman operasional yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan

keuangan yang tepat, terutama dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk berbagai kebutuhan yang bersaing (Hidayat, 2021). Selain itu, anggaran juga mencerminkan visi dan prioritas organisasi karena melalui anggaran dapat diukur sejauh mana program atau kegiatan yang direncanakan dapat diwujudkan secara nyata. Dalam konteks pemerintahan, anggaran merupakan alat utama yang mengikat seluruh elemen birokrasi untuk melaksanakan program pembangunan secara terkoordinasi dan akuntabel, sehingga transparansi dan pertanggungjawaban publik dapat terjaga. Anggaran juga menjadi instrumen pengendalian sosial, di mana masyarakat dapat memantau penggunaan dana publik dan memberikan masukan untuk perbaikan tata kelola keuangan negara. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang baik sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjangnya secara berkelanjutan (Wijaya, 2022)

1. Fungsi dan tujuan anggaran

Anggaran memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam menjalankan organisasi secara profesional dan sistematis. Fungsi perencanaan anggaran memungkinkan organisasi untuk menetapkan target keuangan dan merancang strategi alokasi sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Dengan adanya anggaran, setiap unit kerja dapat mengetahui besaran dana yang tersedia untuk menjalankan aktivitasnya sehingga proses pengelolaan keuangan menjadi lebih terarah dan terkontrol. Fungsi pengendalian anggaran juga sangat vital, di mana anggaran

berperan sebagai alat *monitoring* yang membantu manajemen mengawasi realisasi penggunaan dana agar tetap sesuai dengan rencana yang sudah disusun, sehingga penyimpangan dapat diidentifikasi dan diperbaiki secara cepat (Yuliani, 2021). Selain itu, anggaran juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja yang mengukur sejauh mana tujuan dan target organisasi tercapai dengan menggunakan dana yang telah dialokasikan. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa anggaran tidak hanya mempermudah pengelolaan sumber daya, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi terhadap para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pemerintah (Rahayu, 2023).

2. Proses penyusunan anggaran

Penyusunan anggaran merupakan tahap yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus agar dokumen anggaran yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kebutuhan dan prioritas organisasi secara realistis dan terukur. Proses ini dimulai dengan identifikasi dan analisis kebutuhan berdasarkan program dan kegiatan yang telah direncanakan, lalu diikuti dengan estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut (Firmansyah & Lestari, 2021). Selanjutnya, hasil estimasi biaya dikonsolidasikan menjadi rancangan anggaran yang kemudian dibahas secara internal untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan tidak melebihi kemampuan organisasi dan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Berbagai metode

penyusunan anggaran digunakan sesuai dengan karakteristik organisasi, mulai dari metode *incremental budgeting* yang menyesuaikan anggaran tahun sebelumnya, *zero-based budgeting* yang mengkaji ulang seluruh kebutuhan anggaran dari awal, hingga *performance-based budgeting* yang mengaitkan alokasi dana dengan pencapaian indikator kinerja. Dalam proses penyusunan anggaran, peran koordinasi antar unit kerja sangat krusial untuk menyelaraskan prioritas dan menghindari tumpang tindih penggunaan dana, sehingga anggaran yang disusun dapat optimal dan akuntabel. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses ini, penyusunan anggaran menjadi lebih transparan dan akurat serta mampu menghadapi dinamika kebutuhan organisasi yang terus berkembang (Nugroho, 2020).

3. Pengendalian dan Evaluasi Anggaran

Pengendalian anggaran merupakan proses penting yang bertujuan memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Tahapan pengendalian dilakukan dengan melakukan *monitoring* secara rutin terhadap realisasi pendapatan dan pengeluaran, serta membandingkannya dengan angka anggaran sebagai standar referensi (Wahyudi & Hasanah, 2020). Jika terdapat perbedaan atau deviasi antara realisasi dan anggaran, organisasi harus segera melakukan analisis penyebabnya dan mengambil langkah korektif agar penyimpangan tersebut tidak berlanjut dan berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Selain itu, evaluasi anggaran yang

komprehensif juga perlu dilakukan secara periodik untuk menilai efektivitas penggunaan dana serta dampak nyata yang dihasilkan dari program atau kegiatan yang dibiayai. Evaluasi ini menjadi bahan penting bagi pengambilan keputusan dalam perencanaan anggaran berikutnya serta perbaikan proses pengelolaan keuangan agar semakin efisien dan transparan (Sutrisno, 2022).

2. Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan negara dalam rangka mengatur, mengelola, dan mengawasi berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah tertentu. Dalam pengertian ini, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pemegang mandat publik yang bertugas memastikan terwujudnya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Pemerintah adalah entitas formal yang mengelola dinamika sosial dan politik melalui struktur organisasi yang sistematis serta memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini mengandung makna bahwa pemerintah harus mampu menyelaraskan berbagai kepentingan masyarakat agar tercapai tujuan bersama yang berlandaskan pada norma hukum dan nilai-nilai demokrasi (Wirawan, 2021).

Pemerintah adalah fasilitator utama dalam proses pembangunan nasional yang berkelanjutan, dimana peranannya sangat strategis dalam merumuskan kebijakan dan mengimplementasikannya secara tepat waktu. Pemerintah sebagai representasi negara memiliki kewajiban untuk

mengakomodasi kebutuhan rakyat serta menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang dibuat, sehingga legitimasi pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan dan responsifitas terhadap kebutuhan warga negara. Dengan demikian, pengertian pemerintah tidak hanya sebatas lembaga birokrasi semata, tetapi sebagai wadah interaksi sosial dan politik yang vital dalam kehidupan bernegara (Sari dan Nugroho, 2020)

a. Fungsi Pemerintah

Fungsi utama pemerintah dalam konteks penyelenggaraan negara dapat dikategorikan ke dalam tiga fungsi pokok yang saling berkaitan dan saling melengkapi, yaitu fungsi melindungi, menyelamatkan, dan memberdayakan masyarakat. Berikut adalah fungsi-fungsi pemerintah tersebut :

1) Melindungi

Fungsi melindungi merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar wilayah negara. Perlindungan yang dimaksud tidak hanya bersifat fisik, seperti keamanan dari tindak kejahatan dan konflik sosial, tetapi juga perlindungan hukum yang menjamin hak-hak warga negara terpenuhi secara adil. Dalam kajian oleh Rizal (2022), perlindungan yang dilakukan pemerintah mencakup aspek preventif dan represif, dimana upaya pencegahan dilakukan dengan menciptakan sistem keamanan yang kokoh, sedangkan tindakan represif diambil ketika terjadi pelanggaran hukum yang

merugikan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah berperan sebagai pelindung yang memegang kendali dalam menciptakan stabilitas sosial yang menjadi fondasi bagi pembangunan nasional.

2) Menyelamatkan

Fungsi menyelamatkan lebih menekankan pada peran pemerintah dalam menghadapi situasi darurat, bencana alam, atau krisis sosial yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat. Pemerintah dituntut untuk memiliki sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi dan responsif agar dapat melakukan evakuasi, penyelamatan, dan rehabilitasi secara efektif. Penelitian oleh Lestari dan Hidayat (2023) menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mengelola manajemen risiko bencana serta bagaimana kebijakan mitigasi dapat meminimalisir dampak bencana yang muncul. Dengan demikian, fungsi menyelamatkan tidak hanya sebatas tindakan darurat, tetapi juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

3) Memberdayakan

Fungsi memberdayakan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas masyarakat melalui program-program pembangunan yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Melalui pemberdayaan, pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang secara mandiri dan berperan aktif dalam proses pembangunan nasional. Menurut Fauzi dan Putri (2024),

pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan sosial, dimana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Pemerintah juga diharapkan mampu merancang kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan sehingga tercipta sinergi yang positif antara pemerintah dan rakyat.

b. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih luas, meliputi peran sebagai regulator, fasilitator, dan pelayan publik. Sebagai regulator, pemerintah bertugas membuat kebijakan, aturan, dan regulasi yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik. Kebijakan yang efektif akan menjamin terciptanya kepastian hukum dan keadilan sosial yang menjadi pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan masyarakat dan sektor swasta, termasuk dalam bidang infrastruktur, teknologi, dan komunikasi. Fungsi ini memungkinkan berbagai pihak dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional. Dalam perannya sebagai pelayan publik, pemerintah wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, merata, dan mudah diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Pelayanan publik yang baik adalah cerminan dari kualitas pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel (Indrawati, 2022).

3. Pemerintah Kalurahan

Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 52 tahun 2023 pada pasal 1 ayat 33 dijelaskan bahwa pemerintah kalurahan adalah lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.

Menurut penelitian Giawa & Rukoyah (2024), pemerintah kalurahan memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan didasarkan pada kewenangan berskala lokal. Pemerintah kalurahan memiliki keistimewaan dalam mengembangkan objek kebudayaan melalui pendayagunaan dengan tujuan kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan aspek lainnya. Tujuannya adalah untuk melaksanakan pengelolaan kebudayaan dengan cara mendorong, menumbuhkan, membina, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan peran mereka dalam upaya menjaga keberlangsungan kebudayaan.

Pemerintah kalurahan dalam konteks ini, menunjukkan bahwa pemerintah tidak campur tangan secara langsung dalam urusan kalurahan dari atas, namun lebih pada dukungan dan fasilitasi terhadap pemerintah setempat. Prinsip ini membawa arti bahwa pemerintah kalurahan memiliki kepercayaan dan kewenangan untuk mendorong inisiatif dan tindakan desa dengan lebih mandiri. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 secara tegas mengakui prakarsa dan potensi lokal desa, serta mendorong desa untuk menjadi mandiri, kuat, dan demokratis.

Dalam penelitian Hadi et al. (2022), peran pemerintah kalurahan dalam mengembangkan potensi dan kekayaan lokal menjadi fokus utama.

Hal ini menekankan pentingnya pemerintah desa untuk tidak hanya berfokus pada aspek pemerintahan semata, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa secara komprehensif. Melalui prinsip-prinsip rekognisi dan subsidiaritas yang diatur dalam Undang-Undang Desa, desa diakui oleh negara dalam menjaga keberagaman, keadilan, dan kewenangan lokalnya serta mendukung keberlangsungan kearifan lokal dan budaya adat.

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa mendapatkan landasan yang kuat dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan asas dan kewenangan yang telah diberikan. Peraturan ini juga memberikan perlindungan terhadap sosial-ekonomi desa dari potensi manipulasi politik dan campur tangan yang tidak sesuai. Prinsip subsidiaritas yang ditegaskan dalam Undang-Undang Desa mendorong desa untuk menjalankan kewenangannya secara mandiri dan demokratis tanpa tekanan dari pihak lain.

Pemerintah kalurahan merupakan lembaga yang memiliki kepercayaan, kewenangan, dan tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan secara otonom dan berdasarkan pada prinsip subsidiaritas. Melalui upaya pengembangan potensi dan kekayaan lokal serta upaya menjaga keberlangsungan kebudayaan, pemerintah desa menjadi ujung tombak dalam memajukan dan melindungi kepentingan masyarakat desa secara holistik.

Dalam penelitian Siregar et al. (2023), pemerintah kalurahan mempunyai beberapa tugas utama yaitu :

a. Pemerintahan :

1) Administrasi kependudukan

Administrasi kependudukan menjadi salah satu tugas utama pemerintah kalurahan. Hal ini mencakup pengurusan data penduduk seperti KTP, KK, dan akta kelahiran untuk keperluan administrasi. Administrasi kependudukan yang baik sangat penting dalam memastikan keberhasilan program-program pengembangan masyarakat di tingkat kalurahan.

2) Penataan ruang

Penataan ruang wilayah kalurahan merupakan aspek krusial dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah kalurahan bertanggung jawab untuk membuat dan mengeksekusi rencana tata ruang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penataan ruang yang terencana dengan baik dapat mengurangi konflik terkait penggunaan lahan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan wilayah.

3) Pelayanan umum

Pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah kalurahan mencakup berbagai layanan seperti penerbitan surat keterangan, izin, dan layanan administratif lainnya. Pelayanan umum yang efektif dan efisien adalah kunci dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah setempat.

4) Pembentukan peraturan desa

Pembentukan peraturan desa menjadi wewenang pemerintah kalurahan untuk menyusun regulasi yang berlaku di tingkat desa.

Pentingnya peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

b. Pembangunan :

1) Pembangunan infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya menjadi prioritas dalam tugas pembangunan pemerintah kalurahan. Investasi dalam pembangunan infrastruktur dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas masyarakat terhadap layanan publik.

2) Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi penting yang dilakukan pemerintah kalurahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Program-program pemberdayaan yang partisipatif dan berkelanjutan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi disparitas sosial di tingkat lokal.

c. Kemasyarakatan :

1) Pembinaan masyarakat

Pembinaan masyarakat menjadi bagian integral dari tugas pemerintah kalurahan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat. Pembinaan masyarakat yang holistik dan terarah dapat membantu dalam peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2) Penyelesaian masalah sosial

Pemerintah kalurahan juga memiliki tanggung jawab dalam

membantu menyelesaikan masalah sosial yang muncul di masyarakat. Upaya penanganan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan konflik sosial perlu diimplementasikan secara komprehensif melalui kerja sama lintas sektoral.

d. Pelestarian budaya :

Pelestarian dan pengembangan budaya lokal merupakan bagian dari identitas kalurahan yang perlu dilestarikan. Pelestarian budaya lokal tidak hanya sebagai bentuk warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber daya potensial dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif lokal.

4. Pemerintah dalam pengembangan UMKM

Pemerintah Indonesia memegang peran sentral sebagai motor penggerak pengembangan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dengan jumlah UMKM mencapai sekitar 65 juta unit, sektor ini menyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja nasional, menjadikannya pilar utama dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Pemerintah menyadari keberhasilan UMKM sangat menentukan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam menghadapi guncangan ekonomi seperti pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah mengarahkan berbagai kebijakan dan program untuk memperkuat UMKM agar lebih tangguh, produktif, dan berdaya saing, termasuk melalui payung hukum seperti Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 yang mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM (KSP, 2023; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022)

a. Kebijakan Pembiayaan Pemerintah sebagai Katalisator Pengembangan UMKM

Salah satu hambatan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses pembiayaan formal. Pemerintah merespons hal ini dengan mengembangkan berbagai skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kelas usaha UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mengalami pertumbuhan signifikan dengan realisasi penyaluran mencapai hampir Rp 200 triliun dan menjangkau jutaan pelaku UMKM (DJPb Kemenkeu, 2022; Kemenko Perekonomian, 2022). Selain KUR, pemerintah juga mengembangkan pembiayaan ultra mikro (UMi), Mekaar PNM, dan Bank Wakaf Mikro untuk menjangkau pelaku usaha mikro yang belum tersentuh perbankan. Skema KUR terbaru sejak 2022 bahkan membagi jenis pembiayaan menjadi KUR Super Mikro, Mikro, Kecil, dan Khusus, dengan kemudahan tanpa agunan tambahan untuk kategori mikro, sehingga semakin memudahkan UMKM dalam memperoleh modal usaha (DJPb Kemenkeu, 2022; UTND, 2023). Pemberian subsidi bunga dan penjaminan kredit juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kualitas kredit dan mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

b. Digitalisasi UMKM sebagai Pilar Modernisasi dan Peningkatan Daya Saing

Pemerintah bersama Kadin Indonesia dan Kementerian Koperasi dan UKM secara aktif mendorong transformasi *digital* UMKM sebagai strategi utama untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses

pasar, baik domestik maupun internasional. Target pemerintah adalah mendigitalisasi hingga 30 juta UMKM pada tahun 2024, dengan 24 juta UMKM sudah masuk ekosistem *digital* pada 2023 (Kadin Indonesia, 2024). Program seperti Wikiwirausaha dan pusat layanan usaha terpadu menjadi sarana penting dalam memberikan pelatihan dan pendampingan digitalisasi. Digitalisasi ini memungkinkan UMKM memanfaatkan *platform e-commerce*, pembayaran *digital*, dan pemasaran *online* yang efektif, sehingga mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan global (Indef, 2024).

c. Penguatan Kapasitas SDM dan Pelatihan Kewirausahaan sebagai Fondasi Pengembangan UMKM

Pemerintah menyadari bahwa pengembangan UMKM tidak hanya bergantung pada modal dan teknologi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia pelaku usaha. Oleh karena itu, program pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas manajemen usaha menjadi fokus utama, dengan materi yang mencakup inovasi produk, pemasaran *digital*, manajemen keuangan, dan strategi bisnis (KSP, 2023). Pelatihan ini diselenggarakan melalui berbagai lembaga pemerintah dan mitra, termasuk Kemenkop UKM dan asosiasi usaha, untuk memastikan UMKM mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Upaya ini juga mencakup standarisasi produk dan sertifikasi yang penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses pasar ekspor (Adiastita et al., 2024).

d. Sinergi dan Kolaborasi Multi-Pihak dalam Mendukung Keberlanjutan UMKM

Keberhasilan pengembangan UMKM sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, dan lembaga keuangan. Pemerintah mendorong kolaborasi ini agar program-program pengembangan UMKM dapat diimplementasikan secara optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia (KSP, 2023). Contohnya, kolaborasi dalam program pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran digital yang melibatkan berbagai *stakeholder* mampu memperkuat ekosistem UMKM. Selain itu, pemerintah mewajibkan instansi pemerintah untuk membeli produk dalam negeri, khususnya produk UMKM, sebagai bentuk dukungan pasar yang nyata (KSP, 2023).

Melalui kebijakan yang komprehensif mulai dari fasilitasi pembiayaan, digitalisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang kondusif bagi UMKM untuk tumbuh dan beradaptasi di tengah dinamika pasar global dan tantangan ekonomi, termasuk dampak pandemi. Transformasi *digital* yang didorong pemerintah menjadi kunci utama agar UMKM dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan produktivitas, sementara program pelatihan dan pembinaan mendukung UMKM agar mampu naik kelas dan berdaya saing.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Abdussamad & Sik (2021), metode penelitian kualitatif mengarah pada upaya mendeskripsikan, mengeksplorasi, dan menganalisis fenomena sosial melalui sudut pandang individu maupun kelompok yang terlibat dalam isu-isu sosial. Sementara itu, Sari (2022), mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan yang berbasis pada post-positivisme atau interpretatif, memungkinkan peneliti untuk memahami kondisi alamiah melalui triangulasi data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, keabsahan data menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yang kemudian memungkinkan interpretasi yang mendalam, pemaknaan yang kaya, dan bahkan penemuan hipotesis baru melalui pengamatan individu dan kelompok di lapangan.

Menurut Firmansyah & Masrun (2021), esensi dari metode kualitatif terletak pada proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan yang menggambarkan pandangan dan sikap yang diamati. Pendekatan kualitatif dengan gigih mencoba menggali keunikan-keunikan yang melekat dalam individu, kelompok, masyarakat, ataupun organisasi dalam konteks keseharian mereka. Melalui metode penelitian kualitatif, peneliti dapat meresapi esensi dari realitas sosial yang kompleks dan beragam. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk lebih mendalami makna-makna yang terkandung dalam interaksi sosial, sikap, maupun pandangan yang tersebar dalam masyarakat.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan pemerintah kalurahan dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Jenis penelitian ini mengacu pada pemahaman yang dalam dan mendalam terhadap strategi yang diterapkan oleh pemerintah kalurahan dalam konteks pengembangan UMKM. Menurut Saadah (2022), jenis penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan para peneliti untuk memahami secara komprehensif dinamika dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program-program pemerintah di tingkat kalurahan. Rustamana et al. (2024), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggali secara mendalam dan memahami fenomena sosial, yang juga berlaku dalam konteks pengembangan UMKM. Dengan fokus pada analisis program- program yang ada dan interaksi antara pemerintah kalurahan dengan pelaku UMKM, penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman holistik terhadap upaya pengembangan UMKM dari sudut pandang yang lebih kualitatif dan deskriptif.

2. Unit Analisis

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan dalam penelitian yang dapat memberikan informasi, data, serta fenomena yang sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Informan dalam penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive* yaitu penentuan

informan dengan tujuan yang terstruktur dengan informasi, data, fenomena sosial, serta konten permasalahan yang sedang diteliti. Adapun subjek penelitian berjumlah 10 (sepuluh) orang informan. Berikut ini merupakan data informan yang menjadi subjek penelitian :

Tabel 1.1 Data Informan

No	Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Posisi/Jabatan
1	Nur Hidayad	45 Tahun	S1	Carik
2	Umar Wanto	47 Tahun	S1	Ulu-Ulu
3	H. Muhaimin	41 Tahun	S2	Ketua Bamuskal/BPD
4	Sumaryadi	50 Tahun	SD	Pelaku UMKM
5	Tri	40 Tahun	SMA	Pelaku UMKM
6	Eko Purwati	45 Tahun	SMA	Pelaku UMKM
7	Asngari	48 Tahun	SMK	Pelaku UMKM
8	Erlin	48 Tahun	D3	Pelaku UMKM
9	Susilo	48 Tahun	D3	Masyarakat
10	Eni	43 Tahun	SMA	Masyarakat

(Sumber : Data lapangan peneliti, tahun 2025)

Informan di atas dipilih karena memiliki peran strategis dan pengalaman yang relevan dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari, mulai dari pemerintah kalurahan, ketua lembaga kalurahan hingga pelaku UMKM dan masyarakat umum, sehingga dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian ini.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM. Dalam penelitian ini peneliti melihat dari sisi *governing* pemerintah kalurahan sebagai

aktor penyelenggara yang menjalankan strategi untuk meningkatkan dan menjaga kestabilan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat desa.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, penting bagi peneliti untuk menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat guna memastikan kelancaran dan kualitas penelitian. Menurut penelitian Teguh et al. (2023), terdapat dua faktor utama yang memengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen dan kualitas pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang berkualitas serta bersifat empiris, peneliti memberikan perhatian yang mendalam dalam melakukan analisis terhadap informan dan proses pengumpulan data. Faktor akurasi dan kesesuaian data menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan penelitian ini. Teknik pengumpulan data terdiri dari :

a. **Observasi (*Observation*)**

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam konteks penelitian ini. Menurut Equatora & Awi (2021). Observasi adalah proses pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap situasi atau kegiatan yang sedang berlangsung untuk memahami lebih dalam tentang objek atau aspek penelitian yang menjadi fokus. Dalam studi ini, observasi dilakukan secara interaktif dengan mengamati berbagai kegiatan dan fenomena terkait

pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari. Peneliti terlibat secara langsung dalam pengamatan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Tujuan utama dari observasi ini adalah untuk mengumpulkan data yang akurat dan relevan sesuai dengan pokok penelitian yang telah ditetapkan. Selama proses observasi, peneliti mencatat berbagai informasi penting terkait dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari. Data yang diperoleh dari observasi memberikan pemahaman yang mendalam mengenai strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kalurahan dalam mencapai tujuan pengembangan UMKM dan dampaknya terhadap masyarakat setempat.

b. **Wawancara (*Interview*)**

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang vital dalam penelitian ini. Menurut penelitian Thalib (2022), wawancara adalah proses interaksi antara peneliti dan informan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk keperluan penelitian. Dalam studi ini, wawancara dilakukan dengan berbagai pihak terkait strategi pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari. Informan yang akan diwawancarai meliputi: Lurah Guwosari, Sekretaris (Carik) Guwosari, Kaur Pembangunan atau staf yang menangani UMKM, Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Pelaku UMKM di Kalurahan Guwosari dan Masyarakat Kalurahan Guwosari. Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pemerintah Kalurahan Guwosari dalam mendukung pengembangan UMKM. Peneliti memastikan bahwa setiap informan memberikan pandangan

yang beragam dan relevan terkait isu yang diteliti. Pada tahap wawancara, peneliti juga memperhatikan kerangka wawancara yang telah disusun sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan yang diajukan kepada informan sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat menghasilkan jawaban yang informatif. Proses wawancara dilakukan secara terstruktur dan bersifat dialogis, sehingga interaksi antara peneliti dan informan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam mengungkap pemerintah Kalurahan Guwosari dalam meningkatkan UMKM di wilayah tersebut.

c. **Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan salah satu teknik penting dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini. Menurut penelitian Fadilla & Wulandari (2023), studi dokumen merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara dalam konteks penelitian kualitatif. Dokumen memiliki peran krusial sebagai sumber informasi yang berisi catatan tentang peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Jailani (2023), menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data melalui dokumentasi melibatkan pengumpulan, rangkuman, dan analisis dokumen-dokumen, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun format elektronik. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan beragam dokumen terkait dengan Kalurahan Guwosari, termasuk sejarah kalurahan, dokumentasi UMKM di kalurahan, dokumen terkait dengan pemberdayaan masyarakat setempat, peraturan kelembagaan terkait, serta gambar-gambar atau master plan pembangunan, foto, dan peta kalurahan. Data yang diperoleh melalui dokumen tersebut akan memberikan pemahaman

yang mendalam mengenai konteks historis, kebijakan, aktivitas ekonomi, dan pembangunan wilayah Kalurahan Guwosari. Dokumentasi menjadi landasan penting dalam mengevaluasi strategi pemerintah kalurahan dalam mendukung UMKM serta dapat memberikan perspektif yang komprehensif dalam penelitian ini. Upaya memadukan informasi dari berbagai sumber, termasuk dokumen-dokumen historis dan kebijakan terkait, akan memperkaya analisis mengenai strategi pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari.

4. Teknik Analisis Data

Dalam kegiatan analisis data, peneliti tidak hanya sekadar mengolah angka dan fakta, tetapi juga mencari pola dan makna di baliknya. Menurut Sugiyono (2021), dalam pengutipan terbarunya, proses ini memerlukan ketelitian dan kesabaran agar data yang dihasilkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam. Pentingnya pendekatan interaktif dan berkelanjutan dalam menganalisis data kualitatif karena dengan pendekatan ini, peneliti dapat memastikan bahwa setiap aspek data dieksplorasi dengan cermat, sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki kedalaman yang sempurna. Dari hasil analisis yang mendalam, informasi bernilai dapat dihasilkan, mendukung pembuatan keputusan yang berbasis bukti, dan mengungkapkan temuan-temuan menarik yang mungkin tersembunyi di balik angka-angka dan fakta. Model analisis data dari Miles dan Huberman (2014) yang diperkenalkan oleh Sugiyono merupakan proses pengorganisasian data meliputi :

a. ***Data Reduction (Reduksi Data)***

Data *reduction* merupakan langkah awal dalam analisis data yang bertujuan untuk menyederhanakan kompleksitas informasi yang terkumpul. Pada tahap ini, peneliti mengevaluasi, merapikan, dan mengorganisir data agar dapat diolah lebih lanjut. Proses ini melibatkan pemilihan informasi yang relevan, pembuangan data yang tidak diperlukan, serta pemilihan pendekatan atau teknik analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti melakukan pemilihan data yang berasal dari hasil observasi atau pengamatan yang berkaitan dengan pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari.

b. ***Data Display (Penyajian Data)***

Langkah selanjutnya adalah data *display*, di mana data yang telah direduksi disajikan secara visual atau naratif untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi. Penyajian data yang jelas dan terstruktur memungkinkan para pembaca atau pihak terkait untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan penting dari data yang diolah. Berbagai metode penyajian data seperti tabel, grafik, diagram, maupun narasi dapat digunakan sesuai dengan jenis data yang dimiliki. Peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, gambar dan bagan yang berkaitan dengan pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari.

c. ***Conclusion Drawing (Penarikan kesimpulan)***

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, di mana peneliti mengevaluasi informasi yang telah diolah untuk

mengembangkan temuan dan kesimpulan yang mendalam. Dalam konteks penelitian mengenai UMKM di Kalurahan Guwosari, penarikan kesimpulan yang berbasis bukti akan memperkuat validitas hasil penelitian. Verifikasi kesimpulan dilakukan melalui perbandingan dengan teori atau kerangka konseptual yang relevan, diskusi dengan pakar atau pemangku kepentingan, serta refleksi mendalam terhadap proses analisis data secara keseluruhan. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan data atau informasi yang telah didapatkan yang berkaitan dengan strategi pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari.

BAB II

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KALURAHAN GUWOSARI

A. Pengembangan UMKM

Kalurahan Guwosari, yang terletak di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki potensi besar dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi, serta kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati, Kalurahan Guwosari menjadi kawasan yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini mendukung berkembangnya berbagai jenis UMKM berbasis agraris, seperti produk olahan pertanian dan kerajinan tangan.

Beberapa contoh UMKM yang berkembang di Kalurahan Guwosari antara lain Seblak Pawon & Sempol Ayam Goa Selarong, Dapur Rasya, *Dstory Semisal Cafe*, Alea Kripik, Kedai *Happy Yummy*, Safitri *Cooking House*, Monggrasa, Azizah *Bake*, Azza's *Snack*, Likaput, Basreng Pas, Hanif Tela-Tela, Dapur Ngebul (Lele Qu), Aneka Peyek Bu Ririn, Dapur Dino, Jamur Tiram, Kapten Jos *Snack* Emping Jagung, Kripik Singkong, *Mister Wader*, Rizqi Telur Asin, Wahyuni *Production*, YAD Blankon, Ethan *Handicraft*, MJ *Fishing Store*, Kerajinan Kayu Bu Tri, Mekar Asri *Craft* Kerajinan Batok, dan Batik Erlin.

Berikut adalah jenis UMKM yang dikelompokkan dalam tiga bidang, diantaranya, sebagai berikut :

1. Kuliner (Olahan Makanan dan Minuman)

Usaha kuliner menjadi sektor yang paling mendominasi dalam perkembangan UMKM di Kalurahan Guwosari. Ragam produk yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari jajanan kekinian seperti seblak, sempol ayam, hingga olahan tradisional seperti peyek, telur asin, dan kripik singkong. Kehadiran pelaku usaha seperti Seblak Pawon & Sempol Ayam Goa Selarong, Dapur Rasya, hingga Mister Wader mencerminkan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi produk bernilai jual tinggi. Selain itu, warung kopi dan *cafe* seperti *Dstory* Semisal *Cafe* juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM mampu menangkap tren pasar anak muda dan gaya hidup modern. Keanekaragaman ini menunjukkan potensi kuliner Guwosari sebagai sektor andalan ekonomi lokal.

2. Kerajinan Tangan

Sektor kerajinan tangan dan batik di Guwosari turut memperkaya potensi ekonomi kreatif. Pelaku usaha seperti YAD Blankon, Ethan Handicraft, dan Batik Erlin tidak hanya memproduksi barang bernilai seni tinggi, tetapi juga ikut melestarikan budaya lokal. Produk kerajinan batok kelapa, blankon, hingga kerajinan kayu memiliki daya tarik khas yang mampu menjangkau pasar wisatawan maupun pasar ekspor. Meskipun belum sebesar sektor kuliner, UMKM di bidang ini memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh dengan dukungan promosi dan pelatihan keterampilan desain serta pemasaran *digital*.

3. Peralatan & Hobi:

Meski jumlahnya belum sebanyak sektor lain, UMKM di bidang peralatan dan hobi seperti *MJ Fishing Store* menambah keberagaman jenis usaha yang ada di Guwosari. Toko ini menunjukkan adanya potensi usaha yang menyasar pasar komunitas, khususnya penggemar hobi memancing. Usaha semacam ini dapat tumbuh dengan baik jika didukung oleh jaringan komunitas dan strategi promosi yang tepat. Kategori ini juga berpeluang untuk berkembang ke ranah peralatan olahraga, otomotif, atau kegiatan luar ruang lainnya seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas rekreatif.

UMKM di Kalurahan Guwosari tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan bagi keluarga, tetapi juga sebagai pilar penting dalam perekonomian lokal. Dengan jumlah yang banyak dan keberagaman produk, UMKM mampu menyerap tenaga kerja lokal dan mengurangi angka pengangguran. Selain itu, UMKM juga berkontribusi dalam pelestarian budaya lokal melalui produk-produk kerajinan tangan dan kuliner khas daerah.

Pemerintah Kalurahan Guwosari memiliki peran strategis dalam mendukung dan mengembangkan UMKM melalui berbagai kebijakan dan program. Salah satu lembaga yang berperan aktif adalah Desa Preneur, yang fokus pada pemberdayaan UMKM dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, peningkatan mutu produk, dan pemasaran *digital*. Berikut beberapa peran pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM :

1. Program Pelatihan dan Pemberdayaan

Pemerintah Kalurahan Guwosari secara rutin menyelenggarakan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM.

Contohnya adalah pelatihan *marketing digital*, pelatihan kewirausahaan, dan pelatihan kemasan produk. Program-program ini bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan kepada para pelaku UMKM, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka dengan lebih profesional dan terarah. Selain itu, pada tahun 2024, dilakukan pengujian sampel makanan dari UMKM setempat oleh kader Desa Pangan Aman untuk memastikan keamanan pangan dan meningkatkan kualitas produk makanan lokal.

2. Dukungan Infrastruktur dan Sarana

Pemerintah Kalurahan juga mendukung pengembangan UMKM melalui penyediaan infrastruktur dan sarana yang diperlukan. Pada tahun 2022, Pemerintah Kalurahan Guwosari menerima bantuan CSR berupa incinerator dan pembangunan ruang kreasi UMKM. Incinerator digunakan untuk mengelola limbah padat dari kegiatan UMKM, sedangkan ruang kreasi UMKM menyediakan fasilitas bagi pelaku usaha untuk berkreasi dan memproduksi barang.

3. Kolaborasi dengan pihak lain

Pemerintah Kalurahan Guwosari juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan UMKM. Misalnya, pada tahun 2024, Kalurahan Guwosari bekerja sama dengan STP AMPTA Yogyakarta dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk mengembangkan desa wisata berbasis komunitas dan memperkenalkan konsep *quality tourism*.

4. Anggaran untuk UMKM di Kalurahan Guwosari

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKAL) Tahun 2024, Pemerintah Kalurahan Guwosari menetapkan pendapatan sebesar Rp 7,1 miliar dan belanja sebesar Rp 7,2 miliar, dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp 143 juta.

Beberapa alokasi anggaran yang untuk pengembangan UMKM antara lain:

a. Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM:

Alokasi anggaran untuk program pelatihan dan pemberdayaan UMKM guna meningkatkan kapasitas pelaku usaha.

b. Penyediaan Infrastruktur UMKM:

Anggaran untuk pembangunan fasilitas yang mendukung kegiatan UMKM, seperti ruang kreasi dan sarana produksi.

c. Program Pemasaran dan Promosi:

Dana untuk kegiatan promosi dan pemasaran produk UMKM, termasuk pemasaran digital dan partisipasi dalam pameran

d. Pendampingan dan Konsultasi:

Anggaran untuk penyediaan layanan pendampingan dan konsultasi bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka.

Anggaran untuk program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Guwosari menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan yang terstruktur dan terencana dengan baik. Dalam tahun anggaran yang tercantum di *website* resmi Kalurahan Guwosari, terdapat beberapa pos pembiayaan yang secara

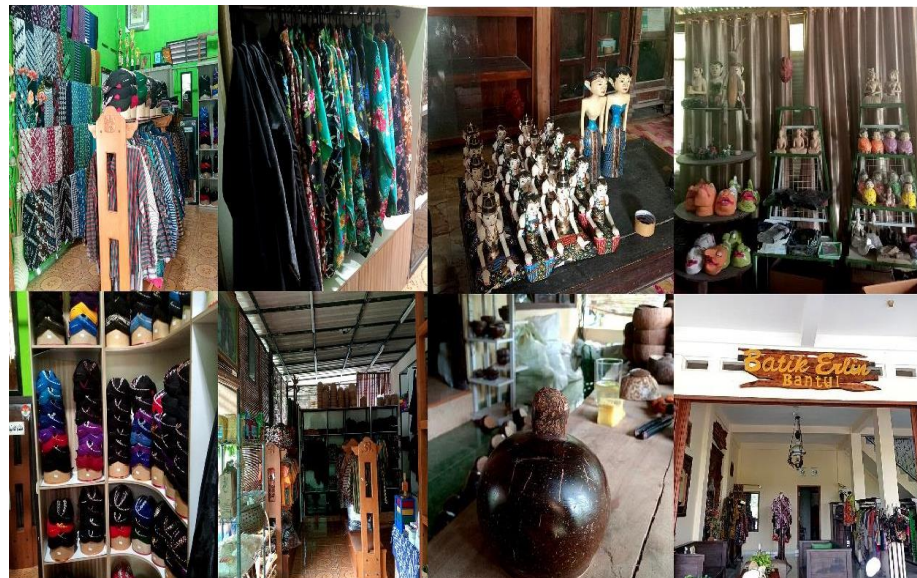
khusus dialokasikan untuk mendukung UMKM lokal, mulai dari kebutuhan konsumsi, honorarium tenaga ahli, hingga pengadaan sarana prasarana penunjang kegiatan UMKM. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah melalui pengembangan sarana dan prasarana usaha, di mana dana yang bersumber dari Dana Desa (DDS) digunakan untuk membiayai konsumsi peserta yang mengikuti kegiatan stand UMKM. Selain itu, terdapat pula anggaran untuk pengembangan industri kecil tingkat desa yang mencakup berbagai kebutuhan seperti makan dan minum selama pendampingan UMKM, honorarium bagi tenaga ahli atau narasumber yang memberikan pendampingan, serta biaya transportasi untuk kegiatan bazar UMKM. Honorarium juga diberikan kepada pelaku seni yang terlibat dalam pendampingan, serta kepada petugas yang menjaga *stand* pameran UMKM, menunjukkan bahwa setiap elemen kegiatan diperhitungkan secara detail dalam perencanaan anggaran.

Anggaran juga dialokasikan untuk kebutuhan dekorasi dan penyewaan fasilitas pendukung seperti kendaraan, *sound system*, serta tenda pameran UMKM. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pameran dan kegiatan pendampingan dapat berjalan lancar dan menarik minat masyarakat luas. Selain kebutuhan operasional, terdapat pula anggaran untuk cetak dan penggandaan materi pendampingan UMKM, yang sangat penting untuk mendukung proses edukasi dan promosi produk-produk lokal. Di luar anggaran rutin tersebut, pemerintah Kalurahan Guwosari juga melaksanakan pembangunan fasilitas fisik berupa *Meeting Room* dan Saung UMKM di kawasan DAIS Wisata.

Pembangunan ini didanai melalui Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dengan nilai anggaran sebesar Rp100.000.000. Fasilitas ini diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas UMKM, tempat pelatihan, promosi, serta pengembangan usaha masyarakat setempat. Proses pembangunan berlangsung dari 1 September hingga 10 Oktober 2024, dan menjadi salah satu bukti nyata sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan UMKM di Kalurahan Guwosari (Guwosari.sides.id, tahun 2024)

Beberapa produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM di Kalurahan Guwosari diantaranya terdapat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1 Produk-produk *Craft* dan *Fashion* UMKM di Kalurahan Guwosari



(Sumber : Dokumentasi lapangan peneliti, tahun 2025)

:Gambar di atas adalah produk-produk *craft* dan *fashion* yang dihasilkan oleh pelaku UMKM di Kalurahan Guwosari yaitu diantaranya YAD Blankon di Padukuhan Kentolan Kidul, Kerajinan Kayu Bu Tri di Padukuhan Kentolan Lor, Mekar Asri *Craft* atau kerajinan batok kelapa di Padukuhan Santan, dan Batik Erlin di Padukuhan Kalakijo.

Gambar 2.2 Produk-produk Kuliner UMKM



(Sumber :Profil Kalurahan Guwosari, tahun 2024)

Gambar di atas adalah produk-produk kuliner atau makanan yang dihasilkan oleh pelaku UMKM di Kalurahan Guwosari yaitu diantaranya Seblak Pawon & Sempol Ayam Goa Selarong, Dapur Rasya, *Dstory Semisal Cafe*, Alea Kripik, Kedai *Happy Yummy*, *Safitri Cooking House*, Monggrasa, *Azizah Bake*, *Azza's Snack*, Likaput, Basreng Pas, Hanif Tela-Tela, Dapur Ngebul (Lele Qu), Aneka Peyek Bu Ririn, Dapur Dino, Jamur Tiram, Kapten Jos *Snack* Emping Jagung, Kripik Singkong, *Mister Wader*, Rizqi Telur Asin, *Wahyuni Production*, , *Ethan Handicraft* dan *MJ Fishing Store*.

B. Kondisi Geografis

Kalurahan Guwosari terletak di Kapanewon Pajangan. Kabupaten Bantul, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis Kalurahan Guwosari, terdiri dari 15 padukuhan. Kalurahan Guwosari merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Bantul yang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) Kalurahan. Kalurahan Guwosari berada di Kapanewon Pajangan yang memiliki luas wilayah 830,00 Ha dengan jumlah penduduk lebih dari 14 ribu jiwa. Kalurahan Guwosari secara administratif pemerintahan terbagi dalam 15 Pedukuhan dan 79 RT sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Jumlah Padukuhan dan RT di Kalurahan Guwosari

No.	Padukuhan	Jumlah RT	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Kembangputihan	6	73,90	8,90%
2.	Kentolan Lor	6	20,14	2,43%
3.	Kentolan Kidul	4	32,53	3,92%
4.	Gandekan	5	21,53	2,59%
5.	Dukuh	6	40,32	4,86%
6.	Iroyudan	6	63,13	7,61%
7.	Kadisono	4	35,27	4,25%
8.	Kembanggede	4	30,35	3,66%
9.	Karangber	4	14,43	1,74%
10.	Santan	4	14,53	1,75%
11.	Kalakijo	6	32,32	3,89%
12.	Kedung	4	71,40	8,60%
13.	Bungsing	4	79,25	9,55%
14.	Watugedug	6	145,90	17,58%
15.	Pringgading	10	155,00	18,67%
	JUMLAH	79	830,00	100%

(Sumber :Profil Kalurahan Guwosari, tahun 2024)

Demografi kependudukan di Kalurahan Guwosari dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	Laki-laki	6.920	50,22%	6.920	50,22%	0	0,00%
2	Perempuan	6.858	49,78%	0	0,00%	6.858	49,78%
	JUMLAH	13.778	100,00%	6.920	50,22%	6.858	49,78%
	TOTAL	13.778	100,00%	6.920	50,22%	6.858	49,78%

(Sumber :Profil Kalurahan Guwosari, tahun 2024)

Berdasarkan data yang ada pada tabel, maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang dengan perbandingan laki-laki sebanyak 6.920 jiwa dan perempuan sebanyak 6.858 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kalurahan Guwosari didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	Dibawah 1 Tahun	64	0,46%	33	0,24%	31	0,22%
2	2-4 Tahun	257	1,86%	139	1,01%	118	0,86%
3	5-9 Tahun	719	5,22%	374	2,71%	345	2,50%
4	10-14 Tahun	882	6,40%	462	3,35%	420	3,05%
5	15-19 Tahun	934	6,78%	473	3,43%	461	3,34%
6	20-24 Tahun	959	6,96%	487	3,53%	472	3,42%
7	25-29 Tahun	988	7,17%	473	3,43%	461	3,34%
8	30-34 Tahun	972	7,05%	471	3,42%	501	3,64%
9	35-39 Tahun	1.010	7,33%	471	3,42%	539	3,91%
10	40-44 Tahun	1.184	8,59%	593	4,30%	591	4,29%
11	45-49 Tahun	1.150	8,34%	615	4,46%	535	3,88%
12	50-54 Tahun	1.002	7,27%	515	3,74%	487	3,53%

13	55-59 Tahun	1.007	7,31%	522	3,79%	485	3,52%
14	60-64 Tahun	760	5,51%	389	2,82%	371	2,69%
15	65-69 Tahun	668	4,85%	344	2,50%	324	2,35%
16	70-74 Tahun	389	2,82%	191	1,39%	198	1,44%
17	Diatas 75 Tahun	834	6,05%	369	2,68%	465	3,37%
18	0-18 Tahun	2.682	19,46%	1.394	10,11%	1.288	9,35%
	JUMLAH	16.461	119,44%	8.315	60,33%	8.146	59,11%
	BELUM MENGISI	-2679	-19,44%	-1.393	-10,11%	-1.286	-9,33%
	TOTAL	13.782	100,00%	6.922	50,22%	6.860	49,78%

(Sumber :Profil Kalurahan Guwosari, tahun 2024)

Berdasarkan data yang ada pada tabel, maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kalurahan Guwosari paling tinggi di usia nol sampai delapan belas tahun (0- 18), dalam hal ini Kalurahan Guwosari masih didominasi penduduk usia muda yang cukup tinggi. Hal ini tentunya sangat baik karena anak-anak muda adalah generasi penerus yang akan membangun kalurahan kedepannya lebih baik.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	N	%	N	%
1	Islam	13.142	95,36%	6.601	47,90%	6.541	47,46%
2	Kristen	207	1,50%	111	0,81%	96	0,70%
3	Khatolik	322	2,34%	155	1,12%	167	1,21%
4	Hindu	2	0,01%	1	0,01%	1	0,01%
5	Budha	5	0,04%	4	0,03%	1	0,01%
6	Konghucu	3	0,2%	1	0,01%	2	0,01%
7	Kepercayaan terhadap TYME/Lainnya	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
	JUMLAH	13.682	99,27%	6.874	49,88%	6.808	49,40%
	BELUM MENGISI	100	0,73%	48	0,35%	52	0,38%
	TOTAL	13.782	100,00%	6.922	50,22%	6.860	49,78%

(Sumber :Profil Kalurahan Guwosari, tahun 2024)

Berdasarkan data yang ada pada tabel, maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kalurahan Guwosari yang paling tinggi adalah penduduk yang menganut agama Islam yaitu sebanyak 13.142 jiwa. Dalam hal ini Kalurahan Guwosari mayoritas penduduknya beragama Islam. Walaupun mayoritas penduduk beragama Islam, tetapi toleransi antar agama di kalurahan ini masih tinggi.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Kelompok	Jumlah Jiwa
1	TKK	450
2	SD/Sederajat	2.873
3	SLTP/ Sederajat	2.137
4	SLTA/ Sederajat	3.292
5	D-1	53
6	D-2	50
7	D-3	241
8	S-1	628
9	S-2	53
10	S-3	5
	JUMLAH	9.782

(Sumber :Profil Kalurahan Guwosari, tahun 2024)

Berdasarkan data yang ada pada tabel, maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kalurahan Guwosari termaksud tinggi. Hal ini ditandai dengan sudah banyak masyarakat yang menempuh pendidikan dari tingkatan TKK sampai S-3 dengan jumlah seluruhnya 9.782 orang. Tingkat pendidikan yang tinggi tentunya akan sangat berpengaruh positif terhadap wawasan dan pengetahuan masyarakat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	
1	Belum/Tidak Bekerja	2547	18,48%	1.294	9,39%	1.253	9,09%
2	Mengurus R. Tangga	1.332	9,66%	204	1,48%	1.128	8,18%
3	Pelajar/Mahasiswa	2.256	16,37%	1.125	8,16%	1.131	8,20%
4	Pensiunan	143	1,04%	96	0,70%	47	0,34%
5	PNS	281	2,04%	164	1,19%	117	0,85%
6	TNI	25	0,18%	21	0,15%	4	0,03%
7	POLRI	50	0,36%	42	0,30%	8	0,06%
8	Perdagangan	75	0,54%	38	0,28%	37	0,27%
9	Petani/Pekebun	476	3,45%	219	1,59%	257	1,86%
10	Peternak	14	0,10%	11	0,08%	3	0,02%
11	Nelayan/Perikanan	4	0,03%	2	0,01%	2	0,01%
12	Industri	2	0,01%	1	0,01%	1	0,01%
13	Transportasi	5	0,04%	4	0,03%	1	0,01%
14	Karyawan Swasta	1.261	9,15%	738	5,35%	523	3,79%
15	Karyawan BUMN	12	0,09%	11	0,08%	1	0,01%
16	Karyawan BUMD	9	0,07%	6	0,04%	3	0,02%
17	Karyawan Honore	23	0,17%	17	0,12%	6	0,04%
18	Buruh Harian Lepas	3.187	23,12%	1.834	13,30%	1.353	9,82%
19	Buruh Tani/Perkebunan	469	3,40%	250	1,81%	219	1,59%
20	Buruh Nelayan	1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%
21	Buruh Peternakan	3	0,02%	3	0,02%	0	0,00%
22	Pembantu R. Tangga	36	0,26%	15	0,11%	21	
23	Tukang Batu	82	0,59%	36	0,26%	46	0,33%
24	Tukang Kayu	27	0,20%	17	0,12%	10	0,07%
25	Tukang Las	1	0,01%	1	0,01%	0	
26	Tukang Jahit	9	0,07%	1	0,01%	8	
27	Penata Rias	1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%
28	Mekanik	11	0,08%	6	0,04%	5	0,04%
29	Seniman	10	0,07%	7	0,05%	3	
30	Tabib	4	0,03%	0	0,00%	4	0,03%
31	Paraji	22	0,16%	12	0,09%	10	0,07%
32	Pendeta	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
33	Wartawan	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
34	Dosen	11	0,08%	6	0,04%	5	0,04%
35	Guru	97	0,70%	34	0,25%	63	0,46%

36	Pengacara	3	0,02%	3	0,02%	0	0,00%
37	Konsultan	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
38	Dokter	4	0,03%	3	0,02%	1	0,01%
39	Bidan	8	0,06%	1	0,01%	7	0,05%
40	Perawat	24	0,17%	5	0,04%	19	0,14%
41	Apoteker	1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%
42	Pelaut	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
43	Peneliti	2	0,01%	2	0,01%	0	0,00%
44	Sopir	11	0,08%	11	0,08%	0	
45	Pedagang	29	0,21%	9	0,07%	20	0,15%
46	Perangkat Desa	24	0,17%	20	0,015%	4	0,03%
47	Kepala Desa	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
48	Wiraswasta	1.147	8,32%	633	4,59%	514	3,73%
49	Lainnya	29	0,21%	11	0,08%	18	0,13%
	JUMLAH	13.773	99,91%	6.918	50,18%	6.855	49,73%
	BELUM MENGISI	12	0,09%	5	0,04%	7	0,05%
	TOTAL	13.785	100,00%	6.923	50,22%	6.862	49,78%

(Sumber :Profil Kalurahan Guwosari, tahun 2024)

Berdasarkan data yang ada pada tabel, maka dapat diketahui bahwa masyarakat Kalurahan Guwosari yang memiliki pekerjaan buru harian lepas jauh lebih banyak dengan jumlah 3.187 orang dibandingkan dengan penduduk yang bekerja di bidang yang lainnya. Data tersebut menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat cukup beragam dan kualitas kerja yang dimiliki masyarakat di Kalurahan Guwosari sudah cukup baik.

D. Kondisi Ekonomi

Secara ekonomi, pembagian wilayah Kalurahan Guwosari berdasarkan sifat atau karakteristiknya dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya :

1. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian menjadi salah satu aspek utama dalam struktur ekonomi Kalurahan Guwosari. Wilayah seperti Pedukuhan Gandekan, Dukuh, serta sebagian kecil dari pedukuhan Kembanggede dan Santan,

merupakan jantung dari produksi pertanian di Kalurahan Guwosari. Tanah subur mereka menjadi penopang utama produksi padi yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Seiring perkembangan zaman, sektor pertanian pun mengalami evolusi. Dulu mungkin hanya berfokus pada produksi padi, tetapi juga produksi cabe, kini para petani di Kalurahan Guwosari mulai diversifikasi produksi mereka. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani pun terus dilaksanakan. Tidak hanya sektor pertanian, perkembangan ekonomi Kalurahan Guwosari juga terlihat dari sektor jasa dan industri kecil yang semakin berkembang pesat. Mulai dari warung kopi yang menyajikan kopi khas daerah, hingga industri kerajinan tangan yang melestarikan kearifan lokal, Salah satu kawasan pertanian yang ada di Kalurahan Guwosari adalah pertanian cabe, seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.4 Lahan Pertanian Cabe di Kalurahan Guwosari



(Sumber :Profil Kalurahan Guwosari, tahun 2024)

2. Kawasan Pusat Pemerintahan

Kawasan Pusat Pemerintahan Kalurahan Guwosari terletak di Pedukuhan Iroyudan Kantor Balai Kalurahan Guwosari, menjadi pusat segala kegiatan administratif., kawasan ini menandai keberadaan pemerintahan Kalurahan

Guwosari secara keseluruhan. Cerminan dari struktur ekonomi kawasan ini melampaui sekadar lokasi kantor pemerintahan. Melalui pusat kegiatan ini, tergambar dinamika ekonomi yang memengaruhi kehidupan sehari-hari para penduduk. Berbagai sektor usaha lokal dan potensi ekonomi masyarakat turut berperan dalam menciptakan pola kehidupan ekonomi yang khas dan berkelanjutan. Perubahan tren ekonomi global dapat berdampak langsung pada aktivitas ekonomi di tingkat lokal, termasuk di Kawasan Pusat Pemerintahan. Kawasan pusat pemerintahan di Kalurahan Guwosari adalah Kantor Balai Kalurahan Guwosari, seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.5 Kantor Balai Kalurahan Guwosari



(Sumber :Profil Kalurahan Guwosari, tahun 2024)

3. Kawasan Kerajinan

Salah satu aspek penting yang memperkaya ragam ekonomi wilayah ini adalah Kawasan Kerajinan. Pedukuhan Santan dengan kerajinan batoknya, Pedukuhan Kentolan Kidul yang terkenal dengan blankonnya, Pedukuhan Watugedug yang menjunjung tinggi keahlian dalam merias patung, dan Pedukuhan Pringgading yang mempersembahkan keindahan batik kayu. Semuanya mengisyaratkan keberagaman seni dan kreativitas masyarakat

setempat. Jejak inovasi mulai membubung di Pedukuhan Kalakijo yang merintis jejak dengan usaha kerajinan batiknya. Kawasan Kerajinan bukan hanya sekadar pusat produksi, melainkan ladang inspirasi dan penjaga identitas budaya yang semakin hari semakin bernilai. Salah satu kawasan kerajinan yang ada di Kalurahan Guwosari adalah kerajinan wayang yang terbuat dari batok kelapa di pedukuhan Santan, seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.6 Kerajinan Wayang di Kalurahan Guwosari



(Sumber :Profil Kalurahan Guwosari, tahun 2024)

4. Kawasan Wisata Kuliner Ingkung

Pedukuhan Karangber, Santan, Kalakijo, dan Kentolan Lor menjadi poros utama dalam memperkenalkan kelezatan kuliner ingkung kepada dunia luar. Sebagai pelopor kuliner ingkung pertama, Karangber telah membuka jalan bagi pedukuhan lain untuk ikut serta dalam menggeliatkan pariwisata kuliner yang memikat. Melalui perpaduan rasa yang khas dan aroma yang menggugah selera, kuliner ingkung menjadi magnet yang menarik bagi pengunjung dari berbagai penjuru. Dari dapur-dapur kecil di Pedukuhan Karangber hingga memiliki 15 warung ingkung yang tersebar di wilayah tersebut. Kawasan Wisata Kuliner Ingkung telah berhasil menciptakan

gebyar ekonomi yang mengalir deras. Tak hanya sekadar tempat makan, kawasan wisata kuliner ingkung menjadi rumah bagi para pelaku kuliner dan pecinta masakan tradisional. Salah satu kawasan kuliner ingkung berada di Pedukuhan Kentolan Lor, seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.7 Warung Kuliner Ingkung Ayam di Kalurahan

Guwosari



(Sumber :Profil Kalurahan Guwosari, tahun 2024)

5. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan menjadi salah satu penopang dalam perekonomian wilayah. Pedukuhan Bungsing bukan sekadar tempat peternakan, tetapi merupakan cermin dari semangat peternak lokal yang gigih dan berdedikasi tinggi. Kawasan peternakan tidak hanya menawarkan sumber mata pencaharian, tetapi juga menghadirkan kehidupan. Dari pemeliharaan hingga pemasaran, setiap langkah yang dijalani oleh para peternak adalah bagian dari proses panjang menuju keberhasilan. Perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan perubahan kebijakan merupakan ujian yang harus dihadapi dengan bijak dan tanggap. Dengan terus mengeksplorasi peluang dan terus belajar dari pengalaman, Kawasan Peternakan dapat menjadi lokomotif penggerak ekonomi yang memberikan dampak positif bagi seluruh komunitas. Salah satu kawasan peternakan berada di

Pedukuhan Bungsing, seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.8 Kandang Sapi di Kalurahan Guwosari



(Sumber :Profil Kalurahan Guwosari, tahun 2024)

E. Sarana Dan Prasarana

Secara umum, sarana dan prasarana merujuk pada seperangkat hal yang digunakan untuk membantu proses kegiatan sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Menurut Penerjemahan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sarana dan prasarana terbagi atas dua kata, yang pertama sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sarana dapat mencakup berbagai hal mulai dari fasilitas fisik hingga layanan yang disediakan untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan.

Sedangkan kata yang kedua, prasarana, adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, seperti usaha, pembangunan, atau proyek. Prasarana umumnya mencakup fasilitas tetap yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran suatu kegiatan, seperti infrastruktur dan sarana pendukung lainnya. Dalam konteks Kalurahan Guwosari, sarana dan prasarana yang tersedia mendukung pariwisata dalam menarik kunjungan wisatawan dan meningkatkan kualitas pengalaman wisata.

Di Kalurahan Guwosari, terdapat sejumlah sarana dan prasarana yang mendukung pariwisata, antara lain pemandu lokal (*tour guide*) yang akan membantu wisatawan dalam menjelajahi destinasi wisata lokal. Penginapan atau *homestay* memberikan kemudahan penginapan bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan budaya Kalurahan Guwosari secara lebih dekat, serta adanya mushola sebagai fasilitas ibadah bagi wisatawan yang membutuhkan. Selain itu, kendaraan penjemput tersedia untuk memudahkan aksesibilitas bagi wisatawan yang tiba dari luar daerah. Cagar budaya menjaga warisan sejarah dan budaya Kalurahan Guwosari agar tetap terjaga kelestariannya. Toilet umum penting untuk kenyamanan wisatawan selama berwisata, tempat parkir yang memadai untuk kendaraan wisatawan, dan aneka hidangan lokal seperti ayam ingkung yang menjadi primadona kuliner dan daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan, prasarana jalan raya yang baik menjadi faktor penting. Mulai dari gang-gang kecil hingga jalan besar, infrastruktur jalan terawat dengan baik akan memberikan kenyamanan dan kelancaran bagi pengunjung. Penunjuk arah di setiap pojok atau sudut jalan juga membantu pengunjung, terutama yang baru pertama kali berkunjung, untuk menemukan tujuan wisata yang diinginkan dengan mudah. Pemerintah Kalurahan Guwosari bersama dengan pihak terkait terus melakukan upaya pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor pariwisata dalam menarik lebih banyak wisatawan dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan.

F. Kondisi Sosial dan Budaya

Secara sosial dan budaya, masyarakat Kalurahan Guwosari mayoritas secara turun temurun merupakan suku Jawa, di mana budaya dan kehidupan sehari-hari masih sangat dipengaruhi oleh kultur Jawa yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai luhur. Masyarakat Guwosari menjaga kelestarian budaya Jawa melalui pelaksanaan berbagai acara adat, pentas kesenian tradisional, serta upaya membangun dan melestarikan cagar budaya sebagai bagian penting dari identitas dan kebanggaan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Guwosari menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang mengajarkan tentang budi pekerti yang mulia, saling tolong menolong, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama.

Salah satu contoh nyata dari nilai gotong royong yang masih sangat kental di Kalurahan Guwosari adalah adanya prinsip “Guyub Rukun Golong Gilig”. Prinsip ini mendorong masyarakat untuk selalu bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal kerja sama dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam upaya menjaga keberlangsungan tradisi dan budaya lokal. Nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan rasa saling memiliki masih merupakan landasan kuat bagi kehidupan masyarakat Guwosari.

Keberadaan nilai-nilai tersebut dapat terlihat melalui berbagai kegiatan seremonial yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat Guwosari, mulai dari acara pernikahan, kelahiran, hingga upacara kematian. Seluruh rangkaian acara tersebut merupakan wujud nyata dari kebersamaan dan solidaritas antarwarga. Begitu pula dalam peringatan hari raya keagamaan maupun perayaan hari kemerdekaan, masyarakat Guwosari senantiasa berpartisipasi secara aktif dan turut serta dalam upaya menjaga dan

menghormati tradisi yang telah ada sejak turun temurun.

Selain itu, upaya untuk meningkatkan pendidikan juga menjadi fokus utama masyarakat Guwosari. Pembentukan Taman Kanak-Kanak (TKK) merupakan langkah nyata dalam memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi generasi muda Guwosari. Pendidikan yang baik diyakini dapat menjadi pondasi yang kuat untuk anak-anak dalam menghadapi tantangan masa depan dan membentuk karakter yang terampil dan bertanggung jawab.

Dengan memperkuat dan mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya yang kaya serta beragam, Kalurahan Guwosari bukan hanya menjadi destinasi wisata yang menarik dari segi alam dan budaya, tetapi juga menjadi tempat di mana tradisi, kearifan lokal, dan semangat gotong-royong terus hidup dan berkembang. Masyarakat Guwosari yang menjaga kesinambungan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, memberikan kontribusi yang berharga dalam memperkaya warisan budaya bangsa serta menjaga keberlangsungan nilai-nilai luhur yang telah mereka warisi dari nenek moyang mereka.

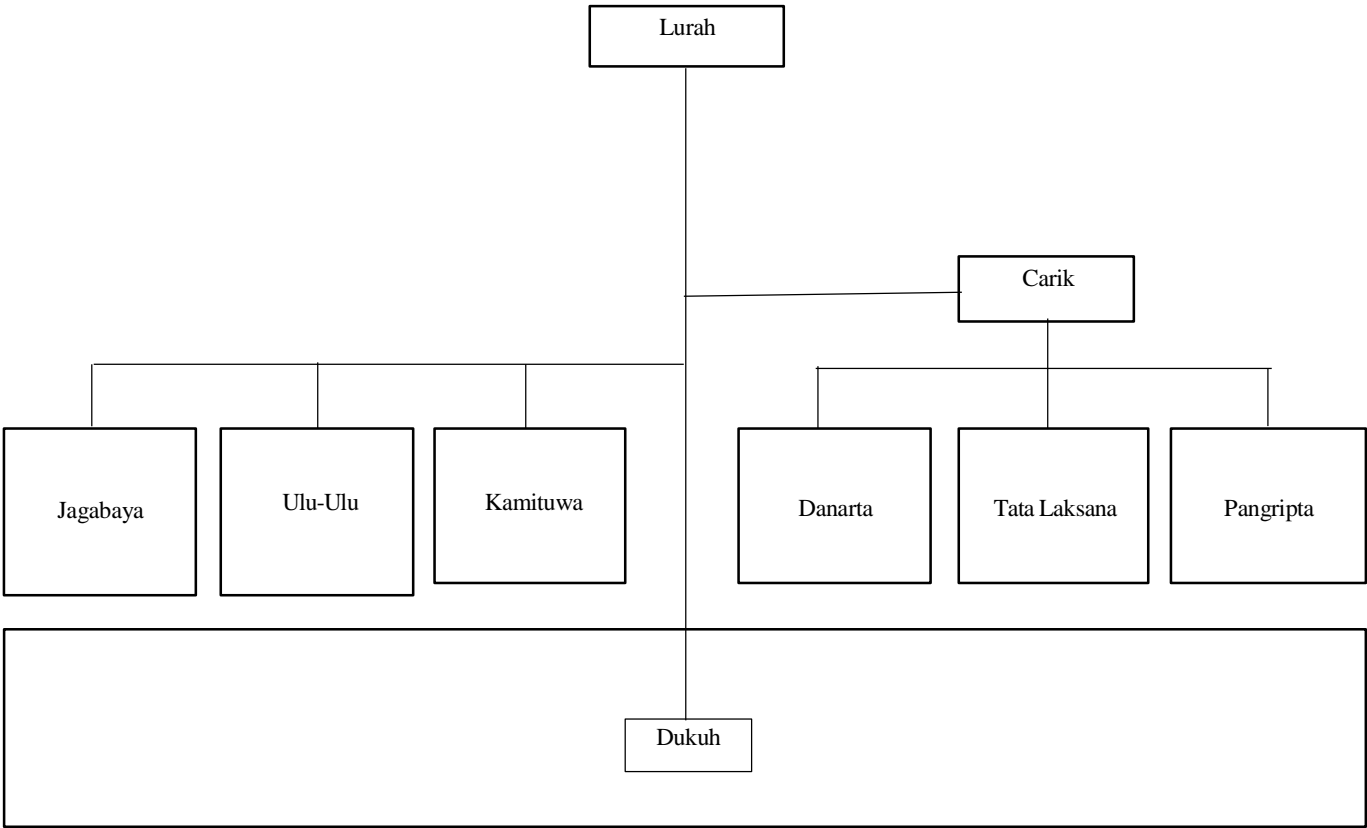
G. Struktur Pemerintah Kalurahan

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kalurahan adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah Kalurahan adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 26, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Struktur organisasi pemerintahan kalurahan yang ada di setiap kalurahan merupakan lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran atau strategi untuk mengatur masyarakat demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Adapun struktur organisasi Pemerintah Kalurahan Guwosari, seperti pada bagan di bawah ini :

Bagan 2.1 Struktur Pemerintah Kalurahan Guwosari



(Sumber :Profil Kalurahan Guwosari, tahun 2024)

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menggunakan nomenklatur jabatan pemerintahan desa yang berbeda dari daerah lain di Indonesia sebagai bagian dari

pelaksanaan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, serta peraturan daerah dan peraturan bupati di masing-masing kabupaten di DIY. Desa di sini disebut kalurahan. Kepala desa yang biasanya dikenal di daerah lain disebut Lurah di kalurahan, yang dipilih langsung oleh masyarakat dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kalurahan. Sekretaris desa disebut Carik, yang memimpin sekretariat dan mengelola administrasi umum. Jagabaya adalah pejabat yang bertugas mengurus pemerintahan, keamanan, serta urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang di kalurahan. Ulu-ulu bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, termasuk bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Kamituwa adalah pejabat yang mengelola pelayanan publik di kalurahan, sedangkan Danarta mengurus keuangan kalurahan. Tata Laksana adalah jabatan yang menangani urusan tata usaha dan administrasi. Pangripta bertugas dalam perencanaan dan pengembangan kalurahan. Sedangkan Dukuh adalah kepala wilayah terkecil di bawah kalurahan, yang mengelola pemerintahan di tingkat padukuhan atau dusun. Semua istilah ini merupakan bagian dari sistem pemerintahan lokal yang khas di Yogyakarta, mencerminkan keistimewaan dan tradisi daerah.

Berikut adalah tugas masing-masing aparatur kalurahan, diantaranya :

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, dan efisien
- e. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Desa
- f. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- g. Mengelola keuangan dan aset desa
- h. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- i. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- j. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa
- k. Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa
- l. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- m. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

2. Carik

Carik mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti: tata naskah, administrasi Surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana kerja pemerintah desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan *monitoring* dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Jagabaya

Jagabaya mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
- b. Melaksanakan administrasi kependudukan
- c. Melaksanakan administrasi pertanahan
- d. Melaksanakan pembinaan sosial politik
- e. Memfasilitasi kerja sama pemerintah desa
- f. Menyelesaikan perselisihan warga dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

4. Ulu-Ulu

Ulu-ulu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa
- b. Mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber- sumber pendapatan desa
- c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya

- d. Mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

5. Kamituwa

Kamituwa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, pernikahan, sosial, pendidikan, kebudayaan, olahraga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan satu pintu dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

6. Danarta

Danarta mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APB desa
- b. Menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin lurah desa, membukukan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa
- c. Mengendalikan pelaksanaan APBDes
- d. Mengelola dan membina administrasi keuangan desa
- e. Menggali sumber pendapatan desa dan
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh lurah desa atau carik desa

7. Tata Laksana

Tata laksana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan urusan surat menyurat
- b. Melaksanakan pengelolaan arsip pemerintah desa
- c. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris desa
- d. Mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan pemerintah desa
- e. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan desa dan
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan umum yang diberikan oleh lurah desa atau carik desa

8. Pangripta

Pangripta mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan kerja pemerintahan desa
- b. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan desa
- c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan kerja pemerintahan desa secara rutin dan atau berkala
- d. Menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan
- e. Melaksanakan musrenbang desa
- f. Menyusun RPJMDes
- g. Menyusun RKPDes
- h. Melaksanakan fasilitasi administrasi kesekretariatan BPD dan
- i. Melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh lurah desa atau carik desa

9. Dukuh

Dukuh mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu lurah desa dalam melaksanakan tugas lurah desa di wilayah masing- masing
- b. Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, kesejahteraan, pembangunan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
- c. Melaksanakan peraturan desa, peraturan lurah desa serta keputusan lurah desa dan
- d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada lurah desa.

BAB III

PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA

MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KALURAHAN

GUWOSARI

Pada bab ini, peneliti memaparkan hasil temuan selama di lapangan, berupa data dan informasi yang telah diwawancarai terkait “Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul. Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan jawaban dari informan sebagai landasan analisis. Peneliti memaparkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian yakni melihat bagaimana strategi, program dan anggaran pemerintah kalurahan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan UMKM dan melihat bagaimana pengembangan UMKM di setiap tahunnya. Oleh karena itu, sebelum menyiapkan pertanyaan peneliti perlu melakukan pendekatan secara persuasif terhadap informan agar data yang diperoleh benar- benar *valid* dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka statistik tetapi merupakan cerminan dari kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di tengah dinamika perekonomian global, upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi kunci utama dalam menggerakkan perekonomian suatu wilayah. Pemerintah Kalurahan memegang peranan kunci dalam merumuskan dan melaksanakan strategi pengembangan UMKM. Dengan memahami potensi dan tantangan yang ada, langkah-langkah strategis yang diambil dapat membuka peluang

baru bagi para pelaku usaha lokal. Dukungan dari pemerintah dalam hal ini tidak hanya sebatas pada level regulasi dan perizinan, tetapi juga pada pengembangan melalui program- program pelatihan, akses pembiayaan, serta pemasaran bersama.

A. Strategi Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan Usaha

Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Guwosari

Kalurahan Guwosari merupakan salah satu kalurahan yang berada di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan ini dikenal dengan berbagai predikat yang mencerminkan kemajuan dan komitmennya dalam pembangunan, antara lain sebagai Desa Mandiri Budaya, Desa Preneur, Desa Anti Korupsi, Desa Pangan Aman, Inovasi Desa dan Pengolahan Sampah *Zero Waste*. Selain itu, Kalurahan Guwosari juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, hasil buah-buahan dan kayu- kayuan. Potensi ini kemudian diolah dan dikembangkan melalui berbagai unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Produk-produk UMKM yang dihasilkan mencakup olahan makanan tradisional serta aneka kerajinan tangan yang khas, mencerminkan kekayaan alam dan budaya lokal yang dimiliki Kalurahan Guwosari.

Menurut Dye (2022), dalam pengembangan UMKM ada beberapa strategi pemerintah yang efektif untuk diimplementasikan yaitu strategi distributif, strategi regulatif dan strategi konstituen. Ketiga strategi tersebut mempunyai arti bahwa pemerintah memfasilitasi UMKM untuk pengembangan usaha mereka yang tentunya tidak terlepas dari peraturan yang mengatur dan pemerintah kalurahan selalu melibatkan UMKM dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pengembangan UMKM.

1. Strategi Distributif

Pemerintah kalurahan memberikann pelatihan atau pendampingan kepada UMKM. Pemerintah Kalurahan Guwosari berupaya melalui strategi distributif yang dijalankan untuk mendukung pengembangan UMKM. Hal ini diungkapkan oleh Umar Wanto selaku Ulu-Ulu di Kalurahan Guwosari bahwa:

“Strategi yang kami lakukan adalah memberikan akses kepada pelaku UMKM untuk bisa berkembang. Kami melakukan pendampingan kepada teman-teman pelaku usaha kecil agar mereka tidak tertinggal dalam persaingan, terutama dalam hal manajemen usaha, pemasaran, dan penguatan kapasitas diri. Misalnya, kami bantu mereka memahami pentingnya pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi, serta bagaimana mengelola pembukuan dengan lebih rapi. Selain itu, kami juga memberi ruang secara adil kepada pelaku UMKM saat ada kegiatan-kegiatan kunjungan, dengan mengadakan bazar. Ini bukan hanya soal menjual produk, tapi juga melatih mental pelaku UMKM agar terbiasa berinteraksi langsung dengan calon konsumen dan bisa memperkenalkan produk mereka dengan percaya diri. Bahkan dalam pemasaran pun, kami tidak hanya mengandalkan cara-cara konvensional, tetapi juga mulai dorong mereka untuk memanfaatkan pemasaran *digital* agar jangkauannya lebih luas”. (Wawancara Umar Wanto, 31 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Umar Wanto selaku Ulu-Ulu, maka dapat diketahui bahwa strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha secara menyeluruh. Pendekatan yang diambil tidak hanya sebatas pada dukungan finansial atau promosi, tetapi juga melibatkan pendampingan intensif dalam aspek manajemen usaha, pemasaran, dan penguatan kapasitas pribadi pelaku UMKM. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah memberikan edukasi mengenai pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan keuangan usaha, serta pembukuan yang tertib sebagai dasar pengelolaan usaha yang sehat. Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM dapat menjalankan usaha secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, pelaku UMKM juga diberikan ruang dan kesempatan yang adil untuk tampil dalam berbagai kegiatan seperti bazar

saat ada kunjungan atau acara tertentu. Kegiatan ini bukan hanya bertujuan untuk penjualan semata, tetapi juga sebagai sarana latihan mental bagi para pelaku UMKM agar lebih percaya diri dalam memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen. Dalam hal pemasaran, strategi yang diterapkan juga mulai menysar pemanfaatan media *digital*, sebagai langkah adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi. Dengan demikian, pelaku UMKM didorong untuk tidak hanya bergantung pada metode pemasaran konvensional, tetapi juga mampu menjangkau pasar yang lebih luas melalui *platform digital*.

Ada pula pendapat yang disampaikan oleh Nur Hidayad selaku Carik bahwa Pemerintah Kalurahan itu sudah merealisasikan tugasnya dengan menjalankan strategi distributif untuk pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari. Seperti pada kutipan di bawah ini :

“Strategi yang kami lakukan lebih menitikberatkan pada bagaimana mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi dari para pelaku UMKM secara merata. Kami berupaya memastikan setiap pelaku UMKM mendapatkan akses yang setara terhadap informasi, pelatihan, dan kesempatan untuk berkembang. Komunikasi rutin dan koordinasi dengan ketua kelompok UMKM menjadi kunci dalam mendistribusikan dukungan yang dibutuhkan, agar tidak ada yang tertinggal. Selain itu, kami juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dekranas Kapanewon, Dekranas Kabupaten, hingga Dekranas Daerah DIY, serta beberapa perguruan tinggi. Kolaborasi ini kami manfaatkan untuk memperluas jaringan dan membuka akses bagi pelaku UMKM terhadap peluang pengembangan yang adil dan merata”. (Wawancara Nur Hidayad, 05 Februari 2025).

Dari hasil wawancara dengan Nur Hidayad selaku Carik, dapat diketahui bahwa pemerintah Kalurahan Guwosari menerapkan strategi yang berfokus pada pengakomodasian aspirasi dan kebutuhan para pelaku UMKM sebagai langkah dalam pengembangan usaha mereka. Pemerintah kalurahan secara aktif memfasilitasi pertemuan serta membangun komunikasi dan

koordinasi yang intens dengan ketua kelompok UMKM untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengakses dukungan. Selain itu, kerja sama juga dijalin dengan berbagai pihak eksternal seperti Dekranas Kapanewon, Dekranas Kabupaten, Dekranas Daerah DIY, serta beberapa perguruan tinggi yang memiliki visi sejalan dalam pengembangan UMKM. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan yang bersifat merata dan inklusif dalam mendistribusikan akses terhadap pelatihan, pameran, serta penguatan kapasitas bagi para pelaku UMKM di wilayah tersebut.

Selanjutnya Muhaimin selaku Ketua Bamuskal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) di Kalurahan Guwosari menyatakan bahwa strategi untuk pengembangan UMKM bukan hanya dijalankan oleh Perangkat Kalurahan saja tetapi tentunya ada peran atau wewenang dari Bamuskal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) juga sangat penting sebagai perangkat kalurahan. Lebih lanjutnya dinyatakan pada kutipan di bawah ini :

“Strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Kalurahan kami pantau secara aktif, khususnya dalam hal pengembangan UMKM. Kami memiliki peran untuk memastikan bahwa setiap pelaku UMKM di kalurahan ini mendapatkan kesempatan yang adil dan setara dalam proses pengembangan tersebut. Melalui mekanisme pengawasan dan evaluasi, kami menjaga agar pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan UMKM benar-benar menyentuh semua pihak, tidak hanya sebagian. Selain itu, kami juga berusaha mendukung berbagai kegiatan yang dapat menjadi ruang distribusi peluang bagi para pelaku UMKM, seperti *event* Desa Preneur, Desa Prima, maupun kunjungan-kunjungan yang melibatkan UMKM. Dalam hal ini, kami mendorong agar pelaku UMKM dapat terlibat secara aktif dan merata, sehingga manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut bisa dirasakan bersama”. (Wawancara Muhaimin, 04 Februari 2025).

Dari hasil wawancara bersama Muhaimin selaku ketua Bamuskal, maka dapat diketahui bahwa lembaga pengawas di Kalurahan Guwosari memiliki peran penting dalam memastikan pemerataan kesempatan bagi pelaku UMKM melalui strategi distributif. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pelaku UMKM mendapatkan akses dan ruang yang setara dalam berbagai kegiatan pengembangan, seperti pelibatan dalam *event* Desa Preneur, Desa Prima, maupun kunjungan-kunjungan yang bersifat promosi. Selain menjalankan fungsi kontrol, lembaga ini juga mendukung upaya-upaya kolaboratif yang membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang secara merata. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk menciptakan keadilan dalam distribusi manfaat dan partisipasi dalam pengembangan UMKM di tingkat kalurahan.

Hal ini juga terkonfirmasi oleh Sumaryadi selaku pelaku UMKM di kelompok Desa Preneur yang mengatakan bahwa :

“Strategi dari Pemerintah Kalurahan menurut saya sudah berjalan dengan baik. Sebagai pelaku UMKM, kami merasa benar-benar didukung, terutama dalam hal pemerataan kesempatan untuk berkembang. Kami diberikan ruang yang sama untuk ikut pelatihan, seperti pelatihan branding dan pengemasan produk. Selain itu, kami juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan, seperti bazar dan event-event kunjungan dari luar, di mana kami diberi kesempatan untuk memasarkan produk secara langsung. Keterlibatan seperti ini sangat berdampak bagi kami karena produk kami bisa lebih dikenal luas. Menurut saya, strategi yang dijalankan sudah cukup”. (Wawancara Sumaryadi, 31 Januari 2025).

Dari hasil wawancara bersama Sumaryadi selaku pelaku UMKM, maka dapat diketahui bahwa pelaku UMKM di Kalurahan Guwosari merasakan adanya strategi pengembangan yang bersifat distributif dari pemerintah kalurahan. Hal ini tercermin dari keterlibatan mereka secara merata dalam berbagai kegiatan penguatan kapasitas, seperti pelatihan

branding dan pengemasan produk, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam bazar dan *event-event* kunjungan dari luar. Keterlibatan yang merata ini memberikan dampak positif, terutama dalam hal peningkatan visibilitas dan pemasaran produk. Dukungan yang diberikan secara menyeluruh kepada pelaku UMKM menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan tidak hanya menasar kelompok tertentu, melainkan menjangkau seluruh pelaku usaha secara adil dan inklusif.

Adapun pernyataan dari Tri selaku pelaku UMKM di kelompok desa Preneur yang mengatakan bahwa :

“Strategi dari Pemerintah Kalurahan sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Saya sebagai pelaku UMKM memang sering diundang untuk ikut dalam berbagai kegiatan seperti pelatihan dan *event-event* kunjungan yang diselenggarakan. Namun, saya sendiri belum terlalu aktif mengikuti semua kegiatan tersebut. Tetapi, seiring waktu saya mulai menyadari bahwa kesempatan seperti itu sebenarnya penting untuk dimanfaatkan agar bisa membantu pengembangan usaha saya”. (Wawancara Tri, 07 Februari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Tri selaku pelaku UMKM, maka dapat diketahui bahwa strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Kalurahan dalam mendukung pelaku UMKM sudah berjalan dengan baik melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan dan *event* kunjungan. Namun, partisipasi pelaku UMKM seperti Tri dalam mengikuti program tersebut masih belum maksimal karena adanya persepsi bahwa kegiatan tersebut kurang penting. Meskipun demikian, Tri menyadari bahwa kesempatan yang diberikan oleh pemerintah seharusnya dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung pengembangan usahanya. Hal ini menunjukkan adanya potensi peningkatan kesadaran dan keterlibatan pelaku UMKM dalam program yang disediakan oleh pemerintah.

Dari berbagai pernyataan wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan secara aktif menjalankan strategi distributif untuk mendukung pengembangan UMKM. Strategi ini diwujudkan melalui berbagai bentuk pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada pelaku UMKM, dengan tujuan agar mereka mampu meningkatkan kemampuan manajemen usaha, pemasaran, dan pengelolaan keuangan secara lebih baik. Pemerintah juga memberikan ruang yang adil dan merata kepada pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan, seperti bazar dan *event* kunjungan, sehingga pelaku usaha bisa berinteraksi langsung dengan konsumen dan memperluas jaringan pemasaran, termasuk melalui pemasaran *digital*. Selain itu, Pemerintah Kalurahan memastikan setiap pelaku UMKM mendapatkan akses setara terhadap informasi, pelatihan, dan peluang pengembangan usaha dengan menjalin komunikasi rutin dan koordinasi bersama ketua kelompok UMKM. Kerja sama dengan berbagai pihak eksternal seperti Dekranas dan perguruan tinggi juga dilakukan untuk memperluas jaringan dan peluang pengembangan bagi UMKM secara merata. Peran Bamuskal sebagai lembaga pengawas dan evaluator kegiatan pengembangan UMKM di Kalurahan juga sangat penting untuk memastikan distribusi kesempatan berjalan secara adil dan tidak hanya dinikmati sebagian pihak saja. Bamuskal aktif mendukung dan memantau agar setiap kegiatan, seperti *event* Desa Preneur dan kunjungan usaha, dapat diikuti oleh seluruh pelaku UMKM secara merata. Para pelaku UMKM sendiri mengakui bahwa strategi yang dijalankan sudah cukup baik dan memberi mereka dukungan nyata, khususnya dalam pemerataan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan kegiatan pemasaran produk. Meskipun ada sebagian

pelaku yang masih belum sepenuhnya aktif, mereka mulai menyadari pentingnya memanfaatkan kesempatan tersebut demi kemajuan usahanya.

2. Strategi Regulatif

Pemerintah Kalurahan membuat peraturan yang memudahkan UMKM dalam beroperasi seperti perizinan atau penataan tata ruang yang mendukung UMKM. Regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Kalurahan Guwosari untuk mendukung UMKM yaitu Keputusan Lurah Guwosari Nomor 42 Tahun 2023, yang berisi keputusan membentuk tim pelaksana kegiatan pendampingan, pengadaan barang atau jasa serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang mendukung pengembangan UMKM di tingkat kalurahan dan Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 6 Tahun 2022, yang memuat Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP) Tahun 2023, yang di dalamnya terdapat program-program pemberdayaan masyarakat, termaksud pendampingan dan penguatan UMKM. Pemerintah Kalurahan Guwosari sudah menjalankan strategi regulatif untuk mendukung pengembangan UMKM, seperti yang diungkapkan oleh Umar Wanto selaku Ulu-Ulu di Kalurahan Guwosari bahwa:

“Kami menyadari bahwa keberadaan regulasi yang jelas dan mendukung sangat penting agar pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya dengan mudah dan legal. Oleh karena itu, kami aktif menjalin kerja sama dengan dinas terkait untuk mempermudah proses perizinan, seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), sehingga pelaku UMKM dapat fokus mengembangkan usahanya tanpa terkendala masalah administratif”. (Wawancara Umar Wanto, 31 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Umar Wanto selaku Ulu-Ulu, maka dapat diketahui bahwa pemerintah kalurahan telah menjalankan strategi regulatif yang berpihak kepada pelaku UMKM. Regulasi yang jelas dan

mendukung sangat penting agar pelaku UMKM dapat beroperasi dengan lebih mudah dan legal. Hal ini menunjukkan kesadaran yang tinggi dari pemerintah setempat akan peran UMKM dalam perekonomian. Pemerintah Kalurahan Guvosari telah bergerak cepat dalam memberikan dukungan kepada UMKM. Kerja sama yang erat dengan dinas terkait dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa proses perizinan usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dapat diselesaikan dengan lancar dan tanpa hambatan bagi para pelaku UMKM.

Ada pula pendapat yang disampaikan oleh Nur Hidayat selaku Carik bahwa pemerintah kalurahan sudah merealisasikan tugasnya dengan menjalankan strategi regulatif untuk pengembangan UMKM di Kalurahan Guvosari. Seperti pada kutipan di bawah ini :

“Kami berkomitmen menjalankan strategi yang mendukung pengembangan UMKM di Kalurahan Guvosari dengan mengakomodir usulan dari para pelaku UMKM, terutama terkait kemudahan perizinan usaha. Kami memfasilitasi pelaku UMKM dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi lain yang diperlukan agar mereka dapat beroperasi secara legal dan lebih mudah dalam menjalankan usahanya. Selain itu, kami juga melakukan penataan tata ruang yang mendukung keberlangsungan UMKM, dengan memastikan tersedianya ruang usaha yang layak, termasuk area untuk pameran dan bazar, sehingga pelaku UMKM dapat berkembang secara optimal”. (Wawancara Nur Hidayad, 05 Februari 2025).

Dari hasil wawancara dengan Nur Hidayad selaku Carik, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan Guvosari telah menjalankan strategi regulatif yang bertujuan untuk memudahkan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya secara legal dan teratur. Pemerintah kalurahan berperan aktif dalam memfasilitasi pengurusan perizinan usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi yang dibutuhkan oleh UMKM. Selain itu,

pemerintah juga melakukan penataan tata ruang dengan menyediakan ruang usaha yang layak serta area untuk kegiatan seperti pameran dan bazar, guna mendukung perkembangan dan keberlangsungan UMKM di wilayahnya.

Selanjutnya Muhaimin selaku Ketua Bamuskal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) di Kalurahan Guwosari menyatakan bahwa Pemerintah Kalurahan sudah merealisasikan tugasnya dengan menjalankan strategi regulatif untuk pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari. Lebih lanjutnya dinyatakan pada kutipan di bawah ini:

“Strategi yang telah dirancang oleh Pemerintah Kalurahan untuk mendukung pengembangan UMKM sudah mulai dijalankan, dan kami sebagai BamusKal bertugas melakukan pengawasan agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu langkah regulatif yang kami pastikan terlaksana adalah kemudahan akses perizinan usaha bagi pelaku UMKM. Pemerintah Kalurahan memfasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi lain yang diperlukan, sehingga UMKM dapat beroperasi secara legal dan memiliki peluang lebih luas dalam mengembangkan usahanya. Dalam peran pengawasan, kami melibatkan koordinasi dengan lurah dan pamong untuk memastikan regulasi berjalan efektif dan mendukung para pelaku UMKM”. (Wawancara Muhaimin, 04 Februari 2025).

Dari hasil wawancara bersama Muhaimin selaku ketua Bamuskal, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan Guwosari telah menerapkan strategi regulatif dengan fokus pada kemudahan akses perizinan bagi pelaku UMKM. Pemerintah kalurahan memfasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi yang diperlukan agar UMKM dapat beroperasi secara legal dan mendapat peluang lebih luas dalam mengembangkan usaha. Selain itu, peran BamusKal sangat penting dalam melakukan pengawasan pelaksanaan strategi regulatif tersebut dengan melibatkan koordinasi bersama lurah dan pamong, guna memastikan regulasi yang dibuat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM.

Hal ini menunjukkan adanya komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan usaha yang tertib dan mendukung pertumbuhan UMKM di wilayah Kalurahan Guwosari.

Hal ini juga terkonfirmasi oleh Sumaryadi selaku pelaku UMKM di kelompok Desa Preneur yang mengatakan bahwa :

“Strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Kalurahan sudah berjalan dengan baik. Sebagai pelaku UMKM, kami merasa mendapat dukungan nyata, terutama dalam kemudahan pengurusan perizinan usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga usaha kami menjadi lebih legal dan diakui secara resmi. Selain itu, penataan tata ruang oleh Pemerintah Kalurahan juga memberikan manfaat, dengan tersedianya lokasi yang mendukung kegiatan usaha seperti bazar dan *event* lainnya”. (Wawancara Sumaryadi, 31 Januari 2025).

Dari hasil wawancara bersama Sumaryadi selaku pelaku UMKM, maka dapat diketahui bahwa pelaku UMKM di Kalurahan Guwosari merasakan dukungan nyata dari Pemerintah Kalurahan melalui penerapan strategi regulatif. Dukungan tersebut terlihat dari kemudahan dalam pengurusan perizinan usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) yang membuat usaha mereka menjadi legal dan diakui secara resmi. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan tata ruang yang menyediakan lokasi yang memadai untuk kegiatan usaha seperti bazar dan *event*, sehingga mendukung kelancaran dan pengembangan UMKM di wilayah tersebut.

Adapun pernyataan dari Tri selaku pelaku UMKM di kelompok desa Preneur yang mengatakan bahwa :

“Strategi dari Pemerintah Kalurahan sudah berjalan dengan baik, terutama dalam hal regulasi yang mendukung pelaku UMKM. Kami merasa mendapat kemudahan dalam pengurusan perizinan usaha, serta penataan tata ruang yang mendukung kegiatan UMKM, seperti penyediaan tempat untuk bazar dan pelatihan. Meskipun saya pribadi belum terlalu aktif mengikuti berbagai kegiatan, saya menyadari bahwa kesempatan tersebut sangat penting dan sebaiknya dimanfaatkan dengan baik”. (Wawancara Tri, 07 Februari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Tri selaku pelaku UMKM, maka dapat diketahui bahwa pelaku UMKM di Kalurahan Guwosari merasakan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan melalui strategi regulatif, khususnya dalam hal pengurusan perizinan usaha dan penataan tata ruang yang mendukung kegiatan UMKM, seperti penyediaan tempat untuk bazar dan pelatihan. Meskipun ada pelaku UMKM yang belum aktif mengikuti seluruh program, mereka menyadari pentingnya kesempatan tersebut untuk pengembangan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dan fasilitas yang disiapkan pemerintah telah memberikan dukungan nyata bagi keberlangsungan dan kemajuan UMKM di wilayah tersebut.

Dari berbagai pernyataan wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kalurahan Guwosari telah mengimplementasikan strategi regulatif yang bertujuan untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Regulasi yang jelas dan mendukung sangat penting bagi pelaku UMKM agar dapat beroperasi secara legal dan lebih mudah. Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan Guwosari telah bekerja sama dengan dinas terkait untuk membantu pelaku UMKM dalam mengurus perizinan usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Pemerintah Kalurahan Guwosari mengakomodir usulan dari para pelaku UMKM, termasuk dalam hal kemudahan perizinan usaha. Pemerintah Kalurahan memastikan bahwa pelaku UMKM dapat dengan mudah mengurus NIB dan sertifikasi lain yang diperlukan untuk operasional yang legal. Di samping itu, penataan sarana dan prasarana untuk pengembangan UMKM dilaksanakan melalui penganggaran yang disediakan

di APBKal, untuk memastikan adanya ruang usaha yang layak bagi pelaku UMKM, seperti penyediaan lokasi untuk bazar dan acara lainnya. Strategi yang direncanakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk pengembangan UMKM dilaksanakan dengan dukungan dari BamusKal yang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana.

3. Strategi Konstituen

Pemerintah Kalurahan melibatkan UMKM dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pengembangan UMKM. Pemerintah Kalurahan Guwosari sudah menjalankan strategi konstituen untuk mendukung pengembangan UMKM, seperti yang diungkapkan oleh Umar Wanto selaku Ulu-Ulu di Kalurahan Guwosari bahwa :

“Strategi yang kami jalankan bukan hanya sebatas pendampingan, tetapi juga melibatkan pelaku UMKM secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengembangan UMKM. Kami berupaya menciptakan mekanisme komunikasi yang terbuka dan teratur agar suara mereka bisa didengar dan menjadi bagian dari kebijakan yang kami susun. Dengan cara ini, pelaku UMKM tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pembangunan ekonomi di Kalurahan Guwosari.” (Wawancara Umar Wanto, 31 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Umar Wanto selaku Ulu-Ulu, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan Guwosari menerapkan strategi konstituen dengan melibatkan pelaku UMKM secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengembangan UMKM. Pemerintah Kalurahan tidak hanya melakukan pendampingan, tetapi juga membangun mekanisme komunikasi yang terbuka dan teratur agar aspirasi dan kebutuhan pelaku UMKM dapat tersampaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjadikan pelaku UMKM sebagai

mitra strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, sehingga kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Ada pula pendapat yang disampaikan oleh Nur Hidayad selaku Carik bahwa pemerintah kalurahan itu sudah merealisasikan tugasnya dengan menjalankan strategi konstituen untuk pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari. Seperti pada kutipan di bawah ini :

“Kami selalu melibatkan pelaku UMKM dalam perencanaan serta pengambilan keputusan terkait kebijakan pengembangan UMKM. Pelaku UMKM diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka melalui musyawarah kalurahan. Kami juga rutin melakukan komunikasi dan koordinasi dengan ketua UMKM agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan melibatkan langsung pelaku UMKM, kami berupaya memastikan bahwa setiap langkah pengembangan UMKM mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari mereka”. (Wawancara Nur Hidayad, 05 Februari 2025).

Dari hasil wawancara dengan Nur Hidayad selaku Carik, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan Guwosari menerapkan strategi konstituen dengan melibatkan pelaku UMKM secara aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pengembangan UMKM. Pelaku UMKM diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka melalui musyawarah kalurahan, serta adanya komunikasi dan koordinasi yang rutin antara pemerintah dan perwakilan UMKM. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelaku UMKM, sehingga tercipta partisipasi yang aktif dan kolaboratif dalam pembangunan ekonomi kalurahan.

Selanjutnya Muhaimin selaku Ketua Bamuskal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) di Kalurahan Guwosari menyatakan bahwa pemerintah kalurahan sudah merealisasikan tugasnya dengan menjalankan

strategi konstituen untuk pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari.

Lebih lanjutnya dinyatakan pada kutipan di bawah ini:

“Kami di Pemerintah Kalurahan Guwosari selalu melibatkan pelaku UMKM dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pengembangan UMKM. Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan seperti Desa Preneur dan Desa Prima, serta saat menerima kunjungan dari berbagai pihak, kami pastikan pelaku UMKM terlibat secara aktif. Kami dari BamusKal berperan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan merupakan keputusan bersama dengan pelaku UMKM, sehingga aspirasi dan kebutuhan mereka benar-benar didengar dan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan”. (Wawancara Muhaimin, 04 Februari 2025).

Dari hasil wawancara bersama Muhaimin selaku ketua Bamuskal, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan Guwosari melalui BamusKal secara konsisten menerapkan strategi konstituen dengan melibatkan pelaku UMKM secara aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan pengembangan UMKM. Pelibatan ini juga tercermin dalam berbagai kegiatan desa seperti Desa Preneur dan Desa Prima, serta dalam interaksi dengan pihak luar, sehingga memastikan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah kalurahan untuk menjadikan pelaku UMKM sebagai mitra strategis dalam pembangunan desa.

Hal ini juga terkonfirmasi oleh Sumaryadi selaku pelaku UMKM di kelompok Desa Preneur yang mengatakan bahwa :

“Strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Kalurahan sudah berjalan dengan baik. Kami sebagai pelaku UMKM selalu dilibatkan dalam proses perencanaan pengembangan UMKM. Pemerintah kalurahan rutin mengadakan pertemuan untuk mendengarkan masukan dari kami, sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan kami. Kami juga selalu mendapat informasi secara langsung terkait rencana-rencana yang akan dijalankan, sehingga kami merasa dilibatkan dan dihargai dalam setiap proses pengambilan keputusan”. (Wawancara Sumaryadi, 31 Januari 2025).

Dari hasil wawancara bersama Sumaryadi selaku pelaku UMKM, maka dapat diketahui bahwa pelaku UMKM di Kalurahan Guwosari merasa dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan pengembangan UMKM oleh Pemerintah Kalurahan. Pemerintah rutin mengadakan pertemuan untuk mendengarkan masukan dan aspirasi pelaku UMKM, sehingga kebijakan yang dibuat dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Pelaku UMKM juga selalu mendapatkan informasi terkait rencana kebijakan, sehingga mereka merasa dihargai dan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan.

Adapun pernyataan dari Tri selaku pelaku UMKM di kelompok desa Preneur yang mengatakan bahwa :

“Pemerintah Kalurahan memberi ruang bagi kami pelaku UMKM untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan usaha. Sebelum mengambil keputusan, pemerintah selalu mengadakan pertemuan yang melibatkan kami melalui ketua UMKM, sehingga kami dapat menyampaikan masukan tentang apa yang benar-benar kami butuhkan. Meskipun saya pribadi tidak selalu aktif mengikuti setiap kegiatan, ketika saya berpartisipasi saya merasakan manfaatnya bagi pengembangan usaha saya”. (Wawancara Tri, 07 Februari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Tri selaku pelaku UMKM, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan memberikan ruang dan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan usaha mereka. Melalui mekanisme pertemuan yang melibatkan perwakilan UMKM, aspirasi dan kebutuhan pelaku UMKM dapat disampaikan secara langsung sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kondisi dan harapan mereka. Meskipun tingkat partisipasi pelaku UMKM bervariasi, keterlibatan tersebut memberikan manfaat nyata dalam mendukung pengembangan usaha mereka.

Dari berbagai pernyataan wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam menjalankan program mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kalurahan Guvosari telah menerapkan strategi konstituen. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Guvosari tidak hanya sebatas pendampingan, tetapi juga melibatkan para pelaku UMKM dalam setiap tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pengembangan UMKM. Komunikasi yang intens dilakukan untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, meskipun masih ada beberapa pelaku UMKM yang tidak selalu aktif mengikuti. Dalam kegiatan Desa Preneur, Dinas KUKMP DIY turut mendampingi para pelaku UMKM untuk memberikan ruang bagi mereka. Komunikasi dan koordinasi dilakukan secara teratur melalui ketua UMKM. Pemerintah Kalurahan didukung BamusKal memastikan semuanya berjalan dengan baik dan merupakan hasil dari suara atau keputusan bersama dengan para pelaku UMKM.

Beberapa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Guvosari diantaranya terdapat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.1 Pelatihan Desa Preneur Tahap Pengembangan



(Sumber :Profil Kalurahan Guvosari, tahun 2024)

Gambar di atas adalah Pelatihan Desa Preneur tahap pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Guvosari melalui kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan para pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka.

Gambar 3.2 Pengadaan Bazar oleh Pelaku UMKM



(Sumber :Profil Kalurahan Guvosari, tahun 2024)

Gambar di atas adalah pengadaan bazar yang dilakukan oleh pelaku UMKM yang di dukung dan difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan Guwosari. Kegiatan ini dilakukan pada saat ada kunjungan dari luar. Kegiatan ini bertujuan untuk memamerkan dan menjual produk-produk UMKM.

B. Program Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Guwosari

Program merupakan sebuah konsep yang mengacu pada serangkaian kegiatan atau langkah yang direncanakan secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dalam arti luas, program dapat diartikan sebagai mekanisme atau alat yang digunakan oleh organisasi untuk mewujudkan visi dan misinya melalui implementasi berbagai aktivitas yang berkesinambungan dan berorientasi hasil. (Sari & Putra, 2021).

UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia yang mengalami perkembangan yang bagus dari waktu ke waktu. Para pelaku UMKM pun menghasilkan jenis produk yang beragam. UMKM menjadi salah satu terobosan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, untuk mengembangkan UMKM yang lebih maju dibutuhkan peran dari pemerintah kalurahan agar UMKM di Kalurahan Guwosari terus berkembang menjadi lebih baik.

Di Kalurahan Guwosari saat ini pengembangan UMKM sudah berjalan dengan sangat baik. Dari tahun ke tahun pengembangan UMKM semakin meningkat sehingga perekonomian masyarakat juga berpengaruh baik. Hal ini

dikarenakan pemerintah kalurahan menjalankan program-program sesuai dengan yang direncanakan dan tujuan pembuatan program-program tersebut tentunya untuk meningkatkan pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari. Program yang dijalankan oleh Pemerintah Kalurahan itu seperti pelatihan *branding* produk, pelatihan *marketing digital*.

Berkaitan dengan program pengembangan UMKM, Umar Wanto selaku Ulu-Ulu mengatakan bahwa:

“Dalam pengembangan UMKM, kami di pemerintah kalurahan memiliki program yang mengusung slogan ‘*menjajani konco, menglarisi tonggo*’, yang artinya membeli dari teman dan melarisi atau membantu tetangga. Program ini diharapkan bisa menjadi jargon yang mengakar di masyarakat dan di lingkungan pemerintah kalurahan, agar sebisa mungkin menggunakan dan mengutamakan produk lokal. Kami juga menjalankan program kerja sama dengan pelaku UMKM dalam pemenuhan berbagai kebutuhan kegiatan seperti rapat dan pelatihan. Selain itu, kami juga menjalin sinergi dengan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), di mana UMKM menjadi bagian dari binaan BUMDES. Sebagai bagian dari program promosi dan pengembangan, kami rutin menampilkan produk-produk UMKM dalam berbagai event, baik yang berskala daerah, acara budaya, maupun kegiatan wisata. Dengan begitu, produk lokal semakin dikenal luas dan UMKM bisa terus berkembang”. (Wawancara Umar Wanto, 31 Januari 2025).

Dari hasil wawancara bersama Umar Wanto selaku Ulu-Ulu, maka dapat diketahui bahwa pemerintah kalurahan memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan program pengembangan UMKM di tingkat lokal. Melalui slogan “*menjajani konco, menglarisi tonggo*” yang berarti membeli dari teman dan melarisi tetangga, pemerintah kalurahan mendorong masyarakat untuk saling mendukung dalam aktivitas ekonomi dengan mengutamakan produk-produk lokal. Program-program yang dijalankan tidak hanya bersifat promotif, tetapi juga melibatkan kemitraan strategis, seperti kerja sama dengan pelaku UMKM dalam penyediaan kebutuhan kegiatan pemerintah. Pemerintah kalurahan juga menggandeng BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) sebagai

mitra pembinaan dan penguatan kapasitas pelaku UMKM. Sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan pasar, produk-produk UMKM secara aktif dipromosikan dalam berbagai *event*, baik berskala daerah, kegiatan budaya, maupun wisata. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah kalurahan berupaya menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang kuat, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi kalurahan sendiri.

Selanjutnya pernyataan dari Nur Hidayad selaku Carik yang mengatakan bahwa :

“Untuk mendukung pengembangan UMKM, pemerintah Kalurahan Guwosari telah menjalankan berbagai program. Dari sisi barang, program kami mencakup pemberian hibah alat produksi dan peralatan pendukung usaha, serta penyediaan ruang usaha seperti lokasi bazar dan pameran. Dari sisi jasa, kami juga menjalankan program pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, dan promosi produk melalui media *digital* maupun kegiatan pameran. Melalui program-program ini, terdapat peningkatan baik dari jenis produk yang dihasilkan maupun jumlah pelaku UMKM. Produk-produk yang berkembang di antaranya kuliner, kerajinan/*craft*, *fashion*, batik kayu, dan wayang kulit. Selain itu, kami juga menjalankan program komunikasi dan kolaborasi melalui forum komunikasi antar UMKM yang tergabung dalam Dekranas. Forum ini kami jadikan sebagai wadah untuk bertemu dan berdialog dengan pelaku UMKM di Kalurahan Guwosari. Tujuannya agar mereka bisa terlibat secara langsung dalam penyusunan maupun pelaksanaan program-program yang ada. Dalam pengembangan UMKM, kami percaya bahwa partisipasi pelaku usaha sangat penting agar program yang kami jalankan benar-benar sesuai kebutuhan dan mampu mendorong kemajuan UMKM“. (Wawancara Nur Hidayad, 05 Februari 2025).

Dari hasil wawancara bersama Nur Hidayad selaku Carik, maka dapat diketahui bahwa dari berbagai program yang dijalankan, Pemerintah Kalurahan Guwosari menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan UMKM secara menyeluruh. Program-program yang dijalankan mencakup bantuan dalam bentuk barang seperti hibah alat produksi, peralatan usaha, serta penyediaan ruang usaha berupa lokasi bazar dan pameran. Dari sisi jasa, pemerintah kalurahan juga melaksanakan program pendampingan

usaha, pelatihan keterampilan, serta promosi produk melalui media *digital* dan kegiatan pameran. Selain itu, dari berbagai upaya tersebut terlihat bahwa pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah pelaku usaha maupun ragam produk yang dihasilkan, seperti kuliner, kerajinan tangan, *fashion*, batik kayu, dan wayang kulit. Pemerintah kalurahan juga mendorong partisipasi aktif pelaku UMKM melalui forum komunikasi yang tergabung dalam Dekranas, sebagai ruang bersama untuk menyampaikan aspirasi serta merespon program-program yang disusun. Hal ini menunjukkan bahwa program pengembangan UMKM yang dijalankan bersifat partisipatif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat pelaku usaha.

Ada pula pendapat yang disampaikan oleh Muhaimin selaku Ketua Bamuskal yang mengatakan bahwa Pemerintah Kalurahan Guwosari sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai rencana dalam hal pengembangan UMKM. Kami sebagai Bamuskal tentunya ikut mendukung. Lebih lanjutnya dinyatakan pada kutipan di bawah ini :

“Pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari saat ini menunjukkan kemajuan yang sangat baik. Dulu UMKM belum terkoordinasi dengan baik, namun sekarang sudah lebih terorganisir melalui program-program yang dijalankan oleh pemerintah kalurahan, sehingga memudahkan dalam hal komunikasi dan pelibatan pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan. Melalui program tersebut, kami bisa memberikan akses dan kesempatan kepada para pelaku UMKM untuk tampil saat ada kunjungan atau *event*. Cukup menghubungi koordinator, mereka bisa mempersiapkan tim untuk menampilkan berbagai produk seperti makanan, kesenian, dan *fashion*. Ini jauh lebih tertata dibandingkan kondisi sebelumnya. Meski demikian, masih ada beberapa pelaku UMKM yang belum siap berkembang karena belum mau mengubah pola pikir atau *mindset*, sehingga belum bisa sepenuhnya terlibat dalam program-program yang ada. Namun secara umum, program-program dari Pemerintah Kalurahan sangat mendukung kemajuan UMKM. Beberapa bentuk dukungan dalam program tersebut antara lain berupa bantuan peralatan usaha, seperti peralatan ternak atau peralatan *catering*, serta penyelenggaraan pelatihan pemasaran. Hanya saja, tidak semua pelaku UMKM bisa langsung menyesuaikan, terutama karena masih ada yang belum

familiar dengan *teknologi digital*. Banyak di antara mereka yang hanya menggunakan ponsel sebatas untuk *WhatsApp*, sehingga untuk membuat konten promosi *digital* masih menjadi tantangan.” (Wawancara Muhaimin, 04 Februari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Muhaimin selaku Ketua Bamuskal, maka dapat diketahui bahwa berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah kalurahan telah berhasil menciptakan sistem koordinasi yang lebih tertata, sehingga pelaku UMKM lebih mudah dilibatkan dalam berbagai kegiatan, termasuk saat ada kunjungan tamu atau *event-event* tertentu. Produk-produk seperti makanan, kesenian, dan *fashion* menjadi bagian dari representasi UMKM dalam berbagai kesempatan tersebut. Pemerintah kalurahan juga melaksanakan program dukungan teknis, seperti pemberian bantuan peralatan usaha serta pelatihan pemasaran. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemui tantangan, terutama dalam hal adopsi teknologi *digital* oleh pelaku UMKM yang belum semuanya melek *digital*, khususnya pelaku usaha dari kalangan orang tua. Selain itu, keberhasilan program pengembangan UMKM juga sangat dipengaruhi oleh pola pikir pelaku usahanya. Beberapa di antaranya masih enggan berubah atau kurang terbuka terhadap pembaruan, sehingga belum dapat berkembang secara maksimal bersama program yang telah dirancang pemerintah kalurahan.

Kemudian pendapat yang disampaikan oleh Sumaryadi selaku pelaku UMKM di kelompok Desa Preneur yang mengatakan bahwa Pemerintah Kalurahan Guwosari sudah menjalankan tugasnya dengan baik khususnya dalam hal pengembangan UMKM. Lebih lanjutnya dinyatakan pada kutipan di bawah ini :

“Saat ini, pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari menunjukkan kemajuan melalui berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah kalurahan. Di bidang pemasaran, ada program pendampingan yang dilakukan oleh Desa Preneur dan Desa Prima secara maksimal untuk membantu para pelaku UMKM. Sebagai bagian dari program pemasaran produk, kami memanfaatkan berbagai *platform digital* seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, serta *website* resmi Kalurahan Guwosari. Melalui *website* resmi tersebut, produk-produk UMKM dimasukkan ke dalam katalog khusus sehingga pengunjung situs dapat dengan mudah mengetahui dan membeli produk yang ditawarkan. Selain program pemasaran *digital*, pemerintah kalurahan juga menyelenggarakan program pelatihan langsung, seperti pelatihan pembuatan keripik dan makanan tradisional lainnya. Saat ini juga mulai dikembangkan program promosi melalui iklan *online* yang menarik, seperti video pendek untuk produk-produk UMKM, yang kemudian dibagikan lewat *Instagram* dan *Facebook* guna menjangkau pasar yang lebih luas”. (Wawancara Sumaryadi, 31 Januari 2025).

Dari hasil wawancara bersama Sumaryadi selaku pelaku UMKM, maka dapat diketahui bahwa pemerintah Kalurahan Guwosari telah menjalankan berbagai program yang mendukung pengembangan UMKM, khususnya di bidang pemasaran dan pelatihan. Program pendampingan melalui Desa Preneur dan Desa Prima memberikan bimbingan maksimal kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan mereka. Pemerintah kalurahan juga memanfaatkan *platform digital* seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, dan *website* resmi sebagai media pemasaran produk UMKM, dengan menyediakan katalog produk yang memudahkan konsumen dalam mencari dan membeli produk lokal. Selain itu, program pelatihan fisik juga dijalankan untuk meningkatkan keterampilan produksi, seperti pembuatan keripik dan makanan tradisional. Tidak hanya itu, program promosi melalui iklan *online* berupa video pendek turut dikembangkan agar produk UMKM bisa dikenal lebih luas di masyarakat. Dengan berbagai program ini, pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari terus mengalami kemajuan yang signifikan.

Selanjutnya pernyataan dari Eko Purwati selaku pelaku UMKM di kelompok Desa Preneur yang mengatakan bahwa Pemerintah Kalurahan sudah menjalankan beberapa program untuk mengembangkan UMKM di Kalurahan Guwosari. Lebih lanjutnya dijelaskan dalam kutipan di bawah ini :

“Pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari didukung melalui program studi tiru yang dijalankan oleh pemerintah kalurahan. Melalui program ini, kami diberikan kesempatan untuk mengunjungi UMKM-UMKM yang sudah lebih maju dan terkenal sebagai bahan pembelajaran. Beberapa tempat yang pernah kami kunjungi antara lain Desa Kemudo, Prambanan, Klaten, Pasar Blumbang Mataram, Wirokerten, Bantul, serta Desa Gondangrejo di Windusari, Magelang. Dalam program studi tiru tersebut, kami bertukar informasi dan pengalaman dengan pelaku UMKM dari daerah-daerah tersebut. Tujuan utama dari program ini adalah agar kami bisa mendapatkan ilmu dan wawasan baru yang nantinya dapat kami terapkan untuk mengembangkan UMKM di Kalurahan Guwosari agar lebih maju dan dikenal luas seperti UMKM yang kami kunjungi”. (Wawancara Eko Purwati, 07 Februari 2025).

Dari hasil wawancara bersama Eko Purwati selaku pelaku UMKM, maka dapat diketahui bahwa pemerintah Kalurahan Guwosari menjalankan program studi tiru sebagai salah satu upaya pengembangan UMKM. Melalui program ini, pelaku UMKM diberi kesempatan untuk mengunjungi dan belajar langsung dari UMKM yang sudah lebih maju dan terkenal di berbagai daerah, seperti Desa Kemudo, Prambanan, Klaten, dan beberapa lokasi lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi informasi, pengalaman, serta ilmu baru yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas dan kemajuan UMKM di Kalurahan Guwosari. Dengan adanya program studi tiru ini, diharapkan pelaku UMKM dapat mengadopsi praktik terbaik dan mengembangkan usaha mereka menjadi lebih maju dan dikenal luas.

Selanjutnya pernyataan dari Susilo selaku masyarakat di Kalurahan Guwosari yang juga merasakan dampak positif dengan adanya keberadaan

UMKM yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lebih lanjutnya dijelaskan dalam kutipan di bawah ini :

“Pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari menunjukkan kemajuan yang nyata berkat program-program yang dijalankan oleh pemerintah kalurahan. Dengan adanya program tersebut, jumlah UMKM di desa kami semakin bertambah setiap tahunnya. Program-program ini memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kuliner, pakaian tradisional, dan kerajinan, karena produk-produk UMKM lokal kini lebih mudah diakses. Karena program pengembangan UMKM ini berjalan dengan baik, kami tidak perlu lagi pergi jauh untuk mendapatkan barang-barang tersebut, cukup dengan membeli produk UMKM yang ada di kalurahan sendiri. Hal ini tentu sangat membantu dan memperkuat perekonomian lokal”. (Wawancara Susilo, 31 Januari 2025).

Dari hasil wawancara bersama Susilo selaku masyarakat, maka dapat diketahui bahwa program-program yang dijalankan oleh pemerintah Kalurahan Guwosari telah berhasil mendorong pertumbuhan UMKM di desa tersebut. Dengan semakin banyaknya UMKM yang berkembang, masyarakat menjadi lebih mudah mengakses berbagai produk lokal seperti kuliner, pakaian tradisional, dan kerajinan tanpa harus pergi ke tempat yang jauh. Hal ini menunjukkan bahwa program pengembangan UMKM yang dilaksanakan pemerintah kalurahan tidak hanya membantu pelaku usaha, tetapi juga memberikan kemudahan dan manfaat langsung bagi masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya terkait kerja sama pemerintah dengan sektor swasta untuk pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari. Lebih lanjutnya terdapat dalam kutipan berita di bawah ini :

“Pemerintah Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Bantul, menggandeng sektor swasta yaitu PT Sari Roti melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung pengembangan UMKM lokal. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah pelatihan kewirausahaan dan bantuan peralatan produksi bagi pelaku UMKM di Kalurahan Guwosari”. (Harian Jogja, 13 Juni 2023).

Dari berita di atas, maka dapat diketahui bahwa pemerintah Kalurahan Guwosari telah menjalankan program kerja sama dengan sektor swasta, khususnya melalui PT Sari Roti, dalam rangka mendukung pengembangan UMKM lokal. Program ini meliputi pelatihan kewirausahaan dan pemberian bantuan peralatan produksi kepada pelaku UMKM, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha mereka. Melalui kolaborasi ini, pemerintah kalurahan berupaya memperkuat ekosistem UMKM sehingga dapat berkembang lebih baik dan berkelanjutan.

Kemudian Pemerintah Kalurahan Guwosari juga bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan UMKM. Lebih jelasnya terdapat pada kutipan berita di bawah ini :

“Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Pemerintah Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Bantul, melaksanakan program pendampingan dan pelatihan bagi pelaku UMKM. Adapun program tersebut meliputi pelatihan *digital marketing* dan desain kemasan produk. UGM juga melibatkan mahasiswa untuk melakukan kunjungan lapangan dan asistensi langsung kepada pelaku UMKM dalam mengembangkan produk. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan kapasitas manajerial dan pemasaran UMKM agar lebih kompetitif di pasar lokal maupun nasional”. (Radar Jogja, 22 Maret 2024).

Dari berita di atas, maka dapat diketahui bahwa pemerintah Kalurahan Guwosari menjalin kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui program pendampingan dan pelatihan bagi pelaku UMKM. Program ini meliputi pelatihan *digital marketing* dan desain kemasan produk, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemasaran dan daya saing produk UMKM. Selain itu, keterlibatan mahasiswa UGM dalam kunjungan lapangan dan asistensi langsung memberikan dukungan praktis kepada pelaku UMKM dalam mengembangkan produknya. Dengan kolaborasi ini, kapasitas

manajerial dan pemasaran UMKM diharapkan semakin meningkat sehingga dapat bersaing di pasar lokal maupun nasional.

Selanjutnya terkait kerja sama pemerintah dengan lembaga keuangan untuk pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari. Lebih jelasnya terdapat dalam kutipan berita di bawah ini :

“Pemerintah Kalurahan Guwosari bekerja sama dengan Bank BRI Cabang Bantul dalam program pembiayaan mikro untuk UMKM. Melalui kemitraan ini, pelaku UMKM di Guwosari mendapatkan akses kredit dengan bunga rendah dan proses yang lebih mudah, sehingga mendukung pengembangan usaha mereka”. (Harian Jogja, 10 April 2024).

Dari berita di atas, maka dapat diketahui bahwa pemerintah Kalurahan Guwosari menjalankan program kerja sama dengan Bank BRI Cabang Bantul dalam rangka mendukung pengembangan UMKM melalui program pembiayaan mikro. Program ini memberikan kemudahan akses kredit dengan bunga rendah bagi pelaku UMKM, sehingga membantu mereka dalam mengembangkan usaha secara lebih efektif. Melalui program kemitraan ini, pemerintah kalurahan berupaya memperkuat keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM di wilayahnya.

Dari pernyataan wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan Guwosari secara aktif menjalankan berbagai program yang bertujuan mengembangkan dan memberdayakan UMKM lokal. Program-program tersebut meliputi pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, serta fasilitasi pemasaran baik secara langsung maupun melalui *platform digital* seperti media sosial dan *website* resmi kalurahan. Pemerintah kalurahan juga memberikan dukungan berupa bantuan peralatan produksi dan menyediakan ruang usaha untuk mempermudah akses pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah kalurahan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk

sektor swasta melalui program CSR PT Sari Roti, institusi pendidikan seperti Universitas Gadjah Mada, serta lembaga keuangan seperti Bank BRI, untuk memperkuat kapasitas dan pembiayaan UMKM. Melalui program studi tiru, pelaku UMKM juga mendapatkan kesempatan belajar dari daerah lain yang sudah lebih maju sehingga dapat mengadopsi praktik terbaik dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan berbagai program ini, pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari mengalami peningkatan signifikan baik dari segi jumlah pelaku usaha maupun kualitas produk yang dihasilkan. Masyarakat pun merasakan kemudahan dalam mengakses produk lokal sehingga turut memperkuat perekonomian kalurahan.

Beberapa program yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Guwosari untuk pengembangan UMKM, diantaranya terdapat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.3 Program Studi Tiru untuk Pelaku UMKM



(Sumber :Profil Kalurahan Guwosari, tahun 2024)

Gambar di atas adalah pengadaan program studi tiru untuk pelaku UMKM yang di dukung dan difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan Guwosari. Kegiatan ini dilakukan dengan mengunjungi dan belajar langsung dari UMKM yang sudah lebih maju dan terkenal di berbagai daerah. Program ini bertujuan

untuk berbagi informasi, pengalaman, serta ilmu baru yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas dan kemajuan UMKM.

Gambar 3.4 Program Pelatihan untuk UMKM



(Sumber :Profil Kalurahan Guwosari, tahun 2024)

Gambar di atas adalah pengadaan program Desa Preneur Model Blangkon yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh para pelaku UMKM yang tergabung dalam wadah Desa Preneur Guwosari, sebagai bentuk nyata komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal.

Gambar 3.5 Program Pameran UMKM



(Sumber :Profil Kalurahan Guwosari, tahun 2024

Gambar di atas adalah pengadaan program pameran UMKM di Pedukuhan Kalakijo. Acara ini menghadirkan pesta semesta, yaitu pameran UMKM dari wilayah Guwosari dengan berbagai produk seperti kerajinan tangan, makanan tradisional dan produk *fashion*. Hal ini tentu memberikan peluang promosi dan penjualan bagi pelaku UMKM setempat.

C. Anggaran Pemerintah Kalurahan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Guwosari

Anggaran adalah suatu rencana keuangan yang disusun secara terperinci dan sistematis untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran dalam periode waktu tertentu dengan tujuan agar organisasi atau institusi dapat menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien. Konsep anggaran tidak hanya sebatas dokumen administrasi biasa, melainkan menjadi alat strategis yang sangat penting dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi

keuangan organisasi, baik itu di sektor publik maupun swasta. Anggaran berfungsi sebagai pedoman operasional yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat, terutama dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk berbagai kebutuhan yang bersaing (Hidayat, 2021).

Dalam rangka mendukung kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Guwosari, peran anggaran menjadi salah satu aspek krusial yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah Kalurahan Guwosari secara aktif telah mengalokasikan dana khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) untuk mendukung berbagai program pengembangan UMKM yang berkelanjutan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah kalurahan dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal.

Anggaran pengembangan UMKM digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan strategis seperti pelatihan *branding* produk, pelatihan *digital marketing*, pelatihan manajemen usaha, serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk mendukung partisipasi pelaku UMKM dalam pameran-pameran tingkat lokal maupun regional sebagai sarana memperluas jaringan pasar. Setiap tahunnya, perencanaan anggaran dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah kalurahan yang melibatkan tokoh masyarakat, pelaku UMKM, dan lembaga kemasyarakatan kalurahan. Dengan pendekatan ini, kebutuhan riil pelaku UMKM dapat diakomodasi dan direalisasikan secara tepat sasaran.

Berkaitan dengan anggaran untuk pengembangan UMKM, Umar Wanto selaku Ulu-Ulu mengatakan bahwa:

“Dalam mendukung pengembangan UMKM tentu tidak lepas dari pengelolaan anggaran yang kami alokasikan melalui APBKal (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan) Guwosari. Kami mengakomodir berbagai usulan yang masuk dari para pelaku UMKM, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan sarana, prasarana, serta pelatihan dan kegiatan pemasaran. Semua kegiatan tersebut kami anggarkan secara khusus agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan mereka di lapangan. Kami juga secara rutin melakukan koordinasi dan komunikasi dengan ketua UMKM untuk memastikan anggaran yang direncanakan tepat sasaran. Selain itu, kegiatan seperti pelatihan, workshop, dan pameran juga masuk dalam perencanaan anggaran tahunan. Untuk memperkuat pelaksanaan program, kami bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dekranas Kapanewon, Dekranas Kabupaten, hingga Dekranas DIY, serta menggandeng perguruan tinggi yang memiliki fokus pada pengembangan UMKM. Semua bentuk kerja sama ini tentu juga didukung oleh alokasi anggaran yang sudah kami siapkan melalui APBKal”. (Wawancara Umar Wanto, 31 Januari 2025).

Dari hasil wawancara bersama Umar Wanto selaku Ulu-Ulu, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan Guwosari telah mengelola dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengembangan UMKM. Melalui APBKal, pemerintah kalurahan secara aktif menganggarkan berbagai kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM, seperti penyediaan sarana dan prasarana, pelatihan, serta kegiatan promosi dan pemasaran melalui pameran. Pemerintah kalurahan juga menerapkan pendekatan partisipatif dengan cara menampung usulan-usulan dari pelaku UMKM dan menjadikannya dasar dalam perencanaan program. Koordinasi dan komunikasi secara rutin dengan ketua UMKM menjadi langkah penting agar pengelolaan anggaran berjalan tepat sasaran dan efektif. Selain itu, pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari juga diperkuat melalui kerja sama dengan berbagai pihak eksternal, seperti Dekranas di tingkat Kapanewon, Kabupaten, maupun Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta dengan sejumlah perguruan tinggi

yang memiliki visi dan program yang sejalan dalam pemberdayaan UMKM. Semua langkah tersebut tidak lepas dari dukungan anggaran yang terstruktur dan terencana dalam APBKal Guwosari sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Selanjutnya pernyataan dari Nur Hidayad selaku Carik yang mengatakan bahwa :

“Anggaran yang kami sediakan melalui APBKal digunakan untuk kegiatan pendampingan kepada teman-teman pelaku UMKM, termasuk bekerja sama dengan Dinas KUKMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam program *Desa Preneur*. Melalui program tersebut, para pelaku UMKM mendapatkan pelatihan terkait *branding* produk, teknik foto produk, pengemasan (*packaging*), serta pengelolaan keuangan. Salah satu masalah yang sering dihadapi pelaku UMKM adalah pencampuran antara uang usaha dan uang pribadi, sehingga pelatihan pengelolaan keuangan menjadi sangat penting dan memang sudah kami anggarkan secara khusus. Selain itu, kami juga mengalokasikan anggaran untuk memberi ruang promosi kepada pelaku UMKM dalam berbagai kesempatan, seperti saat ada kunjungan dari desa lain, OPD, maupun instansi pemerintah. Tidak hanya pemasaran secara langsung, kami juga telah menggunakan anggaran untuk mendukung pemasaran secara *online* agar produk UMKM Guwosari bisa menjangkau pasar yang lebih luas“. (Wawancara Nur Hidayad, 05 Februari 2025).

Dari hasil wawancara bersama Nur Hidayad selaku Carik, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan Guwosari telah mengalokasikan anggaran khusus melalui APBKal untuk mendukung berbagai kegiatan pengembangan UMKM. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai program pelatihan yang bekerja sama dengan Dinas KUKMP Provinsi DIY melalui program *Desa Preneur*, yang mencakup pelatihan *branding* produk, foto produk, pengemasan, serta pengelolaan keuangan yang menjadi tantangan umum bagi pelaku UMKM. Pemerintah kalurahan juga mengalokasikan dana untuk mendukung kegiatan promosi dan pemasaran produk UMKM, baik secara langsung melalui bazar yang diselenggarakan saat menerima kunjungan

dari berbagai pihak, maupun secara *digital* melalui *platform online*. Dalam kegiatan bazar tersebut, pelaku UMKM dilatih untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam menjual produk, serta kemampuan dalam mempresentasikan produknya kepada calon konsumen.

Ada pula pendapat yang disampaikan oleh Muhaimin selaku Ketua Bamuskal yang mengatakan bahwa Pemerintah Kalurahan Guwosari sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai rencana dalam hal pengembangan UMKM. Kami sebagai Bamuskal tentunya ikut mendukung. Lebih lanjutnya dinyatakan pada kutipan di bawah ini :

“Pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari saat ini menunjukkan kemajuan yang sangat baik. Dulu UMKM belum terkoordinasi dengan baik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan anggaran yang dialokasikan melalui APBKal. Dengan adanya anggaran tersebut, komunikasi dan pelibatan pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan menjadi lebih mudah dan terstruktur. Melalui program yang didanai dari anggaran tersebut, para pelaku UMKM mendapat akses dan kesempatan untuk tampil dalam berbagai *event* atau saat ada kunjungan dari pihak luar. Cukup dengan menghubungi koordinator UMKM, mereka bisa langsung mempersiapkan tim untuk menampilkan produk-produk unggulan seperti makanan, kerajinan seni, dan *fashion*. Semuanya kini lebih tertata dibandingkan kondisi sebelumnya. Pemerintah Kalurahan juga telah menganggarkan berbagai bentuk dukungan, seperti bantuan peralatan usaha misalnya untuk ternak atau perlengkapan *catering* dan juga pelatihan pemasaran” (Wawancara Muhaimin, 04 Februari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Muhaimin selaku Ketua Bamuskal, maka dapat diketahui bahwa Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari mengalami kemajuan berkat dukungan dari program-program pemerintah kalurahan yang didanai melalui anggaran APBKal. Salah satu dampak positif dari pengelolaan anggaran ini adalah semakin terorganisirnya pelaku UMKM, sehingga memudahkan koordinasi dan pelibatan mereka dalam berbagai kegiatan, seperti *event*, kunjungan, maupun bazar. Melalui alokasi anggaran

yang tepat, Pemerintah Kalurahan Guwosari mampu memberikan akses dan ruang kepada pelaku UMKM untuk menampilkan produk-produk unggulan mereka, seperti makanan, kesenian, dan *fashion*. Selain itu, bentuk dukungan lainnya juga diwujudkan melalui pemberian bantuan peralatan usaha serta pelatihan di bidang pemasaran. Namun demikian, Muhaimin juga menyoroti adanya tantangan di lapangan, yakni belum semua pelaku UMKM siap untuk berkembang karena kendala pola pikir dan keterbatasan dalam penguasaan teknologi. Meskipun pelatihan *digital marketing* telah difasilitasi dan dianggarkan, masih banyak pelaku UMKM yang belum familiar dengan penggunaan media *digital* untuk promosi.

Kemudian pendapat yang disampaikan oleh Sumaryadi selaku pelaku UMKM di kelompok Desa Preneur yang mengatakan bahwa Pemerintah Kalurahan Guwosari sudah menjalankan tugasnya khususnya dalam pengembangan UMKM. Lebih lanjutnya pada kutipan di bawah ini :

“Saat ini, pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari menunjukkan kemajuan yang cukup pesat melalui berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah kalurahan. Program-program tersebut tentu tidak lepas dari dukungan anggaran yang dialokasikan melalui APBDkal. Anggaran ini menjadi dasar untuk menjalankan berbagai kegiatan pendampingan dan penguatan kapasitas pelaku UMKM, khususnya di bidang pemasaran. Salah satu bentuk pemanfaatan anggaran adalah dalam program pendampingan oleh *Desa Preneur* dan *Desa Prima*, yang berjalan cukup maksimal untuk membantu para pelaku UMKM meningkatkan daya saing produk mereka”. (Wawancara Sumaryadi, 31 Januari 2025).

Dari hasil wawancara bersama Sumaryadi selaku pelaku UMKM, maka dapat diketahui bahwa UMKM di Kalurahan Guwosari mengalami kemajuan yang signifikan berkat dukungan program-program yang dijalankan oleh pemerintah kalurahan dan didukung oleh alokasi anggaran melalui APBDkal. Anggaran tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung

berbagai kegiatan pendampingan, pelatihan, serta promosi produk UMKM, khususnya di bidang pemasaran. Pendampingan kepada pelaku UMKM dilakukan melalui program *Desa Preneur* dan *Desa Prima*, yang secara intensif membantu dalam peningkatan kemampuan pemasaran produk.

Selanjutnya pernyataan dari Eko Purwati selaku pelaku UMKM di kelompok Desa Preneur yang mengatakan bahwa :

“Pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari didukung melalui program studi tiru yang dijalankan oleh pemerintah kalurahan dengan alokasi anggaran khusus dari APBKal. Melalui anggaran tersebut, kami diberikan kesempatan untuk mengunjungi UMKM-UMKM yang sudah lebih maju dan terkenal sebagai bahan pembelajaran. Beberapa tempat yang pernah kami kunjungi antara lain Desa Kemudo, Prambanan, Klaten, Pasar Blumbang Mataram, Wirokerten Bantul, serta Desa Gondangrejo di Windusari, Magelang. Dalam program studi tiru ini, yang didanai melalui anggaran kalurahan, kami dapat bertukar informasi dan pengalaman langsung dengan pelaku UMKM dari daerah-daerah tersebut”. (Wawancara Eko Purwati, 07 Februari 2025).

Dari hasil wawancara bersama Eko Purwati selaku pelaku UMKM, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan Guwosari secara aktif mengalokasikan anggaran melalui APBKal untuk mendukung program studi tiru sebagai salah satu upaya pengembangan UMKM. Melalui program ini, pelaku UMKM diberikan kesempatan belajar langsung dengan mengunjungi berbagai UMKM yang sudah lebih maju dan sukses di beberapa daerah seperti Desa Kemudo, Prambanan, Klaten, Pasar Blumbang Mataram, Wirokerten Bantul, dan Desa Gondangrejo di Windusari, Magelang. Program studi tiru yang didukung oleh anggaran kalurahan ini memungkinkan pelaku UMKM untuk bertukar informasi, pengalaman, dan wawasan baru yang sangat berguna untuk diterapkan dalam pengembangan usaha mereka di Kalurahan Guwosari.

Selanjutnya pernyataan dari Susilo selaku masyarakat di Kalurahan Guwosari mengatakan bahwa :

“Pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari menunjukkan kemajuan yang nyata berkat berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah kalurahan dan didukung oleh anggaran yang dialokasikan melalui APBKal. Dengan adanya anggaran tersebut, program-program pengembangan UMKM dapat berjalan lancar dan berkelanjutan sehingga jumlah UMKM di desa kami semakin bertambah setiap tahunnya”. (Wawancara Susilo, 31 Januari 2025).

Dari hasil wawancara bersama Susilo selaku masyarakat, maka dapat diketahui bahwa program-program yang dijalankan oleh pemerintah Kalurahan Guwosari telah berhasil mendorong pertumbuhan UMKM di desa tersebut. Dengan semakin banyaknya UMKM yang berkembang, masyarakat menjadi lebih mudah mengakses berbagai produk lokal seperti kuliner, pakaian tradisional, dan kerajinan tanpa harus pergi ke tempat yang jauh. Hal ini menunjukkan bahwa program pengembangan UMKM yang dilaksanakan pemerintah kalurahan tidak hanya membantu pelaku usaha, tetapi juga memberikan kemudahan dan manfaat langsung bagi masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari berbagai pernyataan wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa pemerintah kalurahan secara konsisten mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) untuk mendukung berbagai program pemberdayaan pelaku UMKM. Anggaran tersebut menjadi dasar penting bagi terlaksananya berbagai kegiatan mulai dari pelatihan *branding* dan pemasaran *digital*, pendampingan usaha, penyediaan peralatan usaha, hingga pelaksanaan studi tiru untuk menimba ilmu dari UMKM yang sudah lebih maju di daerah lain. Melalui anggaran yang terencana dan tepat sasaran, pemerintah kalurahan mampu memfasilitasi pelaku UMKM untuk

meningkatkan kapasitas mereka, baik dalam hal pengelolaan produk, pemasaran secara langsung maupun digital, serta pengembangan mental dan kemampuan berjualan. Program-program yang didukung anggaran tersebut juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memamerkan produk dalam berbagai *event*, bazar, dan melalui media digital seperti *website* dan media sosial, sehingga pasar yang dapat dijangkau semakin luas. Meski demikian, dari hasil wawancara juga terlihat bahwa tantangan tetap ada, terutama terkait kesiapan pelaku UMKM dalam mengadopsi teknologi *digital* dan perubahan pola pikir yang mendukung perkembangan usaha.

Berikut adalah rincian anggaran dari Pemerintah Kalurahan untuk UMKM di Kalurahan Guwosari :

Tabel 3.1 Rincian Anggaran UMKM Tahun 2024

No	Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran	Uraian
1	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (PK. KAMITUWA)	Dana Desa	Rp1.500.000	Belanja konsumsi (makan/minum) untuk pengiriman peserta <i>stand</i> UMKM
2	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa (PK. ULU-ULU) Makan/minum pendampingan UMKM	Dana Desa	Rp4.500.000	Makan/minum pendampingan UMKM
		Dana Desa	Rp1.200.000	Honorarium tenaga ahli/narasumber pendampingan UMKM
		Dana Desa	Rp2.000.000	Transportasi bazar pendampingan UMKM
		Dana Desa	Rp4.000.000	Honor pelaku seni pendampingan UMKM
		Dana	Rp500.000	Honor penunggu stand

		Desa		pameran UMKM
		Dana Desa	Rp6.000.000	Dekorasi pameran UMKM
		Dana Desa	Rp2.500.000	Sewa kendaraan pendampingan UMKM
		Dana Desa	Rp4.000.000	Sewa sound system pendampingan UMKM
		Dana Desa	Rp2.500.000	Tenda pameran UMKM
		Dana Desa	Rp500.000	Cetak dan penggandaan materi pendampingan UMKM

(Sumber :Guwosari.sides.id, tahun 2024)

Berdasarkan data yang ada pada tabel, maka dapat diketahui bahwa anggaran UMKM di Kalurahan Guwosari sebagian besar bersumber dari Dana Desa (DDS) dan digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional seperti konsumsi peserta, honorarium tenaga ahli dan pelaku seni, transportasi, dekorasi, serta penyewaan fasilitas pendukung seperti kendaraan, *sound system*, dan tenda pameran. Selain itu, terdapat anggaran khusus sebesar Rp100.000.000 dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pembangunan fasilitas *Meeting Room* dan Saung UMKM di kawasan DAIS Wisata.

Selain itu, terdapat anggaran pembangunan *Meeting Room* dan Saung UMKM (DAIS Wisata) dengan rincian :

Anggaran : Rp100.000.000

Sumber Dana : Bantuan Keuangan APBD Provinsi dan Kota

Pelaksanaan : 1 September-10 Oktober 2024

Sebagai bagian dari upaya pengembangan fasilitas pendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kapasitas destinasi wisata lokal, dialokasikan anggaran sebesar Rp100.000.000 untuk pembangunan *Meeting Room* dan Saung UMKM (DAIS Wisata). Anggaran ini bersumber dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi dan Kota, yang menunjukkan sinergi

antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan berlangsung mulai tanggal 1 September hingga 10 Oktober 2024. Dalam kurun waktu tersebut, pembangunan akan difokuskan pada penyediaan fasilitas yang representatif untuk rapat, koordinasi, serta ruang promosi dan pemasaran produk UMKM melalui konsep saung wisata.

Hasil Observasi Peneliti :

Berdasarkan hasil observasi peneliti, Pemerintah Kalurahan Guwosari masih kurang memberikan perhatian yang merata kepada pelaku UMKM di wilayahnya. Meskipun Pemerintah Kalurahan sudah ada upaya untuk UMKM, terlihat dari alokasi anggaran yang relatif terbatas dan penggunaan dana yang lebih banyak diarahkan pada kegiatan konsumsi pendampingan serta fasilitas pendukung pameran UMKM, dibandingkan langsung pada pengembangan kapasitas pelaku UMKM itu sendiri.

Dari anggaran yang ada, sebagian besar dana desa digunakan untuk biaya konsumsi seperti makan dan minum selama pendampingan UMKM, serta honorarium tenaga ahli, transportasi, dekorasi pameran, dan sewa perlengkapan pendukung seperti tenda dan *sound system*. Misalnya, dana sebesar Rp 1.500.000 digunakan untuk konsumsi pengiriman peserta stand UMKM, dan total dana untuk konsumsi dan honorarium pendampingan UMKM mencapai lebih dari Rp 12 juta. Sementara itu, alokasi untuk program yang bersifat pemberdayaan langsung, seperti pelatihan, peningkatan kapasitas usaha, atau penyediaan sarana produksi yang nyata, kurang menonjol dalam rincian anggaran ini.

Selain itu, hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM mendapatkan pendampingan atau dukungan dari pemerintah Kelurahan secara langsung. Beberapa pelaku UMKM tetap menjalankan usaha secara mandiri tanpa intervensi atau bantuan dari program-program pemerintah. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam penyebaran manfaat program pengembangan UMKM.

Anggaran, efektivitas program tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dari segi pemerataan dukungan kepada pelaku UMKM yang ada. Pemerintah Kelurahan perlu memperhatikan bahwa pengembangan UMKM bukan hanya soal pelaksanaan acara atau pameran, tetapi juga perlu alokasi anggaran yang lebih fokus pada peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha secara nyata agar UMKM dapat tumbuh mandiri dan berdaya saing.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan secara mandiri dalam skala kecil, baik itu oleh kelompok masyarakat, keluarga, maupun perorangan. UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Para pelaku bisnisnya menghasilkan produk-produk yang beragam. UMKM menjadi salah satu terobosan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat guna mencapai kesejahteraan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian terkait Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kalurahan Guwosari telah efektif menjalankan tiga strategi yang mendukung pelaku UMKM di Kalurahan Guwosari. Strategi distributif dilakukan dengan pendampingan dan fasilitasi promosi serta pelatihan, strategi regulatif dilakukan melalui penyusunan aturan pendukung dan bantuan legalitas usaha. Strategi konstituen diterapkan dengan melibatkan pelaku UMKM dalam perencanaan dan evaluasi secara partisipatif. Namun, implementasi strategi ini belum merata, sehingga masih terdapat pelaku UMKM yang belum mendapatkan pendampingan atau dukungan secara langsung dari pemerintah kalurahan.

2. Pemerintah Kalurahan Guwosari secara aktif menjalankan berbagai program yang terarah untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayahnya. Melalui pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, fasilitasi pemasaran *digital*, hingga pemberian bantuan peralatan dan penyediaan ruang usaha. Selain itu, pemerintah kalurahan menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta, institusi pendidikan, dan lembaga keuangan guna memperkuat kapasitas pelaku UMKM. Program studi tiru juga dimanfaatkan sebagai sarana belajar bagi pelaku usaha untuk mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain. Program ini terbukti meningkatkan jumlah dan kualitas UMKM di Guwosari, sekaligus memperkuat perekonomian lokal melalui peningkatan akses dan konsumsi produk-produk lokal oleh masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas program tersebut perlu ditingkatkan terutama dalam hal pemerataan manfaat dan keberlanjutan dukungan agar seluruh pelaku UMKM dapat berkembang secara mandiri dan berdaya saing.
3. Pemerintah Kalurahan Guwosari secara konsisten mengalokasikan anggaran melalui APBKal, terutama yang bersumber dari Dana Desa (DDS), untuk mendukung pemberdayaan pelaku UMKM secara menyeluruh. Anggaran ini menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan seperti pelatihan, pendampingan usaha, penyediaan peralatan, serta studi tiru guna meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM lokal. Penggunaan anggaran difokuskan tidak hanya pada aspek pengembangan usaha, tetapi juga pada kebutuhan operasional seperti konsumsi peserta, honorarium tenaga ahli, transportasi, serta penyewaan fasilitas pendukung kegiatan. Pengelolaan anggaran yang terencana ini

mencerminkan komitmen pemerintah kalurahan dalam memperkuat ekosistem UMKM. Namun, pengelolaan anggaran harus lebih diarahkan pada pengembangan kapasitas dan keberlanjutan usaha UMKM secara nyata.

B. Saran

1. Strategi Pemerintah Kalurahan perlu ditingkatkan dalam hal kesinambungan dan *monitoring* pelaksanaannya. Salah satu kelemahan yang masih terlihat adalah belum meratanya pemahaman pelaku UMKM terhadap regulasi dan pentingnya keterlibatan aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah kalurahan mengintensifkan sosialisasi serta membangun forum komunikasi yang lebih rutin dan interaktif agar partisipasi pelaku UMKM semakin kuat dan strateginya bisa diimplementasikan lebih menyeluruh.
2. Program dari Pemerintah Kalurahan akan berdampak baik, dengan didukung kesiapan pelaku UMKM dalam mengadopsi teknologi *digital* dan mengubah pola pikir tradisional menuju pola usaha yang lebih modern dan adaptif. Disarankan agar pelatihan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek *mindset entrepreneurship* dan literasi *digital* secara mendalam, serta dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan nyata pelaku usaha.
3. Pengelolaan anggaran diharapkan lebih efektif karena alokasi anggaran masih menghadapi kendala dalam hal efektivitas pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan. Untuk itu, pemerintah kalurahan mulai mengintegrasikan sistem evaluasi berbasis hasil (*outcome-based budgeting*) yang tidak hanya mengukur serapan anggaran, tetapi juga

dampak langsung terhadap peningkatan kinerja UMKM. Selain itu, transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran perlu ditingkatkan guna memastikan penggunaan dana tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Alysia, V. (2021). Kajian Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui E-Peken dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Kota Surabaya: Pertumbuhan Ekonomi melalui UMKM Berbasis Digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 10-18.
- Amnesti, S. K. W., & SH, M. (2024). Teori dan Praktik. *Desain Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*, 82.
- Analia, D. (2020). Peran Stakeholder dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro Kecil di Kota Padang, Sumatera Barat. *Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri*, 9(3), 203-216.
- Arianto, B. (2020). Pengembangan UMKM digital di masa pandemi covid-19. *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis*, 6(2), 233-247.
- Arifin, Z., Noer, S., & Winanda, N. R. (2024)
- Arumsari, N. R., Lailiyah, N., & Rahayu, T. (2022). Peran Digital Marketing dalam Upaya Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi di Kelurahan Plamongansari Semarang. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)*, 11(1), 92-101.
- Candranira, A. D., & Hardjati, S. (2024). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 13(1), 73-86.
- Eko Yunanto, S. (2020). *Ilmu Pemerintahan: Anti Pada Politik, Lupa Pada Hukum, Dan Enggan Pada Administrasi*. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 1 (1), 1-23.
- Equatora, M. A., & Awi, L. M. (2021). *Teknik pengumpulan data klien*. Bitread Publishing. Ermawati, Y., & Pujianto, P. (2021). Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis PKK di Desa
- Ernaningsih, Z. (2021). Strategi Pengembangan Potensi Desa Ekowisata dan Kerajinan Perak Di Desa Pampang. *Jurnal Atma Inovasia*, 1(3), 258-264.
- Fadhil, A., & Rahman, B. (2020). Perencanaan program dalam organisasi sosial: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Manajemen Sosial Indonesia*, 15(2), 123-134.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34-46.
- Fauzi, A., & Putri, D. (2024). Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan nasional berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan dan*

Sosial Indonesia, 7(1), 45-60.

- Febriani, S., & Harmain, H. (2023). Analisis faktor penghambat dan pendukung perkembangan UMKM serta peran Dewan Pengurus Wilayah Asprindo dalam perkembangan UMKM di Sumatera Utara masa pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 1275-1290.
- Firmansyah, A., & Lestari, R. (2021). Proses penyusunan anggaran dalam organisasi publik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Publik*, 9(1), 45-60.
- Firmansyah, M., & Masrun, M. (2021). Esensi perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156-159.
- Giawa, A., & Rukoyah, R. (2024). Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kelurahan dalam Penggunaan Dana
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Hadi, S., Ijlal, A. N., Farhan, A., Amni, A. Z., Nandini, A., Tanjung, H. A., ...& Pebriani, S. (2022). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Sungai Murai Di Kelurahan Rokan, Kecamatan Rokan Iv Koto, Rokan Hulu. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Methabdi*, 2(2), 126-131.
- Hadjerah, S. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Watang Soreang Kota Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Hamdi, S., Elmiana, D. S., Maulana, I., Haromain, N., Rahmawadi, I., & Malik, F. A. (2023). Strategi Pemerintah Desa dalam Penanganan Stunting Berbasis Modal Sosial di Desa Bilebante, Lombok Tengah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18(2), 209-234.
- Hanim, L., Soponyono, E., & Maryanto, M. (2021). Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 2, No. 1, pp. 30-39).
- Hartanti, W. (2021). Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pengembangan Umkm. *Indonesian Journal of Strategic Management*, 4(1).
- Hidayat, M. (2021). Definisi dan peran anggaran dalam manajemen keuangan organisasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 78-89.
- Idayu, R., Husni, M., & Suhandi, S. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 73-85.
- Indrawati, S. (2022). Tantangan digitalisasi pelayanan publik di era globalisasi. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 123-140.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian

- ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9.
- Keistimewaan. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 46-63.
- Kholik, A., & Rahmi, D. (2023). Strategi Pengembangan UMKM Makanan dan Minuman di Kelurahan Tamansari Kota Bandung. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 133-142.
- Lestari, N., & Hidayat, R. (2023). Manajemen bencana dan peran pemerintah dalam penanggulangan krisis. *Jurnal Kebencanaan Indonesia*, 5(3), 210-225.
- Mawuntu, P. S. T., & Aotama, R. C. (2023). Analisis Faktor Penghambat Pertumbuhan UMKM Kota Tomohon di Era New Normal. *Jurnal Ekobistek*, 12(1), 466-472.
- Nawawi, A., Gunawan, C. I., & Sasmito, C. (2023). Strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kelurahan Tlogomas Kota Malang. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 18(1), 27-36.
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah. *Journal of Applied Business & Economics (JABE)*, 9(2).
- Nugroho, Y. (2020). Keterlibatan unit kerja dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 8(1), 33-47.
- Prasetyo, R. (2021). Analisis kebutuhan dalam perencanaan program pembangunan masyarakat. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 8(3), 201-215.
- Prastiwi, D. D., & Wiyaka, A. (2023). Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Dalam Program Lapak Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2022: Suatu Penelitian tentang Pengembangan Usaha Mikro dalam Program Lapak Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2022. *JURNAL SOSIAL Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 24(1), 11-14.
- Putri, I. M., Susanto, T., & Dewi, N. K. (2022). Komponen utama program pembangunan sumber daya manusia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 78-92.
- Rachma, N., & Abdullah, A. (2024). Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(3), 2526-2535.
- Rahayu, P. (2023). Transparansi dan akuntabilitas melalui pengelolaan anggaran. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 14(1), 90-105.
- Rahmawati, N. (2020). Peran program dalam manajemen organisasi modern. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 99-110.
- Rizal, M. (2022). Peran pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 78-91.

- Rustamana, A., Rohmah, N., Natasya, P. F., & Raihan, R. (2024). Konsep Proposal Penelitian Dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 5(5), 71-80.
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54-64.
- Santoso, P. (2021). Sistem pemerintahan demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 6(1), 34-49.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.
- Sari, N., & Nugroho, T. (2020). Peran pemerintah dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 14(4), 150-167.
- Sari, R. M., & Putra, J. (2021). Pengertian dan konsep dasar program dalam pembangunan. *Jurnal Pembangunan Indonesia*, 10(3), 145-158.
- Sholikhah, V. (2021). Manajemen strategi ekonomi agribisnis dalam konteks ilmu ekonomi mikro. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 113-129.
- Siahaan, A. M., Siahaan, R., & Siahaan, Y. E. (2020). Faktor pendukung dan penghambat kinerja UMKM dalam meningkatkan daya saing. *Jurnal Stindo Profesional*, 6(6), 143- 156.
- Siregar, I., Meisah, N., Permatasari, N., Kadafi, M. R., Yogi, M., Wardana, D. A., ... & Harahap, M. F. (2023). Peran Pemerintah Kelurahan Sei Kera Hilir II Dalam Kepemerintahan yang Baik. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 3(2), 497-505.
- Sugiyono, (2021). Analisis Strategi Guru Dalam Menumbuhkan Kemampuan Literasi Siswa Kelas V Di Sdn Gajah 02. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 8(1), 658- 670.
- Sutrisno, E. (2022). Evaluasi anggaran sebagai alat perbaikan pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 18(2), 115-130.
- Teguh, M. T. S., Wulan, T. N., & Juansah, D. E. (2023). Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif pada Metode Penelitian. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(3), 5962-5974.
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif untuk riset akuntansi budaya. *Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1), 44-50.
- Tumija, T. (2022). Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi COVID-19 di Cipageran, Cimahi. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 25-37.

- Wahyudi, M., & Hasanah, N. (2020). Pengendalian anggaran untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 14(2), 78-92.
- Wijaya, T. (2022). Anggaran sebagai alat pengendalian sosial dalam pemerintahan. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 17(1), 50-66.
- Wijaya, T., & Susilo, A. (2021). Metode evaluasi program sosial: Studi empiris di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Evaluasi*, 5(2), 77-89.
- Wirawan, A. (2021). Administrasi publik dan penyelenggaraan pemerintahan efektif. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(3), 99-114.
- Wisata Sekapuk Kabupaten Gresik. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(3), 886-912.
- Wulandari, S. H., & Hasan, D. B. N. (2023). Analisis tingkat literasi label halal pengusaha umkm kerupuk di desa Dakiring (studi kasus desa dakiring, kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan). *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law*, 2(1), 33- 47.
- Yuliani, F. (2021). Pengawasan anggaran sebagai kunci keberhasilan organisasi. *Jurnal Manajemen Strategis*, 10(2), 110-125.
- Yulietta, A. L., & Sianturi, A. A. G. (2023). Strategi Pengembangan Umkm Home Industry Melalui Pendekatan Analisis Swot Di Kelurahan Nginden Jangkungan. *Journal of Community Service (JCOS)*, 1(3), 176-186.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada

Pemerintah

Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP) Tahun 2023

Peraturan Kalurahan Guwosari Tahun 2023 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kepurusan Lurah Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan UMKM



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 086/PEM/J/X/2024

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Maria Andriana Peria Doni N
No. Mahasiswa : 20520111
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul : 10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.



Yogyakarta, 10 Oktober 2024

Ketua Program Studi

Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id


SURAT TUGAS

Nomor : 23/I/T/2025

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Maria Andriana Peria Doni N
Nomor Mahasiswa : 21520111
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul
b. Sasaran : Strategi Pemerintah kalurahan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 14 Januari 2025
Ketua

Suforo Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 36/I/U/2025
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul
Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :


Nama : Maria Andriana Peria Doni N
No Mhs : 21520111
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Strategi Pemerintah kalurahan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Tempat : Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul
Dosen Pembimbing : Dr. Rumsari Hadi Sumarti, S.I.P., M.P.A

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Januari 2025

Ketua


Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN
KALURAHAN GUWOSARI

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦒꦸꦮꦺꦴꦱꦂꦶ

Jl. Guwosari Raya Iroyudan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, Telp/WA 0274 6461041

Kode Pos 55751 Website : guwosari.desa.id e-mail desa.guwosari@bantulkab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 400.14.5.2/028

Memperhatikan : Surat dari : STPMD APMD YOGYAKARTA
Nomor : 36/I/U/2025
Tanggal : 14 Januari 2025
Perihal : Izin Penelitian

Pemerintah Kalurahan Guwosari, memberikan izin kepada :

1. Nama : Maria Andriana Peria Doni N
2. NIM : 21520111
3. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
4. No. HP : 0822 3783 9403

Untuk melaksanakan **Izin Penelitian** dengan rincian sebagai berikut :

- a) Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- b) Lokasi : Kalurahan Guwosari
- c) Waktu izin : 23 Januari – 23 Februari 2025
- d) Status izin : Baru

Ketentuan yang harus ditaati :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib memenuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya diberikan untuk kegiatan sesuai izin yang diajukan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk **hardcopy (hardcover)** dan **softcopy(CD)** kepada Pemerintah Kalurahan Guwosari setelah selesai melaksanakan kegiatan;
7. Izin dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Guwosari

Pada tanggal : 23 Januari 2025

Lurah Guwosari

Carik

NUR HIDAYAT, S.E.

Interview Guide (Panduan Wawancara)

Lurah Guwosari :

1. Apa visi dan misi Kalurahan Guwosari terkait pengembangan UMKM?
2. Apa langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah kalurahan untuk mendukung UMKM?
3. Bagaimana Bapak/Ibu memprioritaskan program pengembangan UMKM di kalurahan ini?
4. Apakah ada kerja sama dengan pihak lain (misalnya pemerintah daerah, lembaga keuangan, atau swasta) untuk mendukung pengembangan UMKM?
5. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kalurahan dalam mendukung UMKM?
6. Bagaimana cara pemerintah mengevaluasi keberhasilan program UMKM?
7. Apa harapan Bapak/Ibu untuk pengembangar 1KM di Kalurahan Guwosari?

Sekretaris (Carik) Guwosari :

1. Apa peran sekretariat dalam mendukung program pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari?
2. Bagaimana pemerintah kalurahan menyusun anggaran untuk program pengembangan UMKM?
3. Apa saja program atau kegiatan rutin pemerintah kalurahan yang diarahkan untuk mendukung UMKM?
4. Bagaimana administrasi pengelolaan data UMKM di Kalurahan Guwosari dilakukan?
5. Apakah ada kendala teknis dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM?

Kaur Pembangunan atau Staf yang Menangani UMKM :

1. Apa strategi intensif yang pernah dilakukan untuk UMKM?
2. Apa saja program yang pernah dilaksanakan untuk pengembangan UMKM?

3. Apakah ada pelatihan atau pendampingan khusus yang diberikan kepada pelaku UMKM?
4. Bagaimana cara pemerintah kalurahan membantu pemasaran produk UMKM?
5. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program untuk UMKM?
6. Bagaimana dukungan permodalan yang diberikan kepada pelaku UMKM?

Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) :

1. Apa peran BPD dalam mendukung kebijakan pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari?
2. Bagaimana proses musyawarah terkait program pengembangan UMKM di tingkat kalurahan?
3. Apakah BPD ikut mengawasi implementasi program pengembangan UMKM? Jika iya, bagaimana mekanismenya?
4. Apa saja usulan yang diberikan oleh BPD untuk mendukung UMKM?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan pengembangan UMKM yang ada saat ini sudah efektif?

Pelaku UMKM Kalurahan Guwosari :

1. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam mengembangkan usaha di Kalurahan Guwosari?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima bantuan dari pemerintah kalurahan? Jika iya, apa bentuknya?
3. Apakah program pemerintah kalurahan membantu pengembangan usaha Bapak/Ibu?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kalurahan Guwosari?
5. Apa saja kendala utama yang Bapak/Ibu hadapi sebagai pelaku UMKM?
6. Apa harapan Bapak/Ibu kepada pemerintah kalurahan dalam mendukung UMKM?

7. Bagaimana pengembangan UMKM dari tahun ke tahun?

Masyarakat Kalurahan Guwosari :

1. Apa pandangan Bapak/Ibu tentang keberadaan UMKM di Kalurahan Guwosari?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui program pemerintah kalurahan terkait pengembangan UMKM?
3. Apakah Bapak/Ibu merasa program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat umum?
4. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemerintah kalurahan dalam mendukung UMKM?
5. Bagaimana masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Guwosari?

DOKUMENTASI

Pasca wawancara bersama Pak Nur Hidayad selaku Carik
di Kalurahan Guwosari Pada tanggal 05 Februari 2025



Sumber : Dokumen Peneliti

Pasca wawancara bersama Pak Umar Wanto selaku Ulu-Ulu
di Kalurahan Guwosari Pada tanggal 31 Januari 2025



Sumber : Dokumen Peneliti

Pasca wawancara bersama Pak Muhaimin selaku Ketua BamusKal
di Kalurahan Guwosari Pada tanggal 04 Februari 2025



Sumber : Dokumen Peneliti

Pasca wawancara bersama Pak Sumaryadi selaku Pelaku UMKM
di Kalurahan Guwosari Pada tanggal 31 Januari 2025



Sumber : Dokumen Peneliti

Pasca wawancara bersama Ibu Erlin selaku Pelaku UMKM
di Kalurahan Guwosari Pada tanggal 07 Februari 2025



Sumber : Dokumen Peneliti

Pasca wawancara bersama Ibu Eko Purwati selaku Pelaku UMKM
di Kalurahan Guwosari Pada tanggal 07 Februari 2025



Sumber : Dokumen Peneliti

Pasca wawancara bersama Ibu Tri selaku Pelaku UMKM
di Kalurahan Guwosari Pada tanggal 07 Februari 2025



Sumber : Dokumen Peneliti

Pasca wawancara bersama Pak Asngari selaku Pelaku UMKM
di Kalurahan Guwosari Pada tanggal 07 Februari 2025



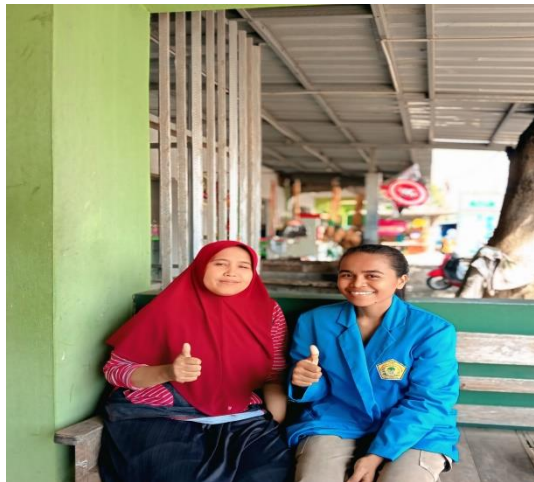
Sumber : Dokumen Peneliti

Pasca wawancara bersama Pak Susilo selaku Masyarakat
di Kalurahan Guwosari Pada tanggal 31 Januari 2025



Sumber : Dokumen Peneliti

Pasca wawancara bersama Ibu Eni selaku Masyarakat
di Kalurahan Guwosari Pada tanggal 31 Januari 2025



Sumber : Dokumen Peneliti